



BUPATI SUMENEP

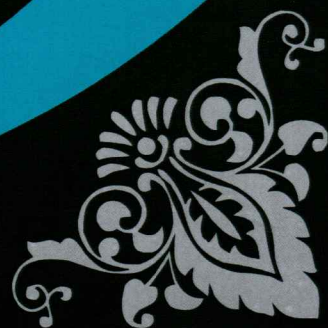


**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI
SUMENEP**

TAHUN 2021

KEPADA :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

JL. Trunojoyo Nomor 124 Telp. (0328) 664344 Fax. (0328) 662211

S U M E N E P

Kode Pos 69417

R E K O M E N D A S I

Nomor : 188 / Rek. 02 / 435.050 / 2021

**TENTANG
HASIL PEMBAHASAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Menimbang : Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021, kami Ketua DPRD Kabupaten Sumenep dengan ini menerangkan bahwa Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2020 telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2020 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang kemudian dituangkan dalam Rekomendasi kepada Bupati Sumenep sebagai bahan dalam :
- penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

MEREKOMENDASIKAN

KEPADA YTH. : BUPATI SUMENEP

Untuk : **1. Pendapatan Daerah**

Pansus membaca, bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam LKPJ Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2020, tertulis bahwa pendapatan daerah telah tercapai **100,85%**. Prosentase itu bisa disimpulkan, telah terjadi peningkatan pendapatan daerah di tahun 2020, dan rupanya peningkatan pendapatan daerah tersebut didukung oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tercapai sebesar **15.06%**. Pencapaian pendapatan asli daerah yang melebihi target tersebut, meski hanya sedikit, patut disyukuri dan disambut gembira. Namun, ketika kami tahu apa saja **komponen** Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020, yang masih bertumpu pada pajak dan bagi hasil, maka kegembiraan itu pelan-pelan berkurang. Dan kami masih belum lupa, bahwa pansus LKPJ yang sebelum-sebelumnya telah berulang-ulang mengatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak mengalami kemajuan, dan

bahkan, dengan berulang-ulang juga, meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk lebih kreatif dan inovatif lagi memberdayakan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sumenep.

Jadi, untuk kali ini, kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru, mengulangi permintaan yang sama, yaitu agar Pemerintah Kabupaten Sumenep benar-benar membangun semangat dan langkah-langkah kreatif serta inovatif dalam upaya memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumenep untuk menumbuhkembangkan pendapatan asli daerah, sehingga cita-cita mulia untuk mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, bisa tercapai, dan bukan hanya mimpi indah yang diselipkan di saat kita asyik berdiskusi.

2. Belanja Daerah

Pada sisi belanja, Pansus membaca, secara garis besar Belanja Daerah pada tahun anggaran 2020, telah mampu diserap sebesar **86.45%**. Dengan kata lain, semangat yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membelanjakan anggaran bisa dikatakan sudah cukup baik. Namun, apakah kemudian kinerja anggaran tersebut berbanding lurus dengan kualitas program dan kegiatan atau tidak, untuk mengetahuinya, maka simaklah terlebih dahulu beberapa catatan di bawah ini, sebagai sampel hasil pembahasan Pansus yang merupakan hasil kompilasi antara temuan di lapangan dengan penjelasan dari OPD-OPD yang sudah hadir selama pembahasan berlangsung:

A. Pendidikan

1. Belum representatifnya sarana dan prasarana pendidikan yang disebabkan oleh tidak adanya grand desain yang jelas serta tidak didukung oleh anggaran khususnya pada pembangunan akses jalan menuju sekolah dan bangunan gedung sekolah di daerah-daerah terpencil;
2. Masih ditemukan adanya sekolah yang jumlah muridnya tidak mencapai jumlah yang dipersyaratkan (bahkan ada sekolah yang muridnya hanya ada satu sampai lima per kelas) dan ini tidak ada langkah tegas dari pemerintah kabupaten sumenep untuk dilakukan **regrouping**;
3. Masih ditemukan adanya guru-guru yang melalaikan tugasnya (bolos) khususnya guru-guru yang ada di kepulauan dan ini masih belum ada tindakan tegas;

B. Kesehatan

1. Pelayanan kesehatan di RSD Moh. Anwar masih menjadi masalah, dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD masih sama. Pansus pun terheran-heran, sebenarnya apa yang diinginkan para pelayan kesehatan di RSD tersebut. Ketika kami tanyakan kepada Direktur RSD tentang pelayanan kesehatan, beliau malah curhat. Kami pun mendengarkan dengan sabar dan tabah curhatan direktur tersebut dan didapatkan informasi bahwa beban tugas yang ditanggung oleh para pelayan kesehatan di RSD itu sudah melebihi standar dan tidak sebanding dengan jasa pelayanan yang diterima. Kami pun berkesimpulan, bahwa kesejahteraan yang tidak sebanding dengan beban tugas para pelayan kesehatan di RSD adalah salah satu pemicu dari hilangnya **“senyum”** bibir dari para pelayan kesehatan. Direktur RSD juga menyampaikan bahwa RSD mengalami kekurangan **“tenaga medis dan para medis”**, yang juga menjadi faktor tidak maksimalnya pelayanan kesehatan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kami meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menambah tenaga medis dan para medis dan juga selanjutnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait masalah-masalah terjadi di RSD agar masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep bisa terselesaikan.
2. Keberadaan Puskesmas Pandian yang pelayanannya seperti sudah melampaui pelayanan kesehatan di RSD seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Sumenep karena lahan parkir puskesmas yang terbatas sangat mengganggu kenyamanan lalu lintas para pengguna jalan umum, dan sudah seharusnya puskesmas tersebut direlokasi dan dicarikan tempat yang lebih representatif. Selain itu, sampai sekarang, masih terdapat puskesmas yang masih belum memiliki pengolahan limbah, khususnya limbah B3, tolong segera ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.

C. Infrastruktur

1. Percepatan pembangunan infrastruktur di kepulauan masih belum terpenuhi, khususnya di daerah-daerah terpencil dan diharapkan bisa terwujud pada tahun-tahun berikutnya, agar disparitas antara daratan dan kepulauan tidak terlalu tampak, dan diharapkan juga pada tahun-

tahun berikutnya jalan-jalan (khususnya jalan kabupaten) yang mendesak di bangun haruslah menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran dan dikerjakan;

2. Perlu penambahan anggaran yang signifikan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan-jalan poros kecamatan dan daerah terpencil;
3. Permasalahan banjir di tahun 2020 semakin menjadi-jadi dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang menyeluruh. Kami mati-matian bertahan untuk tidak mengatakan bahwa **Nata Kota Bangun Desa** itu gagal, akan tetapi fakta yang terjadi justru mengarah ke arah itu;
4. Revitalisasi pasar 2020 mungkin sukses dari sisi serapan anggaran dan pembangunannya, akan tetapi belum bisa dikatakan sukses dalam hal menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena terbukti beberapa pasar yang sudah di bangun tidak mau ditempati oleh masyarakat. Bahkan yang terjadi di pasar Ganding, perekonomian malah tumbuh subur di luar pasar;
5. Untuk mamaksimalkan peningkatan PAD dari sektor pasar dan dalam rangka meminimalisir kebocoran, maka Pansus merekomendasikan agar pengelolaan pasar diserahkan kepada pihak ketiga
6. Banyak keluhan tentang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah mati, namun penanganan pemeliharannya begitu lambat, bahkan tidak ada. Ada masyarakat berkali-kali menyampaikan aduan langsung kepada Dinas Perhubungan, namun yang ada hanya janji-janji untuk segera ditangani, tapi tidak segera ditangani. Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa armada yang menangani pemeliharaan yang dimiliki Dinas Perhubungan cuma ada satu dan itu pun untuk mengangani seluruh pemeliharaan di Kabupaten Sumenep. Maka, pada kesempatan ini Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pemeliharaan PJU di Kabupaten Sumenep, pengelolaannya diserahkan kepada Pihak ketiga;

D. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

1. Program incubator dengan tujuan mencetak 5000 wirausaha muda seharusnya menjadi program primadona yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Akan tetapi, hal terjadi justru tidak seperti itu. Ketika mendengarkan penjelasan Kepala Dinas

yang berkompeten, dari 5000 target yang dicetak rupanya hanya ada beberapa saja yang bisa mandiri menjalankan usahanya selepas menjalani program binaan dan latihan (Incubator). Kami tidak ingin mengatakan program ini tidak memiliki impact atau uotputnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, maka program ini tidak begitu berpengaruh.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program pusat sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi agar benar-benar diawasi dengan ketat dalam proses pelaksanaannya oleh Tim Pendamping BPNT baik dari TKS Kabupaten Sumenep dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima bantuan dengan kualitas bantuan yang baik, dan juga demi mencegah terjadinya status ganda karena di bawah ada oknum yang berperan ganda, menjadi TKSK dan sekaligus menjadi suplaier.
3. Untuk menjaga kualitas bantuan yang diserahkan kepada penerima, maka perlu dipertimbangkan untuk pengadaannya diberikan kepada pihak ketiga yang independen dan bertanggungjawab.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 19 April 2021

**KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



H. ABDUL HAMID ALI MUNIR, SH



BUPATI SUMENEP

Sumenep, 22 Maret 2022

Nomor : 050/312 /435.202/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 50 (lima puluh) eksemplar
Perihal : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Akhir Tahun
Anggaran 2021

Kepada
Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumenep
di-
SUMENEP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa : "Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka dapat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penyusunan LKPJ merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahun 2021.
2. Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan amanat konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, yang berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagai bahan bahas dan evaluasi DPRD Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun berikutnya.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


BUPATI SUMENEP
ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.



BUPATI SUMENEP

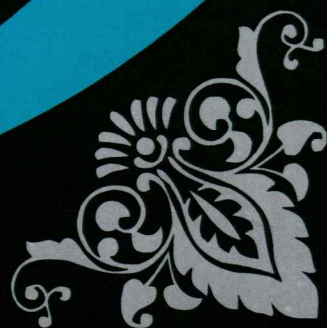


**LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI
SUMENEP**

TAHUN 2021

KEPADA :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2021 dapat disusun tepat waktu dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LKPJ Tahun 2021 merupakan pelaporan penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana dalam pasal 19 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

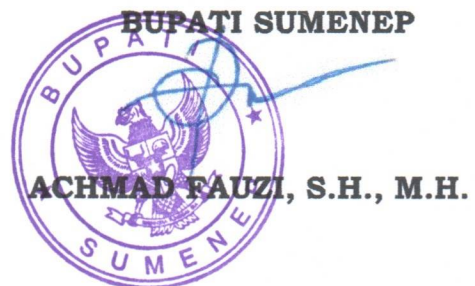
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menyajikan data capaian yang mengindikasikan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021. Keberhasilan pembangunan daerah serta berbagai prestasi yang telah dicapai pada tahun 2021 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Aparat Keamanan, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, serta pihak

swasta yang telah memberikan dukungan. Catatan strategis hasil rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sumenep terhadap LKPJ merupakan masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sumenep pada masa yang akan datang.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep tahun 2021 dapat berguna dan bermanfaat untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sumenep, dan mudah-mudahan seluruh upaya yang telah kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah SWT. Amiiin...

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Sumenep, Maret 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Dasar Hukum	I-1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I-2
1.2.1 Visi	I-2
1.2.2 Misi.....	I-6
1.2.3 Tujuan dan Sasaran.....	I-10
1.3 Data Umum Daerah	I-12
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I-12
1.3.2 Jumlah Penduduk.....	I-16
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	I-18
1.3.4 Jumlah PNS	I-19
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	I-21
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-22
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-23
1.3.8 Realisasi Belanja masing-masing SKPD	I-25

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN SUMENEPII-1

- 2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah II-2
- 2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah II-4
- 2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah II-7

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....III-1

- 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-2
 - 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayan Dasar III-3
 - 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayan Dasar III-62
 - 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan III-102
 - 3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum III-116
 - 3.1.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang III-128
 - 3.1.6 Pelaksanaan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan III-140
 - 3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan III-143
- 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan III-191
- 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya III-198

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN PENUGASANIV-1

4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan..... IV-1

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan

Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah

Tingkat diatasnya IV-4

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan

Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan

Pemerintahan dibawahnya IV-5

4.2 Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan Upaya Penyelesaian IV-25

BAB V PENUTUPV-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep.....	I-13
Tabel 1.2 Topografi Kabupaten Sumenep.....	I-14
Tabel 1.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep.....	I-17
Tabel 1.4 Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2021	I-18
Tabel 1.5 Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin	I-20
Tabel 1.6 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia.....	I-20
Tabel 1.7 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	I-20
Tabel 1.8 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan	I-20
Tabel 1.9 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon	I-21
Tabel 1.10 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021	I-22
Tabel 1.11 Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I-23
Tabel 1.12 Tabel Realisasi Pembiayaan	I-24
Tabel 1.13 Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021	I-25
Tabel 2.1 Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	II-2
Tabel 2.2 Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2021.....	II-4

Tabel 2.3 Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah	
Tahun 2021.....	II-7
Tabel 3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan	
Pelayanan Dasar	III-3
Tabel 3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan	
dengan Pelayanan Dasar	III-62
Tabel 3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	III-102
Tabel 3.4 Pelaksanaan Urusan Pendukung Urusan	
Pemerintahan.....	III-116
Tabel 3.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi	
Penunjang.....	III-128
Tabel 3.6 Pelaksanaan Urusan Pengawasan Urusan	
Pemerintahan.....	III-140
Tabel 3.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan.....	III-143
Tabel 3.8 Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan	
Tahun 2021.....	III-191
Tabel 3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran	
2020.....	III-198
Tabel 4.1 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan	
Program urusan Kelautan dan Perikanan	
Tahun 2021.....	IV-4
Tabel 4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan	
Program urusan Kelautan dan Pertanian	
Tahun 2021.....	IV-5

Tabel 4.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Dana
Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2021IV-7

Tabel 4.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa
di Kabupaten Sumenep Tahun 2021IV-16

BAHI

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura sekitar 153 km kearah timur Surabaya yang terdiri dari 27 kecamatan, 330 desa dan 4 kelurahan dan Kabupaten Sumenep memiliki pulau yang cukup banyak yaitu 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni dengan Luas wilayah laut kurang lebih 50.000 km² sedangkan luas daratan (wilayah daratan dan kepulauan) sebesar 2.093,458 km dengan ketinggian wilayah daratan antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut sehingga dapat ditanami beranekaragam tanaman pangan dan perkebunan potensial.

Sesuai ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai kewajiban, “menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LEPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

Dalam upaya melaksanakan pembangunan yang lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021, untuk mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan dengan didukung berbagai fasilitas layanan public yang sesuai dengan standart pelayanan minimal (SPM), serta kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat

dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

1. Sumenep Makin Sejahtera di sini memiliki dua makna. *Pertama*, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industri*) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi *trend* terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat

global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (*meaning*) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman *glamourisme* dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan Masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

- 2. Pemerintahan yang Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).
- 3. Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/*spirit* dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan

tercipta masyarakat yang memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

- 4. Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 5. Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (*citizen*) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan Masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.
- 6. Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir 'ketimpangan' distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty*, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (*need assesment*) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara

masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan 'manis'nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

7. **Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan 'orang luar' (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

1.2.2. Misi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.** Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Misi Kedua, **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.** Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten

Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagipelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sector pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu member dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

Misi Keempat, **Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Accountable.** Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalis medan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Misi Kelima, **Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Misi Keenam, **Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Di samping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala

aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
 - a. Meningkatkan perekonomian daerah;
4. Tujuan dari misi 4 adalah :
 - a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;
5. Tujuan dari misi 5 adalah :
 - a. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
6. Tujuan dari misi 6 adalah :
 - a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal;

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Misi 1 adalah :

- a. Meningkatnya Akses dan Kualitas pendidikan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

2. Sasaran Misi 2 adalah :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman/perumahan secara memadai
- c. Meningkatnya kelestarian lingkungan

3. Sasaran Misi 3 adalah :

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
- b. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan
- c. Meningkatnya konsumsi pangan dan keragaman pangan
- d. Meningkatnya daya saing sector industry dan perdagangan
- e. Meningkatnya daya saing sector Koperasi dan UMKM
- f. Meningkatnya daya tarik wisata
- g. Meningkatnya daya tarik Investasi
- h. Meningkatnya kemandirian keuangan Pemerintah Daerah

4. Sasaran Misi 4 adalah :

- a. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda
- b. Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Daerah

5. Sasaran Misi 5 adalah :

- a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan social
- b. Menigkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak

6. Sasaran Misi 6 adalah :

- a. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama
- b. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni dan budaya.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1.Data Geografis Wilayah

1. Letak Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara 113° 32' 54" – 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' – 7° 24' Lintang Selatan dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

2. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1,564 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan;

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km² (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan, 260 desa dan 4 kelurahan
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km² (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan dan 70 desa

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan

Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Adminsitrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km2)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	20	43	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batu Putih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	62	201,89
JUMLAH		334	1.564	2.093,47

Sumber : - Kabupaten Sumenep dalam Angka 2021
 - Dinas PMD Kab. Sumenep, Tahun 2021

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%	
A.	Ketinggian Tempat				
		1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
		2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
		3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
B.	Ketinggian Tempat				
		1. Datar	0° – 2°	51.962	26
		2. Landai	2° – 15°	125.908	63
		3. Miring	> 15°	21.984	11

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2019

4. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh kompleks Mediteran Merah, Litosol dan Grumosol, merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan liat pada horizon bawah, bersifat masam dan kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat menembang dan mengerut (sifat *vertik*): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-

unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak; utamanya dengan perlakuan pemupukan.

5. Klimatologi

Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 429,80 mm. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga curahan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2021 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Februari, juga terjadi pada bulan Desember, yaitu 397,10 mm. Pada bulan Juli curah hujan menurun menjadi 45,30 mm. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan sampai bulan September.

Gejala alam yang sulit diprediksi mengakibatkan pada musim kemarau masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan April -Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. Menurut catatan tahun 2021, rata-rata turun hujan sejumlah 168 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Februari dan Desember. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi juga terjadi pada Februari dan Desember. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 25 sementara pada bulan Desember sebanyak 29 jumlah hari hujan.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober sebesar 100% memancarkan sinarnya. Sebaliknya sinar matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Desember. Bulan Desember matahari hanya memancarkan sinarnya sebesar 29,29%, sementara itu pada bulan Februari sebesar 54,51%.

Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada suhu udara paling tinggi terjadi pada bulan September, yaitu mencapai 29,32 derajat celcius. Sementara itu

pada bulan Desember suhu udara menunjukkan titik terendah dibandingkan dengan bulan lainnya yakni sebesar 27,24 derajat celcius. Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Juli, Agustus dan September. Pada bulan Agustus kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 3,98 m/sec sedangkan bulan September kecepatan angin mencapai 3,15 m/sec. Sementara pada bulan Maret, April, November dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2021 (DKB Semester II Tahun 2021) sebanyak 1.134.810 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 547.190 jiwa (48,22 %) dan perempuan 587.620 jiwa (51,78 %) dengan sex ratio sebesar 93,12 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data BPS jumlah Penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 yang sebanyak 1.133.224 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 546.826 jiwa (48,25%) dan perempuan 586.398 jiwa (51,75%) dengan sex ratio sebesar 93,25 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Tabel 1.3**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep**

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Pragaan	Pragaan Laok	66.395	21.888	57,84	1147
2	Bluto	Bunbungan	48.006	15.726	51,25	936
3	Saronggi	Tanamerah	37.924	13.357	67,71	560
4	Giligenting	Aenganyar	24.002	8.389	30,32	792
5	Talango	Talango	38.563	13.945	50,27	771
6	Kalianget	Kalianget Timur	42.486	15.247	30,19	1407
7	Kota Sumenep	Pamolokan	74.789	24.757	27,84	2686
8	Batuan	Batuan	13.484	4.558	27,1	498
9	Lenteng	Ellak Laok	61.678	19.924	71,41	867
10	Ganding	Ketawang Larangan	36.423	11.421	53,97	675
11	Guluk-guluk	Guluk-guluk	49.909	15.079	59,57	838
12	Pasongsongan	Panaongan	51.052	15.658	119,03	429
13	Ambunten	Ambunten Timur	40.508	14.367	50,54	284
14	Rubaru	Rubaru	39.759	11.911	84,46	471
15	Dasuk	Kerta Timur	30.514	10.369	64,5	473
16	Manding	Manding Laok	29.998	9.587	68,88	435
17	Batuputih	Batuputih Laok	44.253	15.330	112,31	394
18	Gapura	Gapura Barat	37.875	13.105	65,78	576
19	Batang-batang	Batang-batang Daya	55.213	19.207	80,36	687
20	Dungkek	Dungkek	36.348	14.018	63,35	574
21	Nonggunong	Sokarame Paseser	13.555	5.701	40,08	338
22	Gayam	Pancor	32.313	13.505	88,4	366
23	Raas	Brakas	38.639	14.148	38,9	993
24	Sapeken	Sapeken	53.128	16.943	201,89	263
25	Arjasa	Kalikatak	85.091	31.400	241,99	352
26	Kangayan	Kangayan	26.142	10.050	204,68	128
27	Masalembu	Sukajeruk	26.763	9.286	40,85	655
TAHUN 2021			1.134.810	388.876	2.093,47	542
TAHUN 2020			1.138.168	383.973	2.093,47	544
TAHUN 2019			1.134.129	360.701	2.093,47	542
TAHUN 2018			1.126.724		2.093,47	539,89
TAHUN 2017			1.123.310		2.093,47	538,21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Pada tabel diatas, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2021 adalah Kecamatan Arjasa sebanyak 85.091 jiwa atau sekitar 7,50% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Batuan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.484 jiwa atau 1,20 % dari total jumlah penduduk. Dengan luas wilayah ± 2.093,47 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 adalah 542 jiwa/km².

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk total. Dimana penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan penambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imgrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2017-2021 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Tabel 1.4

Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2021

URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.081.204	1.085.227	1.088.910	1.124.436	1.133.224
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.126.724	1.130.260	1.134.129	1.138.168	1.134.810
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	0,409	0,372	0,339	3,26	0,78
- Dispenduk & Capil	%	0,30	0,31	0,31	0,36	0,29
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/km ²	516,47	518,39	520,15	537,11	537,11
- Dispenduk & Capil	jiwa/km ²	538	540	542	544	542

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020-2021

meningkat sebesar 3,26 persen. Sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 0,78%.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,30 persen, tahun 2018 sebesar 0,31 persen, tahun 2019 sebesar 0,31 persen, tahun 2020 sebesar 0,36 persen dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,29 persen.

1.3.4. Jumlah PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. pada Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS sering kali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pusat baik kementerian maupun lembaga pemerintahan pusat lainnya, serta PNS yang bekerja pada tingkat pemerintahan daerah, dengan tujuan mendorong kebijakan politik yang pro rakyat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. PNS juga bisa merencanakan dan mencanangkan suatu kebijakan politik dalam upaya menjalankan dan mendayagunakan kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep berdsarkan Jenis kelamin, Usia, Golongan, jenjang Pendidikan dan eselon sejak tahun 2017 s/d 2021 dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel 1.5
Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020	2021
Laki – Laki	6.452	6.049	5.876	5.746	5.477
Wanita	3.203	3.092	3.123	3.191	3.269
Total	9.655	9.141	8.999	8.937	8.746

Tabel 1.6
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

Usia	2017	2018	2019	2020	2021
Usia >55	1.416	1.438	1.505	1.662	1.524
Usia 45-55	4.342	4.099	3.864	3.631	3.747
Usia 36-45	2.739	2.685	2.652	2.637	2.696
Usia 25-35	1.156	918	937	949	755
Usia <25	2	1	41	58	24
Total	9.655	9.141	8.999	8.937	8.746

Tabel 1.7
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan	2017	2018	2019	2020	2021
Golongan I	180	165	142	135	110
Golongan II	2.539	2.230	1.980	1.836	1.671
Golongan III	4.143	4.113	4.405	4.659	4.672
Golongan IV	2.793	2.633	2.472	2.307	2.293
Total	9.655	9.141	8.999	8.937	8.746

Tabel 1.8
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
S-3	-	1	2	2	4
S-2	295	527	497	476	488
S-1	3.481	4.553	4768	4.947	5.272
D-III	1.020	966	1025	1.050	1.027
D-II	1.411	505	440	352	187
D-I	59	30	21	25	14
SLTA	2.903	2.285	2022	1887	1.590
SLTP	242	121	102	91	108
SD	244	153	122	107	56
Total	9.655	9.141	8.999	8.937	8.746

Tabel 1.9
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

Eselon	2017	2018	2019	2020	2021
Eselon II	35	33	32	28	27
Eselon III	192	203	202	194	170
Eselon IV	889	659	683	669	604
Eselon V	-	-	-	-	-
Fungsional	5.524	5.597	5.579	5.387	4.288
Staf PNS	3.015	2.649	2.503	2.659	3.657
Total	9.655	9.141	8.999	8.937	8.746

Sumber: Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.304.602.642.421,00,-. Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) Pendapatan Asli Daerah dan (b) Pendapatan Transfer yang didalamnya ada dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa dan Bantuan Keuangan serta (c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.10
Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.304.602.642.421,00	2.407.915.508.311,37	104,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	228.639.171.871,00	252.756.885.518,26	110,55
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	31.911.015.000,00	38.701.802.074,80	121,28
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.999.675.000,00	10.166.933.962,00	112,97
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.789.122.000,00	16.547.828.081,15	104,81
4.1.04	Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	171.939.359.871,00	187.340.321.400,31	108,96
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.997.932.252.938,00	2.065.566.060.377,14	103,39
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.893.304.248.300,00	1.911.309.552.262,00	100,95
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	104.628.004.638,00	154.256.508.115,14	147,43
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	78.031.217.612,00	89.592.562.415,97	114,82
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.167.929.000,00	2.892.353.910,00	28,45
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	67.863.287.612,00	86.700.208.505,97	127,76

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik dari tahun ke tahun. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang,

sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.11
Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

KODE	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
5	BELANJA DAERAH	2.699.540.796.984,00	2.402.696.455.029,47	89,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.794.860.579.135,00	1.572.471.040.804,68	87,61
5.1.01	Belanja Pegawai	1.003.732.336.281,00	934.063.745.654,86	93,06
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.872.002.461,00	490.159.325.317,78	78,19
5.1.03	Belanja Hibah	142.436.493.973,00	130.681.168.795,66	91,75
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	21.819.746.420,00	17.566.801.036,38	87,61
5.2	BELANJA MODAL	326.264.895.446,00	278.776.104.930,79	85,44
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.791.165.512,00	20.507.959.745,00	79,52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.802.704.963,00	60.894.244.152,38	74,44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.393.255.867,00	79.549.145.995,68	91,02
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.348.437.471,00	111.178.874.558,98	87,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.629.331.633,00	6.645.880.478,75	143,56
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.022.975.224,00	18.021.265.024,00	43,93
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	41.022.975.224,00	18.021.265.024,00	43,93
5.4	BELANJA TRANSFER	537.392.347.179,00	533.428.044.270,00	99,26
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000,00	3.302.334.000,00	91,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	533.794.347.179,00	530.125.710.270,00	99,31

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan

obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
- b. Transfer dari Dana Cadangan
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- d. Penerimaan dana dari transfer deposito

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Transfer ke Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan merupakan informasi mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

TABEL 1.12
Tabel Realisasi Pembiayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Pembiayaan	394.938.154.563,00	395.087.641.235,64	100,04
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	439.938.154.563,00	440.087.641.235,64	100,03
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	439.938.154.563,00	439.938.154.562,64	100
6.1.03	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	149.486.673,00	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100

1.3.8. Realisasi Belanja masing-masing SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan.

Sebagai dasar pertanggungjawaban atas kewenangan yang mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan, SKPD diminta untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai wujud pertanggungjawaban kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13
Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
1	1	1	DINAS PENDIDIKAN	694.293.536.525,00	654.491.950.146,07	94,27
1	2	1	DINAS KESEHATAN	339.414.558.158,00	280.244.551.200,29	82,57
1	2	2	RSUD. H.MOH ANWAR	173.056.025.359,00	114.801.622.495,54	66,34
1	3	1	DINAS PU BINA MARGA	98.694.495.969,00	90.365.335.955,52	91,56
1	3	2	DINAS PU SUMBER DAYA AIR	33.927.226.603,00	30.933.259.365,00	91,18
1	3	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	96.744.218.551,00	88.245.998.524,48	91,22
1	5	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.746.952.289,00	9.800.411.902,00	91,19
1	5	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.944.620.794,00	4.350.297.448,00	87,98
1	6	1	DINAS SOSIAL	28.250.106.174,00	22.406.591.150,00	79,32
2	1	1	DINAS TENAGA KERJA	22.498.326.158,00	21.344.577.871,00	94,87
2	2	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	16.077.781.352,00	9.838.347.479,00	61,19
2	3	1	KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	14.274.187.032,00	11.554.824.573,66	80,95
2	5	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.803.490.148,00	13.571.573.106,00	91,68
2	6	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.636.095.432,00	11.222.524.320,80	88,81
2	7	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.089.078.908,00	17.427.334.843,51	75,48
2	9	1	DINAS PERHUBUNGAN	55.387.258.403,00	45.799.092.336,78	82,69

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
2	10	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.532.498.479,00	16.578.540.628,00	89,46
2	11	1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.521.603.489,00	6.267.161.407,00	83,32
2	12	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.691.584.084,00	5.279.105.845,00	92,75
2	13	1	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	17.767.641.629,00	15.469.484.959,64	87,07
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.581.642.898,00	4.329.671.176,00	77,57
3	1	1	DINAS PERIKANAN	11.126.125.849,00	10.027.448.447,16	93,71
3	3	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	59.794.999.578,00	51.601.251.011,00	86,30
3	6	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	35.438.236.013,00	33.321.363.924,76	94,03
4	1	3	SEKRETARIAT DAERAH	64.618.503.421,00	59.138.580.360,64	91,52
4	1	4	SEKRETARIAT DPRD	70.765.204.774,00	58.278.159.670,76	82,35
4	1	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.750.294.844,00	11.374.652.563,00	89,21
4	1	6	KECAMATAN KOTA SUMENEP	11.008.188.886,00	10.666.022.110,00	96,89
4	1	7	KECAMATAN KALIANGET	2.752.010.113,00	2.371.370.098,00	86,17
4	1	8	KECAMATAN TALANGO	2.122.365.132,00	1.782.483.401,00	83,99
4	1	9	KECAMATAN MANDING	3.049.610.461,00	3.014.863.122,00	98,86
4	1	10	KECAMATAN BLUTO	2.928.314.833,00	2.769.390.950,00	94,57
4	1	11	KECAMATAN SARONGGI	2.785.489.268,00	2.535.608.213,00	91,03
4	1	12	KECAMATAN LENTENG	2.191.121.217,00	1.980.280.918,00	90,38
4	1	13	KECAMATAN GILIGENTENG	2.101.124.387,00	1.770.718.752,00	84,27
4	1	14	KECAMATAN GULUK_GULUK	2.040.700.883,00	1.845.174.440,00	90,42
4	1	15	KECAMATAN GANDING	2.467.767.748,00	2.355.693.212,00	95,46
4	1	16	KECAMATAN PRAGAAN	2.768.702.183,00	2.629.212.255,00	94,96
4	1	17	KECAMATAN RUBARU	2.328.741.463,00	2.138.709.522,00	91,84
4	1	18	KECAMATAN AMBUNTEN	2.623.669.251,00	2.463.882.264,00	93,91
4	1	19	KECAMATAN PASONGSONGAN	2.138.884.974,00	1.918.243.833,00	89,68
4	1	20	KECAMATAN DASUK	2.399.119.000,00	2.101.392.974,00	87,59
4	1	21	KECAMATAN BATANG BATANG	2.752.419.294,00	2.712.183.745,00	98,54
4	1	22	KECAMATAN BATUPUTIH	2.421.036.161,00	2.213.857.897,00	91,44
4	1	23	KECAMATAN GAPURA	2.737.736.763,00	2.484.627.534,00	90,75
4	1	24	KECAMATAN DUNGKEK	2.183.746.023,00	2.039.190.057,00	93,38
4	1	25	KECAMATAN GAYAM	2.883.028.061,00	2.801.204.677,00	97,16
4	1	26	KECAMATAN NONGGUNONG	2.487.509.740,00	2.437.611.348,00	97,99
4	1	27	KECAMATAN RAAS	2.058.766.781,00	1.816.277.504,00	88,22

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI	%
4	1	28	KECAMATAN MASALEMBU	1.879.961.686,00	1.678.498.190,00	89,28
4	1	29	KECAMATAN ARJASA	3.126.816.573,00	2.901.057.969,00	92,78
4	1	30	KECAMATAN SAPEKEN	2.326.231.309,00	2.010.451.166,00	86,43
4	1	31	KECAMATAN BATUAN	2.518.623.897,00	2.403.238.315,00	95,42
4	1	32	KECAMATAN KANGAYAN	2.110.159.110,00	1.701.484.784,00	80,63
4	2	1	INSPEKTORAT	13.390.118.498,00	11.563.128.676,00	86,36
4	3	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.433.998.680,00	10.477.635.532,01	91,64
4	4	1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	636.867.521.852,00	600.316.699.454,85	94,26
4	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.231.019.844,00	12.732.549.406,00	89,47
TOTAL BELANJA DAERAH				2.699.540.796.984,00	2.402.696.455.029,47	89,00

Sumber : BPPKAD 2021 (unaudited)

RAMBI

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah wajib, serta mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa yang besaran alokasinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD, apabila memenuhi ketentuan Pasal 161 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. keadaan darurat; dan/atau 5. keadaan luar biasa.

Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Sumenep harus melakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Hal ini sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah pusat, di antaranya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kembali

terhadap kebutuhan belanja penanganan dampak Pandemi Covid-19 melalui *refocusing* anggaran, serta adanya perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan asumsi di dalam kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, yang harus dilakukan penyesuaian pada tahun anggaran 2021.

2.1. Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 1) Pendapatan Daerah, 2) Belanja Daerah, dan 3) Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pendapatan daerah tahun 2021 diperhitungkan berdasarkan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan dana transfer yang diterima oleh Kabupaten Sumenep pada tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.1
Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2021

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2021 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2021 Rp.	SELISIH Rp.
4	PENDAPATAN DAERAH	2.311.242.385.198	2.304.602.642.421	(6.639.742.777)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	231.590.857.122	228.639.171.871	(2.951.685.251)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	33.689.000.000	31.911.015.000	(1.777.985.000)
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9.373.905.864	8.999.675.000	(374.230.864)
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.015.000.000	15.789.122.000	774.122.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	173.512.951.258	171.939.359.871	(1.573.591.387)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.013.191.600.076	1.997.932.252.938	(15.259.347.138)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.936.734.585.750	1.893.304.248.300	(43.430.337.450)

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2021 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2021 Rp.	SELISIH Rp.
	- Dana Perimbangan	1.589.896.337.750	1.546.466.000.300	(43.430.337.450)
	- Dana Intensif Daerah	911.8148.000	911.8148.000	0,00
	- Dan Desa	337.720.100.000	337.720.100.000	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	76.457.014.326	104.628.004.638	28.170.990.312
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.459.928.000	78.031.216.612	11.571.288.612
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.167.928.000	10.167.929.000	1.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.292.000.000	67.863.287.612	11.571.287.612

Secara umum target pendapatan daerah pada tahun 2021 dalam APBD perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 6.639.742.777,00, jika dibandingkan dengan sebelumnya, hal ini disebabkan terdapat pengurangan target pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Transfer. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami peningkatan target.

Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar, Rp 2.951.685.251,-, yang disebabkan oleh penurunan target pendapatan dari pajak, pendapatan retribusi daerah, dan Lain-lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah, sedangkan Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan.

Pendapatan Transfer terjadi penyesuaian sebesar Rp 15.259.347.138,- dari target sebelumnya yang disebabkan adanya pengurangan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat khususnya pada Dana Alokasi Umum ke daerah sebagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pemulihan kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi covid – 19. Sedangkan Pendapatan transfer antar daerah mengalami peningkatan.

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan target sebesar Rp 11.571.288.612,-. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2. Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yaitu : 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, serta 3) Urusan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, provinsi maupun nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penggunaan APBD harus lebih focus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada APBD tahun 2021 Pemerintah Daerah juga menetapkan target capaian kinerja baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan hingga sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, karena program, kegiatan dan sub kegiatan memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait hasil yang diharapkan ditinjau dari aspek tolok ukur kinerja baik dari sisi capaian program, masukan, keluaran kegiatan, hasil kegiatan hingga keluaran sub kegiatan.

Perubahan APBD Kabupaten Sumenep tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
5	BELANJA DAERAH	2.474.462.781.691	2.699.540.796.984	225.078.015.293
5.1	BELANJA OPERASI	1.690.119.237.165	1.794.860.579.135	104.741.341.970
5.1.01	Belanja Pegawai	1.052.838.514.812	1.003.732.336.281	(49.106.178.531)
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	501.298.111.305	626.872.002.461	125.573.891.156

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2021	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
5.1.05	Belanja Hibah	100.682.809.828	142.436.493.973	41.753.684.145
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	35.299.801.220	21.819.746.420	(13.480.054.800)
5.2	BELANJA MODAL	237.262.722.843	326.264.895.446	89.002.172.603
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.584.183.512	25.791.165.512	206.982.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.708.296.873	81.802.704.963	32.094.408.090
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.822.828.514	87.393.255.867	21.570.427.353
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	92.352.342.700	126.348.437.471	33.996.094.771
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.495.071.244	4.629.331.633	1.134.260.389
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000	0,00	(300.000.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.825.011.534	41.022.975.224	197.963.690
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.825.011.534	41.022.975.224	197.963.690
5.4	BELANJA TRANSFER	506.255.810.149	537.392.347.179	31.136.537.030
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.000.000	3.598.000.000	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	502.657.810.149	533.794.347.179	31.136.537.030

Sesuai Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 08 Februari 2021 Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan penyesuaian terhadap besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan refocusing terhadap belanja daerah sebesar 8% dari alokasi DAU TA. 2021 sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan dampak pandemi covid-19.

Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan *refocusing* anggaran dan hasilnya direalokasikan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung penanganan covid-19, vaksinasi, insentif tenaga Kesehatan daerah dalam rangka penanganan covid-19, serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam rangka

mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu belanja daerah diarahkan untuk pencapaian program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Sumenep tahun 2021.

Secara umum Belanja Daerah Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan sebesar Rp. 225.078.015.293, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, yang pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 104.741.341.970, yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai mengalami penyesuaian sebesar Rp. 49.106.178.531,-
 - belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp. 125.573.891.156.
 - belanja Hibah mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.753.684.145,-
 - belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp. 13.480.054.800,-
2. Belanja Modal, yang pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 89.002.172.603, yang terdiri dari :
 - Belanja modal tanah mengalami peningkatan sebesar Rp. 206.982.000,-
 - Belanja modal peralatan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.094.408.090,-
 - Belanja modal Gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp. 21.570.427.353,-
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.996.094.771,-
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.134.260.389,-
 - Belanja Modal Aset Lainnya mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 300.000.000,-
3. Belanja Tidak Terduga, yang pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 197.963.690,-.
4. Belanja Transfer, yang pada perubahan APBD tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 31.136.537.030, yang terdiri dari :

- Belanja Bagi hasil tidak mengalami perubahan.
- Belanja Bantuan Keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.136.537.030,-

2.3. Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Perubahan penjabaran pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 2.3
Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2021 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2021 Rp.	SELISIH Rp.
6	Pembiayaan	163.220.396.493,00	395.087.641.236	231.867.244.743
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	208.220.396.493,00	440.087.641.236	231.867.244.743
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	208.220.396.493	439.938.154.563	231.717.758.070
6.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Invesatasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00

Pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 231.867.244.743, pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah

Tahun Sebelumnya, yang terdiri atas Silpa kegiatan tahun 2020, DBHCHT, Pajak Rokok, BLUD, BOS, BK Provinsi, Hutang pihak ketiga, hutang retensi, DID, serta BPJS/JKN.

Sedangkan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2021 tidak terjadi perubahan target, baik dari Pembentukan Dana Cadangan maupun Penyertaan Modal (Invesatasi) Pemerintah Daerah.

BARITII

**HASIL PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN
DAERAH**

BAB III
HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka tugas umum Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dalam setiap aktivitas pembangunan daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah agar dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Ketertanggung daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga perlu meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Ketertanggung tersebut tercermin dari besarnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah) terhadap total pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya melaksanakan APBD dengan optimal dan efisien guna menangani prioritas-prioritas pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian setiap tahunnya, dan dibutuhkan variable sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, sehingga capaian dari masing-masing tahapan dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian target kinerja yang ditetapkan oleh SKPD.

Kinerja dapat diartikan sebagai keluaran/hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dibagi dalam : 1) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Pelaksanaan Urusan Pilihan dan 4) Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.

Capaian dari target program/kegiatan berdasarkan urusan kewenangan daerah dan evaluasi hasil pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3. 1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga yang berakreditasi A	%	10	9,45			Akan dilakukan pendataan ulang terhadap akses jalan ke masing-masing lembaga, terkait kebutuhan pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi terkaik Akses Jalan tersebut terutama di daerah terpencil akan di sampaikan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio siswa dengan rombel	Rasio	14:01	14:01			
					APK SD/MI/PAKET A	%	103,6	103,54			
					APM SD/MI/PAKET A	%	92,65	92,64			
					Persentase Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS	%	105,99	106			
					Rasio siswa dengan guru	Rasio	09:01	09:01			
					Persentase Angka Putus Sekolah SD	%	0,4	0,39			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	Ruang	5	5			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	Ruang	5	5			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	Unit	28	28			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	Unit	50	50			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	Lembaga	6	6			
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian	Lembaga	628	628			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kecamatan	27	27			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang mengikuti Kompetisi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kecamatan	25	25			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD	Orang	80	80			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah peserta PTK SD yang berijazah S-1/D-4	Orang	60	60			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi	Lembaga	579	579			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	Lembaga	579	579			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga yang menyelesaikan Laporan Dana Bos Tepat waktu	Lembaga	579	579			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTS/PAKET B	%	104,98	104,95			
					APM SMP/MTS/PAKET B	%	76,37	76,35			
					Persentase Angka Melanjutkan SMP/MTS ke SMA/MA	%	94,3	94,32			
					Persentase Angka Putus Sekolah SMP	%	0,4	0,38			
					Rasio siwa dengan guru	Rasio	09:01	09:01			
					Rasio siswa dengan rombel	Rasio	22:01	22:01			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah gedung yang di bangun	Paket	1	0	Dana Retensi tidak dapat di realisasikan di karenakan pihak ketiga sudah tidak di temukan	Tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Unit	35	35			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	11	11			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	3	3			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	2	2			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Unit	4	4			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Unit	3	3			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga yang di rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	5	5			
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Lembaga penerima pengadaan perlengkapan sekolah	Lembaga	1	1			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang mendapatkan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Lembaga	45	0	Gagal Kontrak	Tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian	Lembaga	195	195			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Peserta	150	150			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang mengikuti seleksi	Peserta	150	169			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta yang mengikuti olimpiade dan Festival SMP	Orang	85	85			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Diklat PTK SMP	Orang	250	0	Sebagian yang belum terealisasi adalah perjalanan dinas dalam daerah, yang memang tidak terserap di karenakan masa pandemi covid 19	Tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi	Lembaga	30	30			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP penerima Dana BOS	Lembaga	43	43			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Penerima BOS SMP yang menyelesaikan laporan tepat waktu	Lembaga	43	43			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Angka partisipasi kasar PAUD Formal	%	71,89	58,56			
					Persentase Rasio ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun	%	18	18			
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	Unit	41	41			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	Unit	1	1			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang di rehabilitasi	Unit	1	1			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di rehabilitasi	Unit	5	5			
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	jumlah lembaga PAUD	Lembaga	991	991			
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Orang	150	150			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Diklat PTK PAUD	Orang	250	0	Sebagian yang belum terealisasi adalah perjalanan dinas dalam daerah, yang memang tidak terserap di karenakan masa pandemi covid 19	Tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan	Lembaga	991	991			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah penerima BOP	Lembaga	991	991			
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Orang	845.560	845.600			
					Jumlah Lembaga PNF berizin	Lembaga	70	70			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhab	Unit	28	28			
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang melaksanakan Proses Belajar	Lembaga	21	21			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	90	90			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti program	Orang	50	50			
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima BOP	Lembaga	64	64			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru jenjang SD dan SMP	%	SD : 20, SMP : 25	SD : 10, SMP : 17			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru jenjang SD	%	20	10			
					Persentase satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum paradigma baru jenjang SMP	%	25	17			
					Persentase satuan pendidikan yang melakukan peninjauan kurikulum minimal dua tahun sekali Jenjang SD	%	75	75			
					Persentase satuan pendidikan yang melakukan peninjauan kurikulum minimal dua tahun sekali Jenjang SMP	%	80	80			
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga penyelenggara Mulok	Lembaga	43	43			
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah lembaga yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Lembaga	579	579			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penerapan Kurikulum Muatan Lokal	%	66,67	66,67			
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	Orang	52	52			
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta kesetaraan kejar PAKET	Orang	75	0	Tidak bisa dilaksanakan karena masih adanya wabah covid 19	Tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah PAUD yang difasilitasi	Kecamatan	27	27			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep	%	98	98,05			Terkait Hal tersebut bagi Guru-guru yang lalai terhadap tugasnya terutama di daerah kepulauan, kami sudah menindak lanjuti dan sudah dilaporkan ke Inspektorat serta dilakukan Pembinaan dan tindakan repressif kepada guru-guru yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Ketersediaan PTK di Semua Jenjang Pendidikan secara merata di kab. Sumenep	%	98	98,05			
				<i>Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>Jumlah k2 yang terfasilitasi</i>	<i>Orang</i>	<i>1187</i>	<i>729</i>	Jumlah k2 tahun 2021 menurun di karenakan sebagian sudah masuk PPPK dengan jumlah 458, dan harusnya terealisasi 14 bulan tapi hanya terealisasi sebanyak 12 bulan, dikarenakan non PNS tidak bisa di anggarkan Tunjangan 13 dan 14		
				<i>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal Kesetaraan</i>	<i>Jumlah sekolah berdasarkan rasio pendidik</i>	<i>Lembaga</i>	<i>750</i>	<i>750</i>			
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin Pendidikan	%	90,00%	90			
				Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang memenuhi ijin operasional Jenjang PAUD dan PNF	%	PAUD:80 PKBM:80	80			
				<i>Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang difasilitasi</i>	<i>Lembaga</i>	<i>80</i>	<i>80</i>			
				<i>Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Hibah/bansos yang di laksanakan</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>27</i>	<i>27</i>			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan mengintegrasikan bahasa dan sastra dalam kurikulum muatan lokal	%	90	90,4			
				Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase satuan pendidikan yang menyediakan bahan bacaan dengan bahasa lokal	%	SD, SMP : 5	5			
					Persentase satuan pendidikan yang menyediakan bahan bacaan yang mengulas sastra lokal	%	SD, SMP : 5	5			
				<i>Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah peserta yang melaksanakan</i>	<i>Orang</i>	<i>1300</i>	<i>1300</i>			
				<i>Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah peserta yang melaksanakan</i>	<i>Orang</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	90	90			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	30	30			
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>15</i>	<i>15</i>			
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan</i>	<i>Laporan</i>	<i>15</i>	<i>15</i>			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	26	26			
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya</i>	<i>Orang</i>	<i>59570</i>	<i>59570</i>			
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun</i>	<i>Laporan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	12	12			
				<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah</i>	<i>Laporan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	Administrasi	2	0			
				<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi</i>	<i>Orang</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	Kegiatan tidak dilaksanakan karena masih adanya penyebaran Covid 19	Anggaran dilakukan penggeseran ke kegiatan lain yang lebih diperlukan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang di penuhi	Item	3621	3621			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	30	30			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	200	200			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	Item	73	73			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	3			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis	37	37			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	378	378			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	60	60			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	60	60			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	2012	2012			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	Kali	2000	2000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Tagihan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	87	87			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	12	12			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	70	70			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	5	5			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	100			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Persentase pembangunan 2 puskesmas	%	100	100			
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pembangunan labkesda	%	100	100			
				Pengembangan (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang akan dikembangkan	puskesmas	4	4			
				Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pengadaan mobil promosi kesehatan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pembangunan IPAL Labkesda	%	100	100			Untuk pemenuhan pengelolaan limbah, terus kami lengkapi secara bertahap, tahun 2021 dilakukan pembangunan IPAL di Puskesmas RAAS.
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang memenuhi persyaratan	%	80%	80%			
				Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat esensial	%	80%	80%			
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan BMHP	%	80%	80%			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainn	paket	12	12			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (dinas Kesehatan)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	14294	13179	(1) Pandemi COVID-19	(1) Pelayanan Kesehatan ibu hamil pada masa pandemic covid 19 era New Normal	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pragaan)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	893	749	(2) Kurangnya informasi tentang pelayanan Ante Natal Care pada masa Pandemic Covid 19	(2) Memberikan edukasi / informasi tentang penyakit Covid 19 dengan baik dan benar sehingga masyarakat paham dan mau melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai protocol kesehatan yang wajib di taati.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (bluto)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	619	622	(3) Masih adanya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kehamilan pada fasilitas kesehatan di luar wilayah kabupaten sumenep dan tidak ada laporan	3) Koordinasi dengan semua penanggung jawab Kesehatan Keluarga di semua Kabupaten agar memberikan informasi terkait layanan kesehatan pada ibu hamil	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kalianget)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	538	385	(4) Jaringan puskesmas dan fasyankes swasta masih belum melaporkan semua kegiatan ke puskesmas	(4) Koordinasi dengan organisasi IBI untuk menginstruksikan kepada semua jaringan agar setiap bulan melaporkan kegiatan layanan ibu hamil di wilayah puskesmasnya.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Talango)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	504	353	(5) Adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri.	5) Pengajuan Permintaan APD dan pengadaan APD yang bersumber dari APBD melalui Bidang Sumber daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Batuan)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	166	150	(6) Sosial Budaya / adat istiadat	(6) Koordinasi dengan Lintas sector di semua kecamatan untuk membantu mendukung masyarakat untuk tetap tinggal Dirumah (Stay At Home)	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pandian)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	438	457	(7) Akses pelayanan dan keadaan geografis	(7) Masih adanya wilayah dari Kepulauan ke kepulauan yang jauh dari jangkauan masyarakat dan geografis.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Rubaru)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	500	482			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Legung)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	245	240			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dasuk)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	403	403			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Manding)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	383	331			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Moncek)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	301	315			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Lenteng)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	478	439			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Batang-Batang)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	467	469			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Saronggi)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	470	434			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pamolokan)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	533	538			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Dungkek)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	495	440			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Ambunten)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	517	541			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Pasongsongan)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	593	550			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Batuputih)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	583	559			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Gapura)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	504	413			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Guluk-Guluk)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	697	695			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Ganding)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	489	452			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Raas)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	501	415			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Giligenting)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	364	338			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Nonggunong)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	181	189			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Gayam)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	443	403			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Arjasa)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	818	816			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Kangayan)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	282	179			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Sapeken)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	591	512			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Masalembu)	Jumlah kunjungan ibu hamil K-4 yang dilayani	ibu hamil	298	310			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dinas Kesehatan)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang dilaksanakan	ibu bersalin	13644	13208	(1) Pandemi COVID-19	(1) Pelayanan Kesehatan ibu bersalin pada masa pandemic covid 19 era New Normal	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Pragaan	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	853	529	(2) Masih adanya dukun bayi yang tidak terlatih (Turun temurun)	(2) Meningkatkan kemitraan bidan dan dukun	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Bluto)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	591	699	(3) Masih adanya anggapan bahwa bersalin ke bidan adalah orang yang gawut dan beresiko	(3) Kampanye persalinan di fasilitas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Kalianget)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	514	577	(4) Kurangnya tenaga bidan di desa karena mutasi ke kota	(4) Koordinasi dengan lintas sector kader kesehatan,perangkat desa, babinsa dan lainnya	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Batuan)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	158	152	(5) Masih banyak desa yang kosong tdk ada bidan desanya sehingga masih banyak yang bersalin ke dukun tanpa pantauan bidan desa	(5) Penguatan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Pandian)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	418	469		(6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Rubaru)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	477	499			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Legung)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	234	265			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Manding)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	365	319			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Moncek)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	287	290			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Lenteng)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	456	485			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Batang-Batang)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	446	392			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Saronggi)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	449	549			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Dungkek)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	473	422			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Ambunten)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	494	604			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Pasongsongan)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	566	510			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Batuputih)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	556	563			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Gapura)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	481	509			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Guluk-Guluk)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	665	692			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Giligenting)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	347	337			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Nonggunong)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	173	11			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Gayam)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	423	428			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Arjasa)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	782	784			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (KAngayan)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	269	179			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Masalembu)	Jumlah ibu hamil yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan	ibu bersalin	284	296			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dinas Kesehatan)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	12994	12485	(1) Pandemi COVID-19	(1) Pelayanan Kesehatan ibu bersalin pada masa pandemic covid 19 era New Normal	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Pragaan)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	812	686	(2) Mobilitas bayi yang pulang bersama ibunya di Kabupaten Sumenep tinggi karena di pengaruhi oleh masa Pandemi Covid 19	(2) engaktifkan kembali posyandu yang zona hijau dan zona orang dengan penjadwalan dan durasi / waktu serta wajib menggunakan protocol kesehatan baik bagi orang tua, balita atau keluarga serta kader kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kalianget)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	489	391	(3) Pada awal masa pendemi covid 19 ibu masih takut bayinya di periksa oleh tenaga kesehatan karena menggunakan APD lengkap	(3) Jadwal buka hari posyandu di tambah krn jam pelayanan posyandu tdk boleh terlalu lama untuk mengkafer agar bayi bias datang ke posyandu dengan sehat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Rubaru)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	454	478		(4) Memberitahukan kepada masyarakat tentang hari buka posyandu pada H-1, H dan H+1	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Legung)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	223	221		(5) Adanya Kelas Ibu nifas di Kabupaten Sumenep	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dasuk)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	367	337			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Saronggi)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	427	511			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dungkek)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	450	337			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Batuputih)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	530	534			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Gapura)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	458	474			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (guluk-guluk)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	633	627			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Giligenting)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	331	311			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Nonggunong)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	164	182			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Gayam)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	403	372			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Arjasa)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	744	714			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Kangayan)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	256	235			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Masalembu)	Jumlah kunjungan bayi baru yang dilayani	bayi	271	275			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Dinas Kesehatan)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	53593	54919			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Bluto)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	2321	2804			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Rubaru)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	1874	1621			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Legung)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	920	970			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Lenteng)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	1791	1788			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Saronggi)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	1763	1769			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Pasongsongan)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	2222	2616			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Batuputih)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	2184	2402			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Gapura)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	1891	1850			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Ganding)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	1834	1792			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Nonggunong)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	678	689			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Masalembu)	Jumlah kunjungan balita yang dilayani	balita	1115	1231			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dinas Kesehatan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	68287	63845	Masa pandemi COVID-19, sekolah dilakukan dengan Pembelajaran Jarak Jauh.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Prajaan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	4343	3495			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Bluto)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2924	3966			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kalianget)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2942	3171			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Talango)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1898	3076			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Batuan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1012	687			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Pandian)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2582	2582			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Rubaru)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2240	787			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Legung)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	943	962			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dasuk)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1579	2174			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Manding)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1637	2907			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Moncek)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1085	1476			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Lenteng)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2554	2180			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Batang-Batang)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2241	1394			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Saronggi)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2268	2268			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Pamolokan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2603	3349			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Dungkek)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1805	2103			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Ambunten)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2384	2005			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Pasongsongan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	3065	6691			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Batuputih)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2057	1663			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Gapura)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2112	2024			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (guluk-guluk)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	3129	3969			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Ganding)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1993	1363			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Raas)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	2775	1045			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Giligenting)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1872	2244			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Nonggunong)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	640	631			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Gayam)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1406	533			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Arjasa)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	4379	1042			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kangayan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1718	1540			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Masalembu)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang dilaksanakan	anak sekolah	1758	2095			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Dinas Kesehatan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilaksanakan	orang	752.542	648.713	(1) Kurang maksimalnya pelaksanaan deteksi dini PTM pada usia produktif	Mengadakan kegiatan posbindu PTM di instansi atau tempat kerja	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Gapura)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilaksanakan	orang	32017	29599	(2) pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Ganding)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif yang dilaksanakan	orang	3119000%	2768000%	(3) usia produktif mendapatkan pelayanan dil luar wilayah kerja kab/kota		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Pragaan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	9.395	5.801	(1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan usia lanjut	Mengadakan kegiatan posyandu lansia di setiap desa	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Bluto)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	6.941	6.940	(2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Kalianget)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	5600	5489	(3) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Batuan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	216000%	165900%	(4) Adanya usia lanjut yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/kota		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Rubaru)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	6057	5697	(5) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Legung)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	9394	9081	(6) Ketersediaan sumber daya terbatas		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dasuk)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	545600%	545700%	(7) Adanya kematian/mortalitas usia lanjut		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Manding)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	471400%	406300%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Moncek)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	6279	5651			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Lenteng)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	3115	2361			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Batang- Batang)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	9394	9081			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Saronggi)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	6515	4343			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Pamolokan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	463400%	115800%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Dungkek)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	743500%	737500%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Ambunten)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	7118	6265			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Pasongsongan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	604300%	502100%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Batu Putih)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	808200%	688300%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Gapura)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	695900%	552800%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Ganding)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	6659	4155			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Raas)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	4563	1593			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Giligenting)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	4867	3429			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Nonggunong)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	3511	2930			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Gayam)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	7845	4648			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Arjasa)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	7576	9805			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Kangayan)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	2323	2152			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Sapeken)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	3968	2732			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Masalembu)	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang dilaksanakan	orang	3175	3563			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dinas Kesehatan)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	302.714	214.949	(1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan hipertensi	Mengadakan kegiatan posbindu PTM di instansi atau tempat kerja	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Pragaan)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	18537	15532	(2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Bluto)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	12695	9862	(3) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Batuani)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	3608	2311	(4) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Legung)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	16761	10886			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Dasuk)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	9664	6804			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Manding)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	9798	6510			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Lenteng)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	18140	11533			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Saronggi)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	10240	8308			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Pamolokan)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	21509	19067			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Ambunten)	Jumlah penduudk hipertensi yang dilayani	orang	11083	8326			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Batu Putih)	Jumlah penduduk hipertensi yang dilayani	orang	12373	8175			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Giligenting)	Jumlah penduduk hipertensi yang dilayani	orang	7772	4949			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Gayam)	Jumlah penduduk hipertensi yang dilayani	orang	11253	6730			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (Sapeken)	Jumlah penduduk hipertensi yang dilayani	orang	6595	4018			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Dinas Kesehatan)	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang dilayani	orang	11.997	9.910	(1) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas	Mengadakan kegiatan posbindu PTM di instansi atau tempat kerja	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (Legung)	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang dilayani	orang	664	538	(2) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dinas Kesehatan)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa	orang	1804	1450	Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Pengobatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas di Tempat Layanan Kesehatan (Puskesmas).	Penyuluhan tentang Kesehatan Jiwa dan Pelayanan Kesehatan Jiwa Gratis di sosialisasikan ke masyarakat sampai ke pelosok pelosok desa untuk meningkatkan Pengetahuan masyarakat	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dinas Kesehatan)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	4.204	4.522			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Pragaan)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	229	144			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Bluto)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	199	315			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Kalianget)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	120	25			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Batuan)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	88	85			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Pandian)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	136	120			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Rubaru)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	164	172			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Legung)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	102	41			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dasuk)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	101	204			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Manding)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	78	88			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Moncek)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	48	33			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Lenteng)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	196	259			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Batang- Batang)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	191	56			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Saronggi)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	13400%	7300%			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Pamolokan)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	136	75			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Dungkek)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	116	93			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Ambunten)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	196	112			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Pasongsongan)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	249	94			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Batu Putih)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	63	1			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Gapura)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	149	145			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Guluk-guluk)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	181	139			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Ganding)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	103	43			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Raas)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	96	59			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Giligenting)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	121	80			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Nonggunong)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	71	23			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Gayam)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	82	77			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Arjasa)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	332	629			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Kangayan)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	126	126			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Masalembu)	Jumlah orang terduga TB yang dilayani	orang	35	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dinas Kesehatan)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	18.892	15.551	(1) Kurangnya Informasi mengenai pelayanan kesehatan HIV	1. Perlunya menjalin kerjasama dengan diskominfo sebagai wahana diseminasi informasi dan edukasi dalam pencegahan dan pengendalian hiv aids	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Pragaan)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	1120	1041	(2) Sulitnya Akses ke fasilitas pelayanan kesehatan	2. Harus ada peningkatan kerjasama antar bidang di dinas kesehatan (khususnya seksi p2pm, seksi kpm, seksi promosi dan bidang yankes) agar kegiatan promosi serta edukasi khususnya ttg hiv aids lebih terpadu dan mencapai tujuan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Kalianget)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	orang	749	760	(3) Pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan jejaring puskesmas (seperti fasyankes swasta dll) ke puskesmas, dan dari puskesmas tidak dilaporkan ke aplikasi SIHA Online.	3. Perlu digali peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan hiv aids (mendorong terbentuknya wahana semacam paguyuban peduli hiv aids danlain sebagainya)	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Talango)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	588	551	(4) Adanya sasaran yang mendapatkan pelayanan di luar wilayah kerja kabupaten/ kota		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Batuan)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	212	143	(5) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh faktor sosial budaya		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Pandian)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	580	379	(6) Ketersediaan sumber daya terbatas		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Rubaru)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	662	575			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Legung)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	659	413			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Manding)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	472	355			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Moncek)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	690	436			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Lenteng)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	690	436			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Saronggi)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	633	800			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Pamolokan)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	660	957			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Dungkek)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	664	453			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Ambunten)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	702	702			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Pasongsongan)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	800	830			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Batu Putih)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	778	545			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Gapura)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	689	502			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Guluk-guluk)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	887	443			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Ganding)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	594	527			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Raas)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	619	497			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Giligenting)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	484	199			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Nonggunong)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	230	166			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Gayam)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	506	215			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Arjasa)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	1118	1220			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Kangayan)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	352	299			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Masalembu)	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani	orang	366	156			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Pragaan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Bluto)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Kalianget)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Talango)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Batuan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Pandian)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Rubaru)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Legung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dasuk)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Manding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Moncek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Lenteng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Batang-Batang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Saronggi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Pamolokan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Dungkek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Ambunten)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Pasongsongan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Batu Putih)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Gapura)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Guluk-guluk)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Ganding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Raas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Giligenting)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Nonggunong)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Gayam)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Arjasa)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Kangayan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Sapeken)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Masalembu)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Dinas Kesehatan)	Persentase penanganan COVID-19	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pragaan)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bluto)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Kalianget)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Talango)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Batuan)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pandian)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Rubaru)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Legung)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dasuk)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Manding)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Moncek)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Lenteng)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Batang-Batang)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Saronggi)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pamolokan)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dungkek)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Ambunten)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pasongsongan)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Batu Putih)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Gapura)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Guluk-guluk)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Ganding)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Raas)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Giligenting)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Nonggunong)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Gayam)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Arjasa)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Kangayan)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Sapeken)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Masalembu)	Persentase penanganan gizi buruk	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dinas Kesehatan)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Pragaan)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Bluto)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Kalianget)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Talango)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Batuan)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Pandian)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Legung)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dasuk)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Manding)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Moncek)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Lenteng)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Batang-Batang)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Saronggi)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dungkek)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Ambunten)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Pasonqonqan)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Batu Putih)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Gapura)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Guluk-guluk)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Raas)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Giligenting)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Nonggunong)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Arjasa)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Masalembu)	persentase pekerja formal dan informal yang mendapat konseling	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	Jumlah desa ODF	desa	267	229			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pragaan)	Jumlah desa ODF	desa	14	14			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Bluto)	Jumlah desa ODF	desa	20	20			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kalianget)	Jumlah desa ODF	desa	5	5			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Talango)	Jumlah desa ODF	desa	7	7			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Batuan)	Jumlah desa ODF	desa	6	6			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pandian)	Jumlah desa ODF	desa	7	7			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Rubaru)	Jumlah desa ODF	desa	7	7			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Legung)	Jumlah desa ODF	desa	2	2			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dasuk)	Jumlah desa ODF	desa	15	15			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Manding)	Jumlah desa ODF	desa	7	7			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Moncek)	Jumlah desa ODF	desa	9	9			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Lenteng)	Jumlah desa ODF	desa	10	10			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Batang- Batang)	Jumlah desa ODF	desa	6	6			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Saronggi)	Jumlah desa ODF	desa	14	14			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pamolokan)	Jumlah desa ODF	desa	9	9			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dungkek)	Jumlah desa ODF	desa	10	10			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Ambunten)	Jumlah desa ODF	desa	9	9			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pasongsongan)	Jumlah desa ODF	desa	10	10			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Batu Putih)	Jumlah desa ODF	desa	14	14			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Gapura)	Jumlah desa ODF	desa	17	17			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Guluk-guluk)	Jumlah desa ODF	desa	8	8			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Ganding)	Jumlah desa ODF	desa	13	13			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Raas)	Jumlah desa ODF	desa	3	3			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Giligenting)	Jumlah desa ODF	desa	6	6			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Nonggunong)	Jumlah desa ODF	desa	1	1			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Gayam)	Jumlah desa ODF	desa	4	4			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Arjasa)	Jumlah desa ODF	desa	10	10			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Kangayan)	Jumlah desa ODF	desa	1	0	Masyarakat masih banyak BAB di pantai dan hutan, Kesadaran masyarakat tentang PHBS masih kurang, saat dilakukan pemucuan yaitu alasan biaya pembuatan jamban (ekonomi)	Advokasi terhadap kepala desa, agar menganggarkan dana desa di sektor pemberdayaan masyarakat dan pengadaan jamban	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Masalembu)	Jumlah desa ODF	desa	1	1			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Bluto)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Kaliangget)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Batuan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Rubaru)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Legung)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dasuk)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Moncek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Lenteng)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Batang- Batang)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Saronggi)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Pamolokan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dungkek)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Ambuntan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Pasongsongan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Gapura)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Guluk-guluk)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Ganding)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Raas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Giligenting)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Gayam)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Arjasa)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Kangayan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Masalembu)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	12	12			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah sarana obat tradisional yang di bina untuk memenuhi standar	sarana	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Pragaan)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Bluto)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Kalianget)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Talango)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Batuan)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Pandian)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Rubaru)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Legung)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dasuk)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Manding)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Moncek)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Lenteng)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Batang- Batang)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Saronggi)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Pamolokan)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dungkek)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Ambunten)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Pasongsongan)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Batu Putih)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Gapura)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Guluk-guluk)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Raas)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Giligenting)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Nonggunong)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Gayam)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Arjasa)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Kangayan)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Masalembu)	Persentase desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Pragaan)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Bluto)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Kalianget)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Talango)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Batuan)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Pandian)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Legung)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dasuk)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Manding)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Lenteng)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Batang- Batang)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Saronggi)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Pamolokan)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Dungkek)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Ambunten)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Pasongsongan)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Batu Putih)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Gapura)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Guluk-guluk)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Ganding)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Raas)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Giligenting)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Nonggunong)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Gayam)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Arjasa)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Kangayan)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (Masalembu)	Persentase pelayanan kesehatan Jiwa dan NAPZA	%	100	100			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dinas Kesehatan)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	160	160			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pragaan)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	3	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Bluto)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	10	10			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Kalianget)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	7	7			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Talango)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	5	5			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Batuan)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pandian)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	26	26			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Rubaru)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	15	15			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Legung)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	1	1			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dasuk)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	10	10			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Manding)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	7	7			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Moncek)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	1	1			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Lenteng)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	5	5			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Batang- Batang)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	4	4			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Saronggi)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	15	15			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pamolokan)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	27	27			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dungkuk)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	3	3			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ambunten)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	8	8			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pasongsongan)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	1	1			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Batu Putih)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	2			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Gapura)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	6	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Guluk-guluk)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	3	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Ganding)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Raas)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Giligenting)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Nonggunong)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	1	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Gayam)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Arjasa)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	2			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Kangayan)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Masalembu)	Jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani	kasus	2	0	Tidak ditemukan kasus DBD	Upaya Pencegahan dan Pengendalian dilakukan secara maksimal	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Jumlah kepesertaan PBID JKN-BPJS	orang	130.000	125.731			
				Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat (Dinas Kesehatan)	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan forum Sumenep Sehat tingkat kecamatan	kecamatan	27	27			
				Operasional Pelayanan (Dinas Kesehatan)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	30	30			
				Operasional Pelayanan (Pragaan)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Bluto)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Kalianget)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Talango)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Batuan)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Pandian)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Rubaru)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Legung)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Dasuk)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Manding)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Moncek)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Operasional Pelayanan (Lenteng)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Batang-Batang)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Saronggi)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Pamolokan)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Dungkek)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Ambuten)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Pasongsongan)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Batu Putih)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Gapura)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Guluk-guluk)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Ganding)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Raas)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Giligenting)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Nonggunong)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Gayam)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Arjasa)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Kangayan)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Sapeken)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan (Masalembu)	Jumlah puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	puskesmas	1	1			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah kegiatan yang dilakukan Labkesda untuk meningkatkan pelayanan	kegiatan	3	3			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Jumlah Puskesmas siap akreditasi	puskesmas	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90%	76%	1. Kekosongan vaksin pentabio dan IPV di awal tahun 2021	1. Melaksanakan validasi data dan cakupan di tingkat puskesmas untuk mendapatkan angka drop out bayi dan bduta	
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Pragaan)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	68	2. Isu hoaks yang mengganggu imunisasi rutin pada bayi dan baduta menggunakan vaksin covid19	2. Melakukan Akselerasi cakupan imunisasi melalui sweeeping dofu dan RCA	
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Bluto)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	78	3. Adanya pandemi covid19 yg mengharuskan PPKM (tdk boleh berkerumun) sehingga terjadinya penundaan pada pelaksanaan posyandu di desa2		
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Kalianget)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	832	4. Kesibukan nakes pada percepatan pelaksanaan vaksinasi covid19		
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Batuan)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	978			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Pandian)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	70			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Rubaru)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	99			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Legung)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	81			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dasuk)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	95			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Manding)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	76			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Moncek)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	84			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Lenteng)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	52			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Batang- Batang)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	23			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Saronggi)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	24			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Pamolokan)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	100			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Ambunten)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	50			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Pasongsongan)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	113			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Batu Putih)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	1121			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Gapura)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	42			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Ganding)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	104			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Raas)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	38			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Giligenting)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	37			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Nonggunong)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	67			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Gayam)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	47			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Kangayan)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	94			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Masalembu)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	90	63			
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dinas Kesehatan)	Persentase CJH yang dilakukan pemeriksaan, pemantauan, pemeliharaan, dan pembinaan status kesehatan	%	100	100			
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Dinas Kesehatan)							
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Tersusunnya profil kesehatan	kegiatan	1	1			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Tertindakannya penggunaan program sistem informasi kesehatan di puskesmas	kegiatan	1	1			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinas Kesehatan)							
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dinas Kesehatan)	Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan perijinan RS	RS	4	4			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	/ 100.000 jumlah penduduk	11	11%			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Presentase pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perijinan tenaga kesehatan	%	100	100			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Persentase terselenggaranya pendistribusian dan pemerataan para SDM Kesehatan di setiap daerah	%	100	100			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Pragaan)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Bluto)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Kalianget)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Talango)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Batuan)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Pandian)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Rubaru)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Legung)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dasuk)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Manding)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Moncek)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Lenteng)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Batang- Batang)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Saronggi)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Pamolokan)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Dungkek)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Ambunten)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Pasongsongan)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Batu Putih)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Gapura)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Guluk-guluk)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Ganding)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Raas)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Giligenting)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Nonggunong)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Gayam)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Arjasa)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Kangayan)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Sapeken)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (Masalembu)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan	dokumen	1	1			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan	%	100	100			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	80%	89%			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Jumlah apotik dan toko obat yang dibina	apotik	47	42			
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dinas Kesehatan)	Jumlah PIRT dilakukan pengawasan	P-IRT	60	95			
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dinas Kesehatan)	Jumlah TPM yang dilakukan Pengawasan	TPM	1987	1987			
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dinas Kesehatan)	Persentase pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	%	100	100			
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (Dinas Kesehatan)	Persentase Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	%	100	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/ Kelurahan Siaga Aktif	%	100%	100%			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	Jumlah Poskestren yang didampingi	poskestren	10	10			
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dinas Kesehatan)	Jumlah promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS, CEGAH STUNTING, PHBS, DESA SIAGA AKTIF, POSYANDU BALITA DAN LANSIA)	program	7	7			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dinas Kesehatan)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pragaan)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Bluto)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Kalianget)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Talango)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Batuan)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pandian)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Rubaru)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Legung)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dasuk)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Manding)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Moncek)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Lenteng)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Batang-Batang)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pamolokan)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dungkek)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Ambunten)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pasongsongan)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Batu Putih)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Gapura)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Guluk-guluk)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Giligenting)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Nonggunong)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Gayam)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Arjasa)	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM	kegiatan	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	%	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Renstra dan renja yang disusun	dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	dokumen	2	2			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah dokumen DPPA yang disusun	dokumen	2	2			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja yang disusun	laporan	3	3			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kesehatan)	Jumlah ASN di Dinas Kesehatan yang terlayani administrasi keuangannya	orang	1367	1338			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	3	3			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	laporan	12	12			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kesehatan)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	unit	50	50			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor	paket	2	2			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Kesehatan)	Jumlah item alat tulis kantor yang disediakan	item	35	35			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Kesehatan)	Jumlah item Cetak dan Penggandaan yang diadakan	item	5	5			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Kesehatan)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	bahan bacaan	19	19			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	Jumlah waktu layanan sarana komunikasi dan listrik di Dinas Kesehatan dan seluruh UPT	bulan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kesehatan)	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dilakukan pemeliharaan	unit	15	15			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah waktu layanan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	paket	2	2			
3		RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. BOR	%	79	38,23			
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2. TOI	Hari	1,12	6,65			
				Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Sumber dana DAK)	3. ALOS	Hari	4,7	4,14			
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4. CRR	%	1,19	1,43			
				Sub Kegiatan : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Sumber dana DBHCHT)							
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (Sumber dana PAJAK ROKOK)							
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Sumber dana DAU+DID)							
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. BOR	%	79	38,23			Telah ditindaklanjuti dengan Penambahan
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2. TOI	Hari	1,12	6,65			pengadaan tenaga medis dan para medis
				Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (sumber dana BOK)	3. ALOS	Hari	4,7	4,14			sebagian dipenuhi oleh CPNS sebanyak 32 Orang dan PPPK sebanyak 17 Orang untuk tahun 2021.
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4. CRR	%	1,19	1,43			Untuk selanjutnya menunggu formasi CPNS dan PPPK periode berikutnya
				Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD							
				Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	bulan	12	12			
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU. Bina Marga		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun di Kabupaten Sumenep	km	13	12,924	dikarenakan disesuaikan dengan nilai kontrak yang disepakati dengan pelaksana, sehingga sisa tersebut merupakan sisa mati	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	1. Dinas PU Bina Marga mengapresiasi positif atas rekomendasi DPRD dan tindaklanjutnya adalah dengan melaksanakan survey berkala dan dilanjutkan dengan Kegiatan Survey Teknis (Perencanaan Teknis) pada H-1 untuk Ruas-Ruas Jalan yang dipandang prioritas untuk ditingkatkan atau dipelihara baik di daratan maupun di kepulauan. Sehingga dapat diketahui lebih awal kebutuhan anggaran dan lokasi yang diperlu diprioritaskan pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun berikutnya Pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan dapat dilaksanakan lebih awal karena Perencanaan Teknisnya sudah tuntas. Sehingga hasil pekerjaan akan selesai sebelum akhir tahun anggaran. 2 Usulan penambahan anggaran kami sikapi dengan mencari alternatif selain Dana APBD, Kegiatan pembangunan infrastruktur kami usulkan untuk didanai pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pajak Rokok.
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen yang tersusun	dok	2	1			
				Pembangunan Jalan	Jalan yang ditingkatkan	m	12000	5635			
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Jalan dengan tingkat kerusakan sedang yang dipelihara	m	9000	5989			
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan dengan tingkat kerusakan ringan yang dipelihara	m	5000	1300			
				Pembangunan Jembatan	Jembatan yang dibangun/ditingkatkan	bh	4	3,5872435			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan dengan tingkat kerusakan ringan yang dipelihara	bh	10	9,994132			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		%	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kerja	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang tersusun	dok	1	1			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen yang tersusun	dok	10	9	Dikarenakan standar harga tiap barang yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga dan nilai sebenarnya	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen yang tersusun	lap	1	1			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKB	lap	1	1			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Aset	lap	1	1			
				Administrasi Pendapatan Daerah Keunggulan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	lap	1	1			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana	lap	1	1			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	lap	1	1			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	12	12	Penganggaran Nilai Belanja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terlalu tinggi dibanding kebutuhan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis	17	17			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik kantor yang diadakan	Jenis	28	28	Penganggaran Nilai Belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor terlalu tinggi dibanding kebutuhan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	Jenis	10	10	Dikarenakan standar harga tiap barang yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga dan nilai sebenarnya	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang diadakan	Jenis	11	11	Penganggaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terlalu tinggi dibanding kebutuhan dilapangan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	kali	299	299	Penganggaran Nilai Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi terlalu tinggi dibanding kebutuhan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	lap	1	1			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan komputer yang dilaksanakan	unit	6	5	Penganggaran Nilai Belanja Pengadaan Peralatan dan mesin lebih tinggi dibanding kebutuhan untuk pengadaan peralatan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	buah	1200	1200	dikarenakan standar harga tiap barang yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga dan nilai sebenarnya di lapangan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	layanan	6	6	dikarenakan standar harga tiap barang yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan harga dan nilai sebenarnya di lapangan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg disediakan	layanan	4	4	Penganggaran Nilai Belanja Pemeliharaan Peralatan terlalu tinggi dibanding kebutuhan yang terjadi di lapangan	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	m2	2255	2217			
5		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Fasilitas Air Bersih	%	100	90,17			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Rumah	300	1666			
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Infrastruktur SPAM yang terbangun	Unit	30	25	Tidak bisa dikerjakan karena BNBA tidak ada	Jika lokasi tersebut membutuhkan pembangunan SPAM, maka ketika mengusulkan kembali agar dilengkapi titik koordinat lokasi dan BNBA	
				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Infrastruktur SPAM yang terbangun (DAK)	Unit	15	15			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah penduduk yang terlayani Pengelolaan Persampahan di Perdesaan	Jiwa	71.855	71.855			
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan luas kawasan kumuh	%	0	0			
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Infrastruktur TPS-3R yang terbangun	Unit	10	12			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal yang Bersanitasi	%	100	90,84			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang bersanitasi	Rumah	20	1569			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah pelayanan IPLT yang dilaksanakan	Kali	10	0	Tidak ada pelayanan, dan anggaran yang ada untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di IPLT	Dilaksanakan pelayanan IPLT pada tahun selanjutnya	
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah infrastruktur sanitasi yang terbangun	Unit	50	52			
				Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah infrastruktur sanitasi yang terbangun (DAK)	Unit	1508	1508			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase genangan/banjir pada wilayah permukiman/perdesaan	%	0	35			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berkurangnya Jumlah titik genangan air	%	0	35			
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang terbangun	M1	500	555,76			
					Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang terbangun (Pajak Rokok)	M1	245	102			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong yang dipelihara	Meter	2000	1788	Banyak saluran drainase/gorong-gorong yang rusak parah sehingga penggunaan bahan bangunan membengkak	Mengurangi panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara agar lebih berfokus memelihara yang rusak berat	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase terlaksananya kegiatan pembangunan gedung yang representatif	%	80	100			
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi	%	80	100			
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	Dokumen	100	520			
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang laik	Unit	13	13			
				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi yang ditetapkan	Regulasi	1	1			
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah IUJKN yang diterbitkan	Ijin	200	5			
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Ijin	200	5			
				Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Penyedia Jasa Konstruksi yang berkompeten dan representatif	Penyedia Jasa	200	5			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTRW	Dokumen	1	1			
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi tentang Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	Regulasi	1	1			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang diterbitkan	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi tentang Rencana Tata ruang yang ditetapkan	Regulasi	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan yang ditetapkan	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan Tata Ruang Kabupaten	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah regulasi tentang Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	Regulasi	1	1			
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Luas tanah yang dibebaskan	Ha	10	3			
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tersusun	Dokumen	1	3			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Dokumen Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang tersusun	Dokumen	1	3			
6		Dinas PU. Sumber Daya Air		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							Dinas PU Sumber Daya Air mengapresiasi positif atas rekomendasi DPRD dan tindaklanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas Pematusan untuk menjaga kondisi saluran pembuang dan mengoptimalkan operasional pemeliharaan sungai, serta berencana membangun saluran pembuang dari pusat banjir di daerah jalan dr Cipto (Rumdis Wabup).
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	100	100			
				Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas tanah untuk rencana pembangunan embung/waduk	METER	100470 m2	7329 m2	dari 2 lokasi kegiatan pengadaan tanah yang direncanakan hanya terealisasi 1 lokasi saja.	Sisa Pagu dikembalikan ke kas daerah	
				Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan fungsi embung yang telah terbangun	LOKASI	2	2			
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya pembangunan sarana pengendalian banjir dan erosi sungai	METER	350 m	373,65 m			
				Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya pelaksanaan pemeliharaan kinerja sungai dan saluran pembuang utama untuk supporting penanggulangan banjir	METER	24886,450 6128019 m	170131,2 m			
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya normalisasi sungai dan saluran pembuang utama untuk meminimalisir terjadinya banjir	METER	2770 m	8277,51 m	dikarenakan disesuaikan dengan nilai kontrak yang disepakati dengan pelaksana, sehingga sisa tersebut merupakan sisa mati	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	
				Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terlaksananya pembangunan sarana pengendalian abrasi pantai	METER	723,76766 8230425 m	921,74 m	dikarenakan disesuaikan dengan nilai kontrak yang disepakati dengan pelaksana, sehingga sisa tersebut merupakan sisa mati	Sisa pagu dikembalikan ke kas daerah dan pada tahun berikutnya dilakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke kegiatan lain	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan bangunan pengaman pantai yang telah terbangun	METER	14 m	14 m			
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Pemeliharaan	METER	21 m	21 m			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan dan air tanah	Panjang jaringan yang dinormalisasi	METER	47.013 m	47.013 m			
					Panjang jaringan yang direhabilitasi	METER	701 m	701 m			
				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah dam yang dinormalisasi	DAM	19	19			
				Rehabilitasi Jaringan Air Permukaan	Jumlah bendung yang direhabilitasi	BENDUNG	2	2			
					Panjang saluran yang direhabilitasi	METER	1.612 m	1.612 m			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Pengadaan bor	UNIT	2	2			
					Jumlah pembangunan rumah pompa	RUMAH POMPA	2	2			
					Pengadaan mesin pompa	UNIT	2	2			
				Operasional Unit Pengelolaan Irigasi	Jumlah tenaga pengelola unit irigasi	ORANG	15	15			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	BULAN	12	12			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah iklan dan surat kabar	MEDIA	9	9			
					jumlah bulan rapat-rapat dan koordinasi	BULAN	12	12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bahan kebutuhan perkantoran	JENIS	47	47			
					jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BULAN	12	12			
					Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	UNIT	60	60			
					jumlah tenaga outsourcing	ORANG	23	23			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	jumlah kendaraan dinas yang	UNIT	50	50			
7	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau	%	42	26	-	-	Telah dilakukan Rehabilitasi Saluran Drainase Kawasan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep, Pembangunan Saluran
				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur pendukung RTH yang terbangun/terpelihara	Lokasi	3	3	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Luas Ruang terbuka hijau yang tersedia	M2	4321	3958	Tidak ada pembukaan lahan baru, dan anggaran yang terbatas dioptimalkan pada pemeliharaan RTH yang sudah ada.	Pertunya pembukaan lahan baru yang diperuntukkan sebagai RTH	Dranase Jl. Jati Emas, Pembangunan Saluran Pipa Pembuang Kolam Detensi ASABRI, beberapa lokasi di Ibu Kota Kecamatan, dan beberapa lokasi usulan POKIR, dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga penanganan banjir di Kabupaten Sumenep diharapkan memperoleh hasil yang optimal.
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	%	100	90,1			
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Dokumen Site Plan Perumahan yang disahkan	%	80	100			
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Site Plan Perumahan yang disahkan	Dokumen	2	2			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Luas Permukiman Kumuh	%	0	0			
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah yang mendapat bantuan	Rumah	250	1523			
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun	Meter	2000	2144			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan kinerja yang disusun	%	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	11	11			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	Dokumen	3	3			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang tersusun	Dokumen	8	8			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang	70	70			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	3	3			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang melakukan diklat	Orang	100	2	-	-	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang melakukan diklat	Orang	100	2	Peserta diklat Pertanahan 2 orang dengan biaya menghabiskan sebagian besar anggaran yang disediakan	Tahun selanjutnya lebih menyesuaikan besaran anggaran dan jumlah ASN yang akan mengikuti diklat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	Item	15	15			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item ATK yang disediakan	Item	40	15	Jumlah item ATK yang diperlukan dan dimanfaatkan sebanyak 15 item. Jumlah Pekerja Harian Lepas 5 orang karena 2 orang PHL lolos CPNS.	Tahun selanjutnya lebih menyesuaikan jumlah item ATK yang akan diperlukan, dan menambah Pekerja Harian Lepas jika diberikan izin.	
					Jumlah Pekerja Harian Lepas yang tersedia	Orang	7	5			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item yang disediakan	Item	13	13			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Eksemplar	100	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi keluar daerah yang dilakukan	Kali	50	60			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah meter lari arsip yang dikelola	Meter	40	40			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan gedung kantor dan meubeler yang disediakan	Unit	110	11			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang disediakan	Unit	10	6	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai dengan Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 556/1969/435.108.3/2021	Tahun selanjutnya lebih menyesuaikan besaran anggaran dan jumlah unit mebeleur yang disediakan	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Unit	100	5	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh Dinas	Tahun selanjutnya lebih menyesuaikan besaran anggaran dan jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang SKPD	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang disediakan	Orang	16	16			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	Kali	20	20			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan	Kali	20	3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya sesuai kebutuhan Dinas	Pemeliharaan/rehabilitasi berdasarkan besaran anggaran	
8	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana Kabupaten	Poin	204	160.35			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Perlindungan Masyarakat			- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang disediakan	Jenis	1	1							
				- Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah daerah rawan bencana yang dipantau	Loka si	25	25							
				- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsia gan terhadap bencana yang disediakan	Jenis	5	5							
				- Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Becana Kabupaten / Kota	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Org	300	300							
				- Sub Kegiatan Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan operasi SAR	Kali	46	46							
				- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	Desa	2	2							
				- Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah kejadian pascabencana yang ditangani	Kali	10	10							
				- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah anggota Tim SAR dan TRC	Org	30	30							
				- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan	Jenis	2	2							
				- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah respon cepat darurat bencana	Kali	30	30							
				- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah sosialisasi mekanisme penyaluran bantuan kepada masyarakat yang diselenggarakan	Kali	4	4							
				- Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah waktu pelaksanaan Posko Covid 19	Bulan	8	8							
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	%	100	81,25			
								- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	Jenis	3	3			
								- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	4	4			
								- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Dokumen	3	3			
				- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	10	10							
				- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan	Jenis	2	2							
				- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bln	12	12							
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /	Jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan yang disusun	Dokumen	8	8							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Jenis	1	0			
				- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek	Org	2	0	Adanya pandemi Covid-19	Menunda kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai guna mengurangi penyebaran Covid-19	
				- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dilaksanakan	Jenis	6	4			
				- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	4	0	Tidak dilaksanakan karena kondisi lampu dan komponen listrik sejenisnya dalam kondisi baik. Anggaran di kasda		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jenis	10	10			
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	6	6			
				- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 TA	Jenis	6	0	Masih ada sisa barang hasil pengadaan tahun lalu. Anggaran tidak diserap dan kembali kasda		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jenis	3	3			
				- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	160	149	Adanya pandemi Covid-19 sehingga ada pembatasan perjalanan dinas luar daerah	Berharap kondisi kembali normal	
				- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	Jenis	2	2			
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadmisistrasikan	Surat	1000	2099			
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan	Jenis	2	2			
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	20	20			
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	15	15			
9		Satuan Polisi Pamong Praja		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	%	90	90			
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kegiatan	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini ,Pembinaan dan penyuluhan,Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan Patroli Insidental yang dilaksanakan,Jumlah Kegiatan Pengamanan Unjuk Rasa yang pelaksanaan	Kali	156	156			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan penyuluhan terhadap Linmas Desa yang dilaksanakan	Kali	48	48			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	orang	33	33			
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota							
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Anggota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	orang	13	13			
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal yang dilaksanakan	Kali	48		Tidak dilaksanakan Karena adanya pandemi covid 19 serta keterbatasan personil		
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah kegiatan Penertiban Media Luar yang dilaksanakan , Jumlah Kegiatan Penertiban PKL yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan Penyidikan dan Penyelidikan yang dilaksanakan	Kali	48	48			
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan dan Karier PPNS	Orang	1	1			
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Jumlah Kejadian Kebakaran yang ditangani	Kali	72	72			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	90			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang disusun	Dokumen	5	5			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun (LKJIP, LKPJ dan LPPD)	Dokumen	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	Orang	75	75			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	4	4			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun tepat waktu	Laporan	6	6			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/peneranganbangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen listrik yang disediakan	Jenis	2	2			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	10	10			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Item/Jenis ATK yang disediakan,Mamain Rapat dan Harian yang disediakan,Jumlah Tenaga Kerja Non PNS yang disediakan	Jenis	5	5			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	Jumlah	2	2			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah ahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Jenis	3	3			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	Kali	30	30			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Meter lari yang dikelola	Unit	4	4			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	Jenis	2	2			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Printer yang diadakan, Jumlah Pengadaan Snanner yang diadakan	Unit	6	6			
					Jumlah Pengadaan HT, Adaptor dan Antenna	Unit	16	16			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlahn surat menyurat yang diadministrasikan	surat	1000	1000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Sub Kegiatan Peyediaan Jasa Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional /lapangan yang dipelihara dan berizin	Unit	27	27			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	unit	44	44			
10	Sosial	Dinas Sosial		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	%	65	65			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	%	100	100			
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapat rehabilitasi	%	100	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase meningkatnya akurasi ketepatan sasaran KPM	%	80	80			
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	beberapa calon penerima tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan	Meningkatkan proses verifikasi awal / perencanaan	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana	%	25	25	beberapa calon penerima tidak memenuhi atau melengkapi persyaratan	Meningkatkan proses verifikasi awal / perencanaan	
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan pemeliharaan TMP	%	100	100			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan	12	12			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah waktu pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	unit	1	1			

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3. 2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	%	20	20			
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Unit	7	7			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan</i>	<i>Jumlah infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya yang disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>7</i>	<i>7</i>			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>	<i>Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	Terdapat bantuan hibah uang yg tidak terlaksana karena bnba belum masuk di Perbup PAPBD 2021	Peningkatan kecermatan penyusunan data	
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	skor	71	71*)			
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten	Dokumen	1	1			
				<i>Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan</i>	<i>Jumlah data informasi harga pangan dan NBM yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG.	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita pertahun yang dicapai	Kkal/kap/ tahun	1820	2.542			
				<i>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah kelompok wanita yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan</i>	<i>Kelompok</i>	<i>7</i>	<i>7</i>			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	<i>Jumlah demplot pemanfaatan pangan lestari yang disediakan</i>	<i>Unit</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kec.	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yg disusun	Buah	1	1			
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah buku peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disediakan	Buah	20	20			
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan	%	85	90			
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pasar/kios pangan segar yang dimonitoring	lokasi	12	10	Terbatasnya waktu pelaksanaan monitoring	Perencanaan penjadwalan dan penunjukkan petugas monitoring	
				<i>Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah produsen pangan dan konsumen yang dibina</i>	<i>org</i>	<i>60</i>	<i>60</i>			
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi peternakan yang disediakan	Jenis	5	5			
				Kegiatan Pengendalian & Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan	Persentase peningkatan populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas.	%	0,64	1,57	Kegiatan Pengendalian & Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan	Persentase peningkatan populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas.	
				<i>Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak</i>	<i>jumlah jenis bibit ternak yang terdistribusi</i>	<i>jenis</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				<i>Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak</i>	<i>Jumlah pelayanan inseminasi buatan</i>	<i>akseptor</i>	<i>29.000</i>	<i>55.965</i>			
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian	Unit	2	2			
				Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah lokasi pengembangan lahan pengembalaan umum	lokasi	5	5			
				<i>Sub Kegiatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum</i>	<i>Jumlah bantuan sarana dan prasarana peternakan yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	25	10,67	Tingginya wabah penyakit ND pada unggas pada musim pancaroba	Antisipasi dan penyediaan obat-obatan	
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan	lokasi	21	21			
				<i>Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis</i>	<i>Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu</i>	<i>Ekor</i>	<i>500</i>	<i>511</i>			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit pada ternak yang keluar-masuk kabupaten	Ekor	200	0*)	Setiap ternak keluar / masuk Sumenep harus dlm kondisi sehat	Ternak keluar / masuk wilayah Sumenep wajib mempunyai SKKH	
				<i>Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan</i>	<i>jumlah pengawasaan lalu lintas ternak dan peredaran bahan asal hewan</i>	<i>lokasi</i>	6	6			
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Ekor	100	217.253			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>	<i>Jumlah hewan yang menerima pelayanan jasa medik veteriner</i>	<i>Ekor</i>	800	217.123			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	9	9			
				<i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>	2	2			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen RKA yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>	2	2			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen DPA yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>	2	2			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun</i>	<i>Laporan</i>	3	3			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	4	4			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan</i>	<i>Bulan</i>	12	12			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>	3	3			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jenis	7	7			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah item komponen listrik yang disediakan</i>	<i>jenis</i>	7	7			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	17	17			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	3	3			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	Jenis	10	10			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	6	6			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	100	100			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jenis	6	6			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis	6	6			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Bulan	12	12			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	Jenis	18	18			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jenis	6	6			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	3	3			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jenis	3	3			
2	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen informasi lingkungan hidup yang dipenuhi	%	40	40			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup yang disusun	dokumen	2	2			
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Disusun Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Air	%	79,2	79,2			
					Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Udara	%	88,9	88,9			
					Persentase Pemenuhan Standar Kualitas Lahan	%	81	81			
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	%	84,6	84,6			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	dokumen	38	38			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	dokumen	350	350			
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	72,8	72,8			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	dokumen	5	5			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sumenep	%	15	15			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Kehati yang masih lestari	lokasi	7	7			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Ha	4	4	Pekerjaan Vertikal Garden tidak dilaksanakan karena tidak ada rekomendasi dari BPPJN Jatim-Bali	Akan dianggarkan lagi di tahun mendatang	
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Ha	8	8			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Persetujuan Lingkungan	%	28,46	28,46			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Dilakukan Pengawasan	%	85,71	85,71			
				<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Laporan Dari Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>laporan</i>	<i>50</i>	<i>50</i>			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kader lingkungan yang berasal dari kesadaran mandiri	kader	15	15			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	%	95,48	95,48			
				<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH</i>	<i>lembaga</i>	<i>57</i>	<i>57</i>			
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup	%	69,17	69,17			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	72,55	72,55			
				Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	10	10			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase aduan yang terselesaikan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	100			
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota yang Ditindaklanjuti / Ditangani	dokumen	5	5			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan pengelolaan persampahan	%	55,5	55,5			
				Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan pelayanan persampahan	%	55,5	55,5			
				Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	ton	15	15			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten / Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	dokumen	5	5			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	2	2			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	115	108	Pensiun dan Mutasi		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	laporan	12	12			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan pendapatan yang disusun	laporan	1	1			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	dokumen	50	50			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	jenis	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	10			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	10			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	10			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	10	10			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	15	15			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	100			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	50	50			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang direncanakan	%	90	90			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	5			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan	%	90	90			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	36			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	%	90	90			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	5			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang direncanakan	%	90	90			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	36			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang direncanakan	%	90	90			
3	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kebudayaan pemuda dan Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10	10			
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor/Wirausaha Muda Pemula/Pemuda Kader yang dibina	Org	700	590	Dibatasi jumlah peserta dikarenakan adanya pandemi covid 19	Menunggu situasi kembali normal (tidak ada PPKM lagi)	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Terciptanya wira usaha pemula	Orang	1.000	590	Dibatasi jumlah peserta dikarenakan adanya pandemi covid 19	Menunggu situasi kembali normal (tidak ada PPKM lagi)	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten / kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	0	0			
				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terpenuhnya peningkatan kepemimpinan pemuda	Orang	100	75	Dibatasi jumlah peserta dikarenakan adanya pandemi covid 19	Menunggu situasi kembali normal (tidak ada PPKM lagi)	
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang	Organisasi	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	diberdayakan/ di Bina						
				<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	OKP	8	2	Dibatasinya jumlah organisasi kepemudaan dikarenakan adanya pandemi covid 19		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan prestasi olahraga	%	20	20			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah olahraga pendidikan yang dibina/ dikembangkan		1	1			
				<i>Koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha</i>							
				<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah altet olahraga yang dibina	Cabor dan KONI	22 cabor dan KONI	22 cabor			
				<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah event olahraga yang dilaksanakan	Cabor dan KONI	22 cabor dan KONI	9 Event	Dibatasinya jumlah peserta dikarenakan adanya pandemi covid 19	Menunggu situasi kembali normal (tidak ada PPKM lagi)	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang Olahraga prestasi yang dibina / dikembangkan	Cabor	10	10			
				<i>Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>	Jumlah cabor yang dibina	Cabor dan KONI	22 cabor dan KONI	23 cabor			
				Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Cabang olahraga rekreasi yang dibina/ dikembangkan		3	3			
				<i>Penyelenggaraan , pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	3	3			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Persentase	80%	80%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	Dok	4	4			
				<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	16	16			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	Lap	4	4			
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Bulan	12	12			
				<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja yang disusun	1	1	1			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan kepegawaian yang Disediakan	Jenis	1	1			
				<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	Orang	10	0	Tidak terlaksana dikarenakan tidak ada diklat selama tahun 2021		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Unit	5	5			
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	Bulan	12	12			
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Bahan Perkantoran yang disediakan	Bulan	12	12			
				<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah item komponen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	12	12			
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Terselenggaranya Rapat koordinasi konsultasi	Bulan	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	5	5			
				<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah item yang tersedia	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa yang Disediakan	Layanan	1	1			
				<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah item komponen yang disediakan	Bulan	12	12			
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	Bulan	12	12			
				<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah item komponen yang disediakan	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Bulan	12	12			
4	Kebudayaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan pemuda dan Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	35	35			
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian lokal yang dikembangkan	Jenis	3	3			
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dilestarikan	Obyek	250	265			
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah kelompok seni budaya yang terlibat dalam festival dan penampilan seni budaya	Kelompok	35	13	Dibatasinya penampilan yang mengundang kerumunan	Menunggu situasi kembali normal (tidak ada PPKM lagi)	
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	%	50	50			
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal	Jenis	5	5			
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah yang dilestarikan	Buah	7	8			
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	55	55			
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kali	8	8			
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Lokasi	3	3			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Permuseuman	%	55	55			
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang Dikelola di Kabupaten	Obyek	3	3			
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi kekayaan budaya	Kali	16	13	Menyesuaikan dengan kondisi PPKM	Akan kembali normal jika PPKM sudah di cabut	
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Terlaksananya peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum</i>	<i>Jumlah Cagar Budaya yang difasilitasi</i>	<i>Obyek</i>	6	3	<i>Karena kegiatan ini memfasilitasi 3 lokasi museum saja</i>	<i>Targetnya disesuaikan dengan jumlah lokasi museum yang ada</i>	
5	Administrasi dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen kependudukan sesuai SOP	Persentase	73	73			
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Kali	61.000	61.000			
				<i>Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah tenaga non ASN</i>	<i>orang</i>	401	386	<i>Adanya petugas pembantu REDES yang meninggal dan berhenti</i>		
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai SOP	Persentase	69	69			
				Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Keg	2	2			
				<i>Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</i>	<i>Jumlah item ATK yang disediakan</i>	<i>UPT</i>	7	7			
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase database kependudukan yang valid dan akurat	Persentase	75	75			
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian data kependudukan	Orang	75	75			
				<i>Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</i>	<i>Jumlah data kependudukan yang dikelola</i>	<i>Orang</i>	1.133.000	1.133.000			
				Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Nilai SKM	Persentase	75	86			
				<i>Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	<i>Jumlah responden yang disurvei</i>	<i>Orang</i>	60	60			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Surat	12	12			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	dok	20	20			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	dok	20	20			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah panitia pencapaian target nasional	orang	17	3	Adanya regulasi yang tidak membolehkan internal PD mendapatkan HR		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Rekening/tok n	100	100			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	orang	56	56			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	20	20			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	Macam	100	100			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	kali	12	8	Ada pandemic sehingga sosialisasi dibuat dalam bentuk daring	Berharap pandemic hilang	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang di sediakan	Macam	6	6			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang di sediakan	macam	6	6			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	jenis	15	11	Harga di lapangan memang dibawah SSH dengan mekanisme proses tender	Koordinasi dengan Bag. Pembangunan tentang Satuan Harga	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item ATK yang di sediakan	macam	26	26			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah item yang di sediakan	Dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang di sediakan	macam	6	6			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	204	114	SPPD luar daerah tidak terserap karena adanya PPKM		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Macam	100	71	Harga di lapangan memang dibawah SSH dengan mekanisme proses tender	Koordinasi dengan Bag. Pembangunan tentang Satuan Harga	
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	macam	13	9	Harga di lapangan memang dibawah SSH dengan mekanisme proses tender	Koordinasi dengan Bag. Pembangunan tentang Satuan Harga	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Macam	100	95			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	jenis	750	726	Bersifat penyediaan untuk pengiriman blanko KTP dari pusat dan pengiriman dokumen kependudukan		
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening/token	jenis	4	4			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat	jenis	180	180			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang di pelihara	macam	42	42			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	macam	10	10			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	11	10			
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Program Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa						
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Desa	Desa	8	17	Adanya Tambahan Pokok Pikiran DPRD	Diakomodir melalui Perubahan APBD	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Jumlah Balai Desa yang direhap	Balai	7	15	Adanya Tambahan Pokok Pikiran DPRD	Diakomodir melalui Perubahan APBD	
					Jumlah Tapal Batas yang di bangun	Tapal Batas	1	2			
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	% Desa yang menyelenggarakan Kerjasama Desa	%	6.06	6.06			
				Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	% Desa yang menyelenggarakan Kerjasama Desa	%	6.06	6.06			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kecamatan yang melakukan Musdes Bumdesma	Bumdesma	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi tentang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembangunan Desa	Desa	330	330			
				Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Administrasi Desa dengan baik	Desa	330	330			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	jumlah Regulasi tentang pemerintahan Desa	Produk Hukum	6	6			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	330	330			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang ikut Pilkades Serentak	Desa	86	86			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang ikut dalam Lomba Desa/Kelurahan	Desa/Kel	330	330			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah BUMDes yang Berkembang	Bumdes	3	88	Tingkat Kesadaran Desa dalam pengembangan /penyertaan modal BUMDes sudah bisa dirasakan manfaatnya	Adanya penguatan permodalan yang bersumber dari APBDes, APBD dan APBD Provinsi bagi kelembagaan BUMDes, sehingga banyak BUMDes yang mulai berkembang	
					Jumlah BUMDes yang Maju	Bumdes	2	9	BUMDes sudah bisa memberikan PAD bagi desa	Tingkat Kesadaran Pengelola BUMDes dalam mengembangkan BUMDes	
					Jumlah BUMDes yang terfasilitasi	Bumdes	5	5			
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	% Lembaga kemasyarakatan yang berperan aktif	%	100	19,63	Tidak Terpenuhinya target disebabkan Jumlah Lembaga yang di fasilitasi dan diintervensi dalam pemberdayaan Masyarakat masih terbatas,	Penguatan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Lembaga	3000	589	Jumlah Lembaga yang difasilitasi dan diintervensi dalam pemberdayaan Masyarakat masih terbatas, sehingga tidak terpenuhinya target yang diharapkan	Penguatan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Lembaga Adat	19	44	Adanya fasilitas terhadap Pembentukan Lembaga Adat Desa	Bertambahnya Lembaga Adat Desa	
					Jumlah Posyandu yang dibina	Pos yandu	10	10			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diidentifikasi	Lembaga	330	330			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Bantuan Alat TTG	Unit	2	2			
					Jumlah Rumah Miskin yang teraliri Listrik	Rumah	555	555			
					Jumlah Pemeliharaan PJU PLTS Perdesaan	Unit	6	6			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK Aktif	PKK Aktif	362	362			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan gotong royong masyarakat	Desa/ Kelurahan	334	334	Akibat Pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan di sesuaikan dengan protokol Kesehatan		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Kinerja ASN	Dokumen	2	2			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan	Bulan	12	12			
					Jangka Waktu Penyediaan BPJS bagi Perangkat Desa 12 Bulan	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu	Dokumen	2	2			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik yang dibeli	jenis	3	3			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan/Perlengkapan yang dibeli	Jenis	2	2			
					Jumlah Petugas Kebersihan dan Kemanan Kantor	Orang	7	7			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	Jenis	6	6			
					Jumlah Rapat Rutinitas yang dilaksanakan	Kali	6	6			
					Jumlah Tenaga Administrasi (FO) dan Tenaga IT 3 Orang	Orang	3	3			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis dan Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Jenis	3	3			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli	Jenis	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Koordinasi yang diikuti	Kali	30	21	Adanya pandemi sehingga pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi menyesuaikan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang Peralatan yang dibeli	jenis	6	6			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang di Adminstrasikan	Surat	4500	4500			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar tiap Bulan	Rekening	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	%	100	100			
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin</i>	<i>Unit</i>	<i>54</i>	<i>49</i>			
				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara</i>	<i>Jenis</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Luas gedung kantor yang terpelihara</i>	<i>M2</i>	<i>100</i>	<i>94</i>			
7	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pelayanan informasi publik						
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan informasi publik	persen	100	100			
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase monitoring dan aspirasi publik	persen	100	100			
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	persen	100	100			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Media Komunikasi Publik	persen	100	100			
				Layanan Hubungan Media	Persentase Layanan Hubungan Media	persen	100	100			
				Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Persentase Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	persen	100	47.43	Berkurangnya permintaan Informasi Publik secara terbuka ke Komisi Informasi	Permohonan Informasi Publik untuk masyarakat tetap digalakkan dalam keterbukaan informasi publik	
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	persen	100	100			
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah OPD yang sudah terhubung jaringan internet	Instansi	66	66			
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang sudah terhubung jaringan internet	Instansi	66	66			
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terhubung jaringan internet	Instansi	66	66			
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Instansi	66	66			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	persen	100	100					
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	100					
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	persen	100	100					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan jasa kantor	persen	100	68.10	Ketersediaan Jasa listrik, air dan telpon yang mengalami penurunan	Perencanaan tahun berikutnya dirasionalkan sesuai kebutuhan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan jasa kebersihan kantor	persen	100	100					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kebutuhan bahan perkantoran	persen	100	71.00	Berkurangnya kebutuhan logistic kator karena satu kegiatan tidak bisa dilaksanakan	Pembuatan Kontrak Kerjasama sebisanya dilaksanakn sebelum semester 3			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen listrik dan bangunan kantor	persen	100	100					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	persen	100	100					
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan Barang cetakan dan penggandaan kantor	persen	100	100					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase perdin dalam dan luar daerah	persen	100	68.12	Masa Pandemi Covid Perdin Luar daerah Berkurang	Mengurangi Aktifitas dalam pembatasan Perjalanan luar Kota karena PPKM			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	persen	100	100					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan umum kantor	persen	100	100					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pemeliharaan ,pajak,dan perijinan kendaraan dinas dan operasional	Persen	100	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan dan rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Persen	100	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Persen	100	59.76	Dari Target 2 orang yang lolos uji kompetensi cuman 1 orang	Kegiatan Diklat dan pendidikan disesuaikan kebutuhan ASN	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Persen	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Persen	100	100			
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada OPD	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Persentase Lembaga Pengarusutamaan Gender yang aktif	%	45	45			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta pelaksanaan pemantapan PUG	Orang	104	104			
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	%	100	100			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan	%	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Kasus	50	4	Kurangnya sosialisasi tentang penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan		
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga Pengarusutamaan Gender dan Anak yang aktif	%	100	100			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Lembaga Pengarusutamaan Gender dan Anak yang aktif	%	100	100			
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan yang memiliki Pos Curhat	Kecamatan	27	27			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota							
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak yang dibentuk	Tim	4	4			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengurus Forum Anak Sumenep	Orang	20	20			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan kapasitas ASN	%	100	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian program	%	85	85			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian program	%	85	85			
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Bulan</i>	12	12			
				<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor</i>	<i>Bulan</i>	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian program	%	85	85			
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan</i>	<i>Bulan</i>	12	12			
9	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Kesetaraan ber KB dan Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							
				<i>Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)</i>	<i>Jumlah Lembaga Pemerintah, Ormas dan Organisasi Profesi yang menjadi sasaran kegiatan</i>	<i>Lembaga</i>	10	10			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota							
				<i>Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>	<i>Jumlah Kecamatan yang menyusun profil KKBPK</i>	<i>Kecamatan</i>	27	25			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase cakupan peserta KB Aktif	%	67,07	70,52			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							
				<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>	<i>Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang difasilitasi</i>	<i>Balai Penyuluhan</i>	26	26			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang difasilitasi	Balai Penyuluhan	26	26			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)							
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	Orang	668	668			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Distribusi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Faskes	%	100	100			
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang teregester	Faskes	65	65			
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur yang terlayani	Orang	90	90			
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang dibeli	Paket	7	7			
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah motivator KB yang difasilitasi	Orang	90	90			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB							
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	Kampung KB	67	67			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase desa memiliki kelompok Tribina dan UPPKS aktif	%	50	50			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah partisipasi keluarga terhadap pembangunan keluarga	Keluarga	9.174	9.174			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah sarana kelompok kegiatan yang dibeli	Paket	20	20			
				Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah desa lokus stunting yang difasilitasi	Desa	10	10			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah layanan keluarga sejahtera yang dilaksanakan	Jenis Layanan	8	8			
10	Perhubungan	Dinas Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum	%	60	60			
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang diadakan	Unit	205	205			• Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan studi banding ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan PJU namun disana hanya melakukan pengelolaan PJU di perkotaan
					Jumlah Rambu yang disediakan	Unit	20	20			• Pihak ketiga yang mau menangani pengelolaan PJU sudah melakukan presentasi kontrak namun setelah pihak ketiga melakukan survey lapangan hasilnya tidak sesuai dengan kontrak yang ditawarkan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU yang dipelihara	Unit	350	350			• Pemeliharaan PJU yang tidak selesai di tahun 2020 dilanjutkan kembali di tahun 2021 dengan anggaran sebagai berikut: - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran Rp. 4.694.320.126
					Jumlah Traffic Light yang dipelihara	Lokasi	10	10			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 3.091.461.669
					Jumlah Warning Flash yang dipelihara	Lokasi	20	20			Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran Rp. 407.999.790
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Registrasi Kendaraan	Unit	8000	8000			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor yang Diadakan	Unit	8000	8000			
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dipelihara	Paket	2	2			
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kali	30	30			
					Jumlah peserta pembinaan juru parkir	Orang	96	96			
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Andalalin	Kali	10	10			
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Kali	12	12			
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Kecukupan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	80	65			
				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan	Kali	6	6			
				Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							
				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dibangun	Unit	13	12	Pekerjaan Revitalisasi Pembangunan Pelabuhan Giliyang (lanjutan) thn 2021 tidak dilaksanakan karena tidak cukup waktu melaksanakannya (surat dari Polda Jatim baru turun bulan Desember 2021)	Kegiatan akan dilaksanakan di tahun berikutnya	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara	Unit	1	1			
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	Kali	12	12	Kegiatan pembinaan petugas debarkasi embarkasi tidak dilaksanakan karena diberlakukannya PPKM	Akan dianggarkan kembali tahun berikutnya	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA yang disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	ASN	79	79			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Item	5	5			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Item	15	15			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang Disediakan	Item	43	43			
					Jumlah Mamin Rapat yang Disediakan	OK	130	130			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Item	8	8			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Exemplar	8	8			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	68	68			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diadakan	Paket	2	2			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Unit	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Paket	0	0			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikelola	Surat	1200	1396			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lama penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	20	20			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara	M2	200	200			
11	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase meningkatnya modal usaha koperasi	%	4	4			
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang	Koperasi	10	10			
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha dan pembukaan kantor cabang	Koperasi	10	10			
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yang telah diawasi dan diperiksa	%	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di Periksa dan diawasi	Koperasi	100	100			
				Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang -Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Koperasi	100	100			
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peserta yang lulus dengan predikat baik	%	70	70			
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus/Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Orang	200	200			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Orang	200	200			
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	Orang	450	450			
				Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	Orang	420	420			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang difasilitasi Usahanya	%	6	6			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	Koperasi	100	100			
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti kemitraan	Usaha Mikro	100	100			
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah umk yang didata	Umk	500	500			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti kemitraan	UM	100	100			
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang memiliki Izin usaha	UM	50	50			
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang di kembangkan usahanya	%	4	4			
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat menjadi Usaha kecil	UM	100	100			Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menindak lanjuti rekomendasi dewan atas program mencetak wirausaha muda yaitu dengan membangun sentra RUMAH PRODUKSI di 5 lokasi untuk

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Pelatihan Pengembangan produksi dan pengelolaan, pemasaran. Sdm, serta desain dan teknologi	UM	100	100			lebih meningkatkan lagi motivasi berwirausaha serta memfasilitasi alat – alat produksi, sehingga peserta yang sebelumnya telah di beri materi pelatihan dapat langsung memulai memproduksi atau berkarya tanpa khawatir kekurangan modal untuk membeli peralatan.
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	5	5			
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat perlindungan	Koperasi	100	100			
				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas	Koperasi	100	100			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	2	2			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi						
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item ATK yang disediakan	Item	363	363			
					Jumlah Makan dan minum yang disediakan	Kotak	576	576			
					Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	Orang	49	49			
					Jumlah Tenaga Operator Komputer yang disediakan	Orang	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Buah	335	335			
					Jumlah Tenaga Keamanan Yang disediakan	Orang	2	2			
					Jumlah Tenaga Kebersihan yang disediakan	Orang	2	2			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	jumlah item/jenis komponen yang disediakan	Item	30	30			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diadakan	Buah	505	505			
					Jumlah penggandaan yang diadakan	Lembar	48660	48660			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan perundangan yang disediakan	exemplar	768	768			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	64	64			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jasa/ Layanan	4	4			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar setiap bulan atau jumlah waktu layanan jasa komunikasi/SDA dan listrik	Item/jasa	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	37	37			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	24	24			
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tenaga Supir yang disediakan	Orang	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	13	13			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara	M2	72	72			
12	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Program pengembangan iklim penanaman modal							
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Obyek	2	2			
				Program Promosi penanaman modal							
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Potensi Investasi Tingkat Regional / Nasional	Kegiatan	1	1			
				Program pelayanan penanaman modal							
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
				Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Berkas Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Berkas	5206	9606			
				Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memenuhi Komitmen Izin Usaha	Pelaku usaha	4993	9606			
				Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap terpadu perizinan dan non perizinan pelayanan	Jumlah Pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	Pengaduan	9	9			
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal							
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
				Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Profil Pelaku Usaha Yang Dipantau	Dokumen	7	7			
				koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Menjadi Peserta Pembinaan/ Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku usaha	216	216			
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Dokumen Berita Acara Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	dokumen	13	13			
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal							
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data informasi perizinan dan nonperizinan	Jumlah Dokumen Buku Laporan Realisasi Penerbitan Izin dan Nilai Investasi	Dokumen	54	54			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<i>berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>							
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota							
				Pencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah							
				<i>Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD</i>	<i>dokumen</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			
				Program Administrasi Keuangan Perangkat daerah							
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	ASN	32	32			
				Program Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah							
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atributnya	Jumlah stel pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	54	54			
				Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan funfsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	5	5			
				Program Administrasi umum Perangkat daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan dan komponen listriK yang disediakan	item	7	7			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	13	12	<i>Peralatan dan perlengkapan kantor disediakan sesuai kebutuhan kantor</i>	<i>Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang</i>	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah tersedianya ATK dan tersedianya mamin rapat	item	19	17	<i>Ketersediaan ATK dan Mamin Rapat menyesuaikan Kebutuhan Kantor</i>	<i>Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang</i>	
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang diadakan	item	5	5			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bacaan dan perundangan yang disediakan	exemplar	736	546	<i>Terpenuhinya Jasa Surat Kabar namun permintaan jasa iklan yang minim</i>	<i>Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang</i>	
				Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (Luar Daerah)	Kali	6	6			
					Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi (Dalam Daerah)	Kali	27	27			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penatausahaan arsip dinamis pada skpd	Jumlah meter lari arsip yang disediakan	meter	6	6			
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							
				Pengadaan mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli meja kerja pejabat	Unit	1	1			
					Jumlah mebeleur yang dibelikursi kerja pejabat	Unit	1	1			
					Jumlah mebeleur yang dibeli kursi rapat pejabat	Unit	1	1			
					Jumlah mebeleur yang dibeli kursi rapat staft	Unit	49	49			
					Jumlah mebeleur yang dibeli meja kantor	Unit	15	15			
					Jumlah mebeleur yang dibeli meja rapat	Unit	4	4			
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang disediakan mesin absensi	Unit	1	1			
					Jumlah peralatan yang disediakan mesin alat pendingin	Unit	1	1			
					Jumlah peralatan yang disediakan bracket stands tv	Unit	1	1			
					Jumlah peralatan yang disediakan mesin komputer	Unit	2	2			
					Jumlah peralatan yang disediakan mesinprinter komputer	Unit	2	2			
					Jumlah peralatan yang disediakan TV	Unit	1	1			
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2187	712	Capaian Realsasi Kinerja belum tercapai karena tersedianya surat menyurat menggunakan via email, chatting whatsapp dan soft copy	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya Tenaga kerja Non ASN	orang	10	10			
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah							
				penyediaan jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinss operasional /lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	16	16			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	unit	20	20			
				Pemeliharaan rehabilitasigedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah luasan gedung yang di rehab/ dipelihara	M2	1666,6	1666,6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja		<p>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</p> <p><i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i></p> <p>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</p> <p><i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i></p> <p>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</p> <p><i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i></p>	<p><i>Jumlah peserta yang dilatih</i></p>	Orang	120	120			
				<p>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</p> <p>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i></p> <p><i>Perluasan Kesempatan Kerja</i></p> <p>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</p> <p><i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i></p> <p>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Peningkatan Pelindungan dan Komtensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i></p>	<p><i>Jumlah pembinaan lembaga kerja swasta</i></p> <p><i>Jumlah konsultasi pelaku usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan</i></p>	LPK	38	38			
				<p>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</p> <p>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i></p>	<p><i>Jumlah penerima manfaat</i></p> <p><i>Jumlah penerima manfaat</i></p> <p><i>Jumlah pencari kerja yang terdaftar</i></p> <p><i>Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang dapat di minimalisir</i></p> <p><i>Jumlah terselenggaranya pengesahan peraturan perusahaan</i></p>	<p>Kelompok</p> <p>Kelompok</p> <p>Pencaker</p> <p>Orang</p> <p>Perusahaan</p>	<p>125</p> <p>25</p> <p>750</p> <p>60</p> <p>20</p>	<p>125</p> <p>25</p> <p>750</p> <p>60</p> <p>20</p>			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah terdapatnya sarana hubungan industrial dan jamsos yang melaksanakan kegiatan	Perusahaan	20	20			
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan yang ditangani	Perusahaan	20	20			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang bekerjasama	Perusahaan	20	20			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Laporan	4	4			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Tahun	1	1			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	Stel	40	38	Realisasi kinerja tidak tercapai karena menyesuaikan banyaknya jumlah ASN yang ada	Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Listrik untuk kebutuhan kantor	Macam	13	13			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Item	24	24			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item ATK yang disediakan,	Macam Orang	45	45			
					Jumlah tenaga administrasi,	Kotak	15	15			
					Jumlah tersedianya makan dan Minuman untuk Rapat		760	760			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah item yang dicetak	Item	4	4			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	Macam	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	75	50	Realisasi kegiatan tidak tercapai dikarenakan minimnya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Disnaker Prov. Jatim		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah meter lari arsip yang dikelola	Bulan	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Macam	4	4			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang di Adminstrasikan	Surat	1000	900	Realisasi Kinerja belum tercapai karena tersedianya surat menyurat menggunakan via email, chating whatsapp dan soft copy		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penggunaan Kebutuhan Jasa Komunikasi, air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan tenaga outsourcing kantor selama 1 tahun	Orang	7	7			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	18	18			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Meubelair yang dipelihara	Meter	75	75			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Unit	46	40			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah area gedung kantor/ rumah dinas yang dipelihara	M ²	450	450			
14	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase lembaga yang dibina	%	96	12,28			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Lembaga yang dibina dan dikembangkan	Lembaga	86	0	1. Pembudayaan minat baca untuk usia dini masih belum dijamah. 2. masih masa pandemi tidak maksimal dalam memberikan pelayanan	1. dapatnya memberikan sosialisasi dan melakukan monitoring akan pentingnya literasi dalam pertriwulan	
				Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang di kelola dan dikembangkan	Explar	1700	1256	1. Pengadaan Bahan Pustaka Belum Optimal. 2. kapitalisasi harga buku	Penyesuain Anggaran Bahan Pustaka memenuhi permintaan publik	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi perpustakaan yang dikembangkan dan diolah	Explar	1700	1256	1. Penataan dan pengelolaan buku yang masih kurang tertata dan pemanfaatannya	1. melakukan pengelolan bahan pustakan berdasarkan aturan dari perpusnas. 2. Pentaan dan pengelolaan buku dapatnya dilakukan stockopanne setian semester	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengakses perpustakaan	Pengunjung	2.174	17.708			
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan literasi perpustakaan berbasis Inklusi Sosial	Keg	1	1	2. Pembudayaan kegemaran membaca masyarakat belum optimal	2. melakukan sosialisasi secara bertahap	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestarikan	Naskah	6	2			
				Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang dilestarikan	Naskah	6	2	1. Implementasi Undang2 nomor 4 tahun 1990 tentang serah Simpan karya baik cetak maupun visual belum dijamah	1. Mensosialisasikan aturan perundangan yang ada	
15	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Melakukan bimbingan, pendampingan, pengawasan Pengelolaan Arsip Dinamis serta melakukan Pengelolaan Arsip Statis	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENCIPTA ARSIP YANG MENGELOLA ARSIP DENGAN BAIK	Persen	80%	135%			
				KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Pengelolaan Arsip Dinamis	Pencipta Arsip	34	46			
				SUB KEGIATAN PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	Jumlah Pencipta Arsip yang mendapatkan bimbingan dan pendampingan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Pencipta Arsip	34	46	Tidak adanya Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Pencipta Arsip	Bagi Unit Pencipta Arsip yang tidak memiliki Arsiparis menunjuk petugas khusus sebagai Petugas Pengelola Arsip	
				SUB KEGIATAN PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pencipta Arsip yang telah mendapatkan Pengawasan Kearsipan Internal	Pencipta Arsip	31	31	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya tertib arsip pada setiap Unit Pencipta Arsip yang ada	Melakukan sosialisasi dan pembinaan pada Unit Pencipta Arsip tentang manajemen kearsipan	
				KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	ML	100	37			
				SUB KEGIATAN AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	ML	100	37	Tidak dapat terealisasinya kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan arsip.	Arsip dikerjakan secara mandiri (swakelola) oleh Petugas Pengelola Arsip LKD	

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel 3. 3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan						
					1. Tanaman Pangan :						
					- Padi	- ton	241.088,00	217412,03			
					- Jagung	- ton	361.737,66	378.567,43			
					- Kedele	- ton	8.010,33	83,48	luas tanam berkurang karena minat petani kurang thd komoditi ini	melakukan tanaman substitusi ke tanaman pangan lainnya (ubi kayu)	
					- Ubi Kayu	- ton	57.642,16	138407,88			
					2. Hortikultura :						
					- Bawang Merah	- kw	69.105,00	119275			
					- Cabe Besar	- kw	9.854,00	8539	Tahun ini Bantuan benih pada petani berkurang,	memberikan bantuan benih	
					- Cabe Kecil	- kw	81.781,00	95.708,00			
					3. Perkebunan :						
					- Tembakau	- ton	9.242,28	6705,59	luas tanam Tembakau tahun 2021 turun menyesuaikan permintaan Pabrik	membangun kemitraan Tembakau dengan pihak Pabrik	
					- Kelapa	- ton	42.663,92	44.583,11			
					- Cabe Jamu	- ton	9.868,31	5.371,31	tanaman banyak yg tua dan kurang produktif, belum dilakukan peremajaan	segera melakukan peremajaan tanaman yg tdk menghasilkan	
					- Jambu Mete	- ton	4.822,31	10229,62			
					- Siwalan	- ton	776,37	743,35	tanaman banyak yg tua dan kurang produktif, belum dilakukan peremajaan	segera melakukan peremajaan tanaman yg tdk menghasilkan	
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	- klp	4	27			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana (benih, pupuk ,dll) untuk pembibitan tembakau unggul yang dibudidayakan	- ha	10,25	10,25			
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah sarana pendukung pertanian yang disediakan	- unit	27	27			
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Jumlah pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian (Irigasi dan Non Irigasi)	unit	263	263			
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang diperbaiki	unit	189	189			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah lahan LP2B yang terkelola	ha	10	10			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan	- kali	189	189			
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang dibangun	unit	74	74			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan usaha tani yang dibangun/direhab	unit	23	23			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun/direhab	unit	7	7			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	unit	20	20			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun	unit	9	9			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang dibangun	unit	3	3			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP dan sarana pendukungnya yang dibangun/direhab	pkt	12	12			
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kualifikasi lembaga pertanian (poktan)	-%	1	1,02			
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	- klp	100	150			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah terbentuknya pos penyuluhan tingkat desa	- posluhdes	25	25			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah poktan yang difasilitasi mengembangkan kapasitas dari hulu ke hilir	- poktan	26	26			
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	- pkt	12	12			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase pemenuhan dokumen penunjang urusan pemerintahan yang tepat waktu	%	100	100			
					2. Persentase tersedianya pemenuhan sarana prasarana perangkat daerah	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	- dokumen	3	3			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai ketentuan	- dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	- dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai	- dokumen	1	1			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	- dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan	- org	282	190			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	- dokumen	2	2			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi kepegawaian ASN	- kegiatan	2	1			
				<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi</i>	- org	1	1			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	- kegiatan	6	6			
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan</i>	- item	4	4			
				<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan</i>	- item	5	5			
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah jenis ATK yang disediakan</i>	- item	8	8			
					<i>Jumlah makan dan minum yang disediakan</i>	- paket	32	32			
				<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan</i>	- item	8	8			
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan</i>	- kali	100	100			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	- unit	4	4			
				<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan</i>	- unit	23	23			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	- keg	4	4			
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet</i>	- tagihan/rekening	22	22			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan jasa perbaikan/pemeliharaan barang milik daerah	- keg	6	6			
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola</i>	- unit	8	8			
				<i>Pemeliharaan Mebel</i>	<i>Jumlah mebel yang dipelihara</i>	- item	1	1			
				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara</i>	- item	4	4			
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara</i>	- unit	1	1			
2		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.	Persentase kecukupan cadangan pangan daerah	%	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Unit	7	7			
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya yang disediakan	Unit	7	7			
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang disediakan	Unit	2	2			
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan ditingkat ketersediaan	Skor	71	71*)			
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data penyediaan dan penyaluran pangan kabupaten	Dokumen	1	1			
				Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah data informasi harga pangan dan NBM yang disediakan	Jenis	3	3			
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AKG.	Angka kecukupan gizi masyarakat per kapita pertahun yang dicapai	kal/kap/ tahun	1820	2.542			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok wanita yang difasilitasi dalam pemanfaatan pekarangan	Kelompok	7	7			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah demplot pemanfaatan pangan lestari yang disediakan	Unit	2	2			
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	%	1	1			
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kec.	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan yg disusun	Buah	1	1			
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah buku peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disediakan	Buah	20	20			
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan pangan	%	85	90			
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pasar/kios pangan segar yang dimonitoring	lokasi	12	12			
				Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produsen pangan dan konsumen yang dibina	org	60	60			
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi peternakan yang disediakan	Jenis	5	5			
				Kegiatan Pengendalian &	Persentase peningkatan populasi	%	0,64	1,57	Ternak kecil khususnya	Pemberian bantuan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak,	ternak besar, ternak kecil dan unggas.		0,6	0,56	domba kurang diminati oleh masyarakat	domba khususnya domba local dan	
				Sub Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	jumlah jenis bibit ternak yang terdistribusi	jenis	3	3			
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pelayanan inseminasi buatan	akseptor	29.000	55.965			
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian	Unit	2	2			
				Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah lokasi pengembangan lahan penggembalaan umum	lokasi	5	5			
				Sub Kegiatan Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah bantuan sarana dan prasarana peternakan yang disediakan	Jenis	3	3			
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan	%	25	10,67	Tingginya wabah penyakit ND pada unggas pada musim nancaroba	Pemberian vaksin dan penyediaan obat-obatan	
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kesehatan hewan	lokasi	21	21			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu	Ekor	500	511			
				Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang teridentifikasi penyakit pada ternak yang keluar-masuk kabupaten	Ekor	200	0 (tidak ada ternak keluar masuk wilayah yg teridentifikasi penyakit	Setiap ternak keluar / masuk Sumenep harus dlm kondisi sehat	Ternak keluar / masuk wilayah Sumenep wajib mempunyai SKKH	
				Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah pengawasan lalu lintas ternak dan peredaran bahan asal hewan	lokasi	6	6			
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hewan yang mendapatkan pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Ekor	100	217.253			
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang menerima pelayanan jasa medik veteriner	Ekor	800	217.123			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%	9	9			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	2	2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	2	2			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	Dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Laporan	3	3			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen	4	4			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12	12			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Dokumen	3	3			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Jenis	7	7			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item komponen listrik yang disediakan	jenis	7	7			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	17	17			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah item bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	3	3			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	10	10			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	jenis	6	6			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	100	100			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jenis	6	6			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jenis	6	6			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Bulan	12	12			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	Jenis	18	18			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Jenis	6	6			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis	3	3			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jenis	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	5	5			
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	Buah	3	3			
				<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah obyek tujuan wisata yang dikembangkan	obyek	38	41	Tidak ada permasalahan		
				<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah pembinaan unsur pariwisata	Orang	2	3	Tidak ada permasalahan		
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi wisata yang dipelihara	Buah	3	3			
				<i>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Pemeliharaan Obyek wisata	obyek	6	4	Anggaran cukup dilaksanakan pada 4 obyek sesuai dengan tingkat kerusakan yang harus diperbaiki	Dianggarkan ditahun selanjutnya	
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan TDUP	Buah	5	5			
				<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Terbitnya data usaha pariwisata	Jenis	5	2	Anggaran hanya bisa mengcover 2 jenis pendataan	Perlunya dukungan anggaran	
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase terselenggaranya pemasaran pariwisata di dalam negeri dan luar negeri	%	75	75			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan wisatawan	Org	200.000	248.158			
				<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	Jumlah promosi yang dilakukan	Kali	11	2	Anggaran yang tersedia cukup untuk 2 event promosi	Perlunya dukungan anggaran	
				<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri</i>	Jumlah dokumen data dan informasi Pariwisata	Jenis	5	6	Tidak ada permasalahan		
				<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>	Jumlah kerjasama yang dilakukan	Kali	2	2	Tidak ada permasalahan		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	%	5	5			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan unsur pariwisata	Orang	3	3			
				<i>Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</i>	Jumlah Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Orang	35	30	Anggaran yang tersedia cukup untuk 30 orang	Dianggarkan ditahun 2022 sejumlah 20 peserta	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pelatihan SDM yang dilakukan	Orang	6	6			
4	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Dinas Perikanan		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Jumlah produksi hasil perikanan tangkap	%	0,51	1,1	Tidak tercapainya target dikarenakan pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum selesai sehingga masih menghambat distribusi hasil perikanan	Terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sarana dan prasarana perikanan tangkap	
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah informasi data dan promosi hasil pembangunan	Eksemplar	50	50			
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak	kelompok	35	35			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak	Kelompok	38	38			
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pendapatan masyarakat nelayan perkapita	Rupiah	31.934.903	44.542.387			
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan usaha	Nelayan	1000	0	Anggaran pusat untuk program asuransi nelayan dikurangi akibat refocusing anggaran Covid 19	Dinas Perikanan tahun 2022 akan tetap mengajukan usulan penerima asuransi nelayan kepada pusat	
				Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah sertifikat SEHAT-kan nelayan	Nelayan	400	400			
				Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang terfasilitasi	Lokasi	1	1			
				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah sarana dan prasarana TPI yang terfasilitasi	Lokasi	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Produksi hasil perikanan budidaya	%	0,99	26,6			
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pembudidaya yang paham tentang persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan	Kelompok	4	4			
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi izin usaha budidaya yang terlaksana	Kelompok	4	4			
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi hasil perikanan budidaya	Ton	1575	7729,017			
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data base perikanan yang ada di kabupaten sumenep	Eksemplar	50	50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang layak	Kelompok	14	14			
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana BBI yang terfasilitasi	Lokasi	1	1			
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah sertifikat hak atas tanah bagi pembudidaya	Patok	600	600			
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	%	20	20			
				Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok perikanan yang berhasil dibina dan berbadan hukum	Kelompok	170	170			
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat perikanan yang terbina dan diberdayakan	Lokasi	2	2			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	20	0,72*	Tidak tercapainya target dikarenakan pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum selesai sehingga masih menghambat distribusi hasil olahan	Dinas Perikanan tetap melakukan pembinaan, pelatihan dan pemberian sarana dan prasarana olahan dan pemasaran	
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pendapatan masyarakat nelayan perkapita	Rupiah	31.934.903	44.542.387			
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan pengembangan daya saing produk perikanan yang terfasilitasi	Event	1	1			
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pendapatan nelayan perkapita	Rupiah	31.934.903	44.542.387			
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forikan dan Gemarikan	Event	1	1			
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lapasitas kelembagaan UMKM perikanan yang terfasilitasi	Lokasi	4	4			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan gaji aparatur dalam 1 tahun	Tahun	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	4			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang OPD	%	90	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan komunikasi, listrik dan air	Tahun	1	1			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	3	3			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional kantor	%	90	90			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan komponen listrik OPD	Lokasi	1	1			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan OPD	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan operasional OPD	Tahun	1	1			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan perundang undangan	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tahun	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	2	2			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional OPD	kegiatan	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	2	4			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Lokasi	1	1			
5	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	0,05	0,05			
				(kegiatan) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi pengendalian terhadap penyimpanan bahan berbahaya	Informasi	2 Informasi	2 Informasi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(sub kegiatan) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Pengawasan	pengawasan	2 pengawasan	2 pengawasan			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan volume perdagangan di pasar	%	10%	10%			
				(Kegiatan) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penambahan pembangunan sarana distribusi perdagangan yang disediakan dan dikelola	Unit	20 Unit	20 Unit			
				(sub. Kegiatan) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan/ perbaikan sarana perdagangan di pasar	pasar	5 pasar	5 pasar			
				(sub. Kegiatan) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	pasar	10 pasar	10 pasar			
				(kegiatan) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang telah dibina dan diberdayakan	orang	20 orang	20 orang			
				(Sub. Kegiatan) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola yang dibina	Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha			
				(Sub. Kegiatan) Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola yang diberdayakan	Pelaku usaha	10 Pelaku usaha	10 Pelaku usaha			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase peningkatan jumlah Bapokti yang harganya stabil	%	0,7	0,7			
				(Kegiatan) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah informasi ketersediaan Bapokti di pasar dan agen dalam satu kabupaten	informasi	12 informasi	12 informasi			
				(Sub. Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi ketersediaan Bapokti	Jumlah	2 kali	2 kali			
				(Sub. Kegiatan) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi aksesibilitas Bapokti	Jumlah	2 kali	2 kali			
				(Sub. Kegiatan) Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengawasan	kali	2 kali	2 kali			
				(Kegiatan) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah informasi harga Bapokti di pasar dan agen dalam satu kabupaten	jumlah	9 Informasi	9 Informasi			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Sub. Kegiatan) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah pemantauan harga pada pelaku usaha	Jumlah	5 agen	5 agen			
				(Sub. Kegiatan) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga pada pasar rakyat dalam sistem informasi perdagangan	pasar	2 pasar	2 pasar			
				(Sub. Kegiatan) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah operasi pasar reguler	Jumlah	1 kali	1 kali			
				(Kegiatan) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah informasi pengendalian terhadap distribusi pupuk pestisida bersubsidi	informasi	6 informasi	6 informasi			
				(Sub. Kegiatan) Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan	kali	2 kali	2 kali			
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbangan & Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	10%	10%			
				(Kegiatan) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase peningkatan pelayanan metrologi legal	%	10%	10%			
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penjualan produk dalam negeri	%	0,3	0,3			
				(Kegiatan) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi	kali	2 kali	2 kali			
				(Sub Kegiatan) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi	kali	2 kali	2 kali			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100%	100%			
				(Kegiatan) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	10 dokumen	10 dokumen			
				(Sub Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	4	4			
				(Sub Kegiatan) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	kali	4 kali	4 kali			
				(Kegiatan) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	laporan	2 laporan	2 laporan			
				(Sub. Kegiatan) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	12 bulan	12 bulan			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Sub Kegiatan) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	laporan	5 laporan	5 laporan			
				(Kegiatan) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	jenis	12 jenis	12 jenis			
				(Sub. Kegiatan) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	ASN	5 ASN	1 ASN			
				(Kegiatan) Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	%	0,9	0,9			
				(Sub. Kegiatan) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	25 Jenis	25Jenis			
				(sub kegiatan) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	350 unit	350 unit			
				(sub kegiatan) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Item/ pkt	350 item	350 item			
					jumlah makan dan minum yang disediakan		24 Paket	24 Paket			
				(sub kegiatan) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	3 Barang	3 Barang			
							27.000 Lembar	27.000 Lembar			
				(sub kegiatan) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	5 jenis	5 jenis			
				(sub kegiatan) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	5 kali	5 kali			
				(Kegiatan) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	%	0,9	0,9			
				(Sub. Kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	90 unit	90 unit			
				(Kegiatan) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa yang disediakan	%	0,9	0,9			
				(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	rekening	4 rekening	4 rekening			
				(Kegiatan) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	%	0,9	0,9			
				(Sub Kegiatan) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	unit	25	25			
				(sub kegiatan) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20 unit	20 unit			
				(sub. kegiatan) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1 unit	1 unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan pembangunan industri	%	100%	100%			
				(Kegiatan) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kot	Jumlah Dokumen Pembangunan Industri yang terlaksana	Dokumen	4 dok	4 dok			
				(Sub. Kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Sentra	Sentra	14 Sentra	14 Sentra			
				(Sub Kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peserta pelatihan dan unit KIHT yang dibangun	peserta	50 peserta	50 peserta			
				(Sub. Kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana	fasilitasi	200 fasilitasi	200 fasilitasi			
				(Sub Kegiatan) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM / Pokmas yang menerima bantuan	IKM	50 IKM	50 IKM			
				(Sub Kegiatan) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi layanan data industri	%	100	100			
				(Kegiatan) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pertambahan informasi data industri dalam satu tahun	data	300 data	300 data			
				(Sub Kegiatan) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah informasi data industri yang dipublikasikan	data	300 data	300 data			
7	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase transmigran yang mandiri	%	100	0			
				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan dan pemberdayaan transmigrasi	KK	2	0	Tidak ada petunjuk dan rekomendasi dari Provinsi Jatim		

3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel 3. 4
Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel	%	100	100	1		
				Administrasi Tata Pemerintahan	Score Kesesuaian Materi LPPD	Skor	4	Belum rilis	-		
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan	Berkas	2	0	tidak dilaksanakan karena terdapat perubahan mapping ttusi sehingga pertanahan menjadi tusi OPD lain	tahun mendatang tidak dimasukkan ke dalam indikator	
					Penganugerahan Bupati Award	orang	4	4			
				Pengelolaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Kecamatan yang dibina	Kecamatan	27	27			
					Jumlah Kelurahan yang	kelurahan	4	4			
					Jumlah Patok Batas yang akan dibangun	Patok	80	80			
					Optimalisasi Pelaksanaan PATEN	Kecamatan	27	27			
					Terjaganya Tugu Batas Peringatan Kecamatan serta	Tugu	31	31			
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Berkas Administrasi Anggota DPRD	Berkas	3	1	Jumlah Berkas Administrasi Anggota DPRD disesuaikan kebutuhan fasilitasi dokumen tersebut.		
					Jumlah Berkas Administrasi	Berkas	3	3			
					Pengadaan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Buku	75	75			
					Penyusunan Laporan Standart Pelayanan Minimal	Laporan	1	1			
					Persentase Laporan LPPD OPD Tepat waktu	%	100	100			
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	%	100	120			
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	Kerjasama	20	24	Capaian indikator kinerja lebih dari 100% sedangkan capaian kinerja keuangan di bawah 80%. Pada kondisi covid-19 yang tidak menentu beberapa belanja tidak dapat	Kegiatan harus dikemas sesuai kondisi yang memungkinkan.	
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelayanan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dan prosentase rancangan produk hukum daerah yang menjadi produk hukum daerah	%	100	100			
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan Kegiatan keagamaan, pendidikan dan kepemudaan, kesehatan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	%	100	119			
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan	Kegiatan	11	11			
					Jumlah Lembaga Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela	lembaga	14	14			
					Jumlah Penerima Bantuan Sosial	orang	1713	1800			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Peserta Diklat Keagamaan	Peserta	250	40	Seleksi MTQ Kabupaten dibatalkan karena kondisi pandemi tidak memungkinkan		
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah waktu Pembinaan SEKTAP UKS	TA	1	1			
					Terselenggaranya Kegiatan Updating Data Guru Ngaji dan	Kegiatan orang	8 1000	8 4000			
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Sumenep	Kegiatan	7	2	Fasilitasi haji tidak terlaksana terkait dengan aturan pemerintah tentang pemberangkatan jemaah haji di tengah pandemi covid 19		
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah	%	100	100			
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Persentase terfasilitasinya produk hukum daerah	produk %	800 100	691 100			
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah obyek yang di koordinasikan	kali	8	8	Penanganan kasus telah melebihi target yang ditetapkan. Beberapa belanja tidak dapat maksimal karena bersifat disediakan untuk narasumber dan Perdin (sesuai kebutuhan)		
					Jumlah Perkara yang ditangani	Perkara	5	9			
					Persentase Penanganan Kasus yang ditangani	%	1	1			
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Referensi Hukum	Referensi	4	4			
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase fasilitasi kebijakan di bidang perekonomian, SDA dan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dan data informasi pembangunan yang terpenuhi	%	100	100			
				Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan	%	100	72			
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dibina	BUMD	5	5			
					Jumlah laporan keuangan dan rencana kerja perusahaan	Laporan	10	10			
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan OPD Pengguna Dana Pajak Rokok	Laporan	10	1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kegiatan terhadap 14 OPD pengguna pajak rokok tidak dapat dilaksanakan sesuai iadual.	Dilaksanakan pada akhir triwulan ke-IV.	
					Jumlah Laporan OPD Pengguna DBHCHT	Laporan	2	0	Sekretariat DBHCHT beserta penganggarnya telah dialihkan ke Bagian ESDA melalui PAK.		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah Laporan TPID	Laporan	10	6	Pelaksanaan survei harga bahan pokok dan ketersediaan bahan pokok dilaksanakan pada bulan April, lebih masif pada bulan November dan		
					Jumlah Pelaksanaan kegiatan Per	Kali	10	0	Sekretariat DBHCHT beserta penganggarannya telah dialihkan ke Bagian ESDA melalui PAK.		
					Persentase Penggunaan Dana Bag	Laporan	0,75	0	Sekretariat DBHCHT beserta penganggarannya telah dialihkan ke Bagian ESDA melalui PAK.		
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Monev pada Pelaku Ekonomi Mikro (Pembinaan UMKM)	Kali	50	45	Pelaksanaan semula direncanakan dapat dilaksanakan di di TW 2,	direshedule dan didesain ulang metode monev	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan dan data pembangunan yang disediakan	%	100	131			
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Buku yang tersusun (Pedoman Standar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja dan Bahan, ASB, Pedoman APBD, SBU, Standar Barang dan Harga Satuan Barang)	Buku	800	600	Perbup Pedoman pelaksanaan APBD/SBU tidak terikat dengan tahun anggaran. Pada tahun 2021 Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD/SBU tidak berubah	Buku Pedoman APBD/SBU tidak dicetak	
					Jumlah Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan yang disusun (Pedoman Standar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja dan Bahan, ASB, Pedoman APBD, SBU, Standar Barang dan Harga Satuan Barang)	Pedoman	4	3	Pedoman APBD tidak dilaksanakan karena tidak ada perubahan	-	
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/WKDH (Safari Kepulauan)	Kali	0	0	Kondisi pandemi covid-19 sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan safari kepulauan.	Melakukan perubahan anggaran melalui PAK.	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Proyek-Proyek pembangunan Strategis dan Pelaporan DAK dan Tugas Pembantuan Lainnya)	Laporan	2	2	Untuk pelaporan DAK dan Tugas Pembantuan Lainnya tidak maksimal karena kurangnya data dan informasi terkait OPD	Melakukan koordinasi dengan OPD terkait khususnya dengan OPD penerima DAK dan Tugas Pembantuan	
					Jumlah waktu pelaksanaan Monitoring dan pelaporan Pelaksanaan Proyek-Proyek pembangunan Strategis dan Pelaporan DAK dan Tugas Pembantuan Lainnya	bln	12	12			
					Pelaksanaan TMMD	kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran OPD	Laporan	1	4	Capaian indikator kinerja tercapai lebih dari 100%. Namun demikian, capaian kinerja keuangan kurang dari 50% karena beberapa belanja yang tidak terserap (perdin) karena kondisi pandemi.	Format pelaksanaan kegiatan berubah sesuai kondisi yaitu menggunakan zoom meeting	
					Jumlah Pelaksanaan TEPR	Kali	2	4			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	%	100	107			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket SKPD melalui SPSE	Paket	75	129	Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan		
			Jumlah Waktu Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa		Bulan	12	12				
			Persentase paket e-tendering dan e-purchasing terfasilitasi melalui SPSE dan Penayangan RUP oleh OPD		%	1	1				
				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi di LPSE	OPD	50	50			
			Jumlah Waktu Pelayanan terhadap Pengguna SPSE		Bulan	12	12				
			Persentase Paket e-tendering dan e-purchasing yang terfasilitasi		%	100	100				
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Penanganan Permasalahan pengadaan barang dan jasa	Laporan	1	1			
			Jumlah Penyusunan Kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		Pedoman	1	1				
			Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang terfasilitasi Pendampingan PB		OPD	50	50				
			Jumlah Waktu Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dan Sanggah		Bulan	12	12				
			Pelayanan Konsultasi PBJ		Bulan	12	12				
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan dan Pembinaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	%	100	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pembinaan, pengawasan, serta pemanfaatan Pengelolaan sumber daya	Peserta	50	50			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan usaha pertambangan umum	Peserta	100	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jenis penyalur yang dimonitoring jumlah Kuota BBM, Gas, dan Energi Baru Terbarukan (SPDN, APMS, Desa, SPBU dan Agen)	Penyalur	5	5			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi dan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang disediakan	%	100	91			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	%	100	100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan kinerja yang disusun	Dolumen	5	5			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang disusun (RKA Setda)	Dolumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (RKA Perubahan Setda)	Dolumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun (DPA SETDA)	Dolumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun (DPA Perubahan SETDA)	Dolumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun	Laporan	1	1			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Keuangan Setda yang dipenuhi	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Setda	Bulan	12	12			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian-Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pemrosesan Transaksi Keuangan Setda	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Sinkronisasi dengan BPKAD	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang Disusun	Laporan	1	1			
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Prosentase Penyelesaian Administrasi Tanggapan Pemeriksaan	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Triwulanan yang disusun	Laporan	1	1			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang disusun	Laporan	1	1			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang dipenuhi	%	100	100			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan BMD Setda	Dokumen	1	1			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bulan	12	12			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset yang disusun	Laporan	2	2			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	%	100	100			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengadministrasian Data kepegawaian di Lingkungan Setda	Jenis	8	8			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang dipenuhi	%	100	99,19			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Jenis	5	5			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan/ Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang disediakan	Jenis	10	10			
					Jumlah Jenis Mamin Yang disediakan	Jenis	3	3			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang cetakan yang disediakan	Jenis	4	4			
					Jumlah Penggandaan yang disediakan	Lembar	268046	250000			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lokasi dipenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Lokasi	5	5			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu terpenuhinya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam danLuar Daerah serta Luar Negeri	Bulan	12	12			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan Dilakukan Penatausahaan Arsip Setda	Bulan	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Setda yang dilaksanakan	%	100	99,67			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli	unit	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	Unit	150	149	1 kamera tidak dapat dibeli karena harga dipasaran telah naik sehingga pagu tidak mencukupi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan, sopir, pengamanan, resepsionis dan penabuh gamelan dan drumband	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan Pemda yang dipelihara	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan (roda 4) yang dipelihara	Unit	4	4			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 2) yang dipelihara	Unit	4	4			
					Jumlah kendaraan dinas operasional (roda 4) yang dipelihara	Unit	31	31			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12			
					Jumlah Bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan rumah dinas	bulan	12	12			
				Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Lokasi Gedung dan Bangunan yang terpelihara	Lokasi	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	%	100	75			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Bulan	12	12			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan pakaian dinas dan atribut KDH/WKDH	Stel	54	54			
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan medical checkup untuk KDH/WKDH	Bulan	12	0	Sifatnya disediakan untuk kebutuhan general checkup KDH/WKDH		
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Bulan	12	12			
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kerumahtanggaan Setda yang difasilitasi	%	100	100			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtanggaan KDH	Bulan	12	12			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Open House KDH	Bulan	12	12			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kerumahtanggaan WKDH	Bulan	12	12			
					Jumlah Pelaksanaan Open House WKDH	Bulan	12	12			
					Jumlah Baju Forkopinda untuk 3 kegiatan (hari jadi, open house dan 17 Agustus)	Stel	56	56			
					Jumlah Bulan terpenuhinya Makanan dan Minuman Jamuan Tamudi Sekretariat Daerah	Bulan	12	12			
					Jumlah Pelaksanaan Ramah Tamah Setda dan Kelengkapan Open House KDH/WKDH	Kali	0	0			
				Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi (OPD) yang dilaksanakan	%	100	75			
					Persentase OPD yang mengikuti KIPP	%	100	92			
					Persentase OPD yang dimonev kepatuhan terhadap SPP	%	100	27			
					Persentase OPD yang difasilitasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi	%	100	100			
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan REFORMASI BIROKRASI	Kali	2	2			
					Jumlah Kelompok Budaya Kinerja yang dibina	OPD	51	51			
					Persentase Penyusunan SAKIP tepat waktu	%	83,78	90			
					Tersusunnya Buku Perjanjian Kinerja	Buku	132	132			
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbup yang disusun	Perbub	24	24			
					Draft Perda Perangkat Daerah yang disusun	Perda	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1					Jumlah OPD yang disusun kebutuhan pegawai, formasi jabatan, kompetensi jabatan, kelas nilai jabatan	OPD	51	0	Anjab, ABK, dan Eujab tidak terlaksana karena Perbup SOTK hasil penataan dilaksanakan akhir Desember	Proses Penataan SOTK telah dilakukan sedemikian rupa melalui banyak tahapan dan koordinasi dengan pihak terkait dan baru dapat diselesaikan di akhir Desember. Dengan demikian, proses Anjab menjadi tidak memungkinkan dilakukan pada tahun ini dan akan dilakukan pada periode mendatang		
					Laporan Pelaksanaan Rakor Pelaksanaan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Laporan	6	6				
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Draft Pedoman Penyusunan Proses Bisnis	Dokumen	1	1			
					Draft pedoman penyusunan SOP dan Pola Kerja	Dokumen	1	1				
					Draft Perbup Tata Naskah secara elektronik	Dokumen	1	1				
					Jumlah OPD yang menerapkan sistem kebijakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur	OPD	31	17	Kegiatan pendampingan penyusunan SPP dan SOP telah dilakukan. Namun, respon OPD masih perlu ditingkatkan	telah dilakukan upaya untuk meningkatkan respon 14 OPD termasuk memberikan surat teguran. Ke depan akan dilakukan pembinaan khusus kepada OPD bersangkutan.		
					Ketentuan Pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan	Inovasi	10	10				
					Pedoman Pakaitan Dinas	Dokumen	1	1				
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	OPD (18 dinas/ Badan, 10 Kec, 5 Puskesmas)	33	9	Monev tidak dapat dilakukan kepada semua Perangkat Daerah karena keterbatasan personil dan anggaran.	Pada tahun ini telah dilakukan semaksimal mungkin dan akan didesain monev dengan lebih efektif	
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi pimpinan yang dilaksanakan	%	100	100			
					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pimpinan	Kali	700	700			
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah waktu terlaksananya dialog	Bulan	12	12			
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Pemerintahan dan Pembangunan	Dokumen	1	1			
2		Sekretariat DPRD		Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi	Persentase	100	100				
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi	Persentase	100	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Rangka Pembahasan Propemperda	kali	8	8	Terkendala dengan situasi Covid-19 yang belum mereda sehingga tidak bisa mengundang Narasumber secara langsung	Dalam kondisi situasi covid yang masih berlaku untuk sementara akan dilakukan kegiatan yang menghadirkan narasumber secara <i>Daring</i>	
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	kali	3	3			
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan yang Disusun	paket	1	1	Karena diberlakukannya status PPKM diseluruh wilayah Indonesia maka kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih menggunakan transportasi darat yang secara kalkulasi biaya Perjalanan Dinasnya lebih efisien dibandingkan menggunakan transportasi udara	Tetap menganggarkan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD namun dalam penganggarannya lebih menekankan pada standart biaya Perdin melalui jalur darat	
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik dan Draf Raperda Usul Prakarsa DPRD yang Disusun	paket	4	4			
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Buku Peraturan Tata Tertib DPRD yang Dicitak	kali	145	145	Karena belum adanya Rapat-rapat penyusunan Tata Tertib DPRD	Tetap dianggarkan kebutuhan ATK untuk Rapat-rapat Penyusunan Tatib namun dengan perencanaan anggaran uana lebih tepat	
				Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terfasilitasi	Persentase	100	100			
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Banggar Luar Daerah Dalam Rangka Pembahasan KUA dan PPAS	kali	4	4			
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Banggar Luar Daerah Dalam Rangka Pembahasan APBD	kali	2	2			
				Pembahasan APBD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Banggar Luar Daerah Dalam Rangka Pembahasan APBD	kali	1	1	Karena minimnya penyelenggaraan rapat pembahasan APBD ditingkat Banggar	Tetap menyediakan kebutuhan belanja ATK dan belanja Mamin Rapat-rapat Pembahasan APBD namun dalam penganggarannya lebih cermat lagi	
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Banggar Luar Daerah Dalam Rangka Pembahasan APBD Perubahan	kali	2	2			
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Banggar Luar Daerah Dalam Rangka Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	kali	4	4	Karena minimnya penyelenggaraan rapat pembahasan APBD ditingkat Banggar	Tetap menyediakan kebutuhan belanja ATK dan belanja Mamin Rapat-rapat Pembahasan APBD namun dalam penganggarannya lebih cermat lagi	
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang Dilakukan	kali	16	3			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang Dilakukan	kali	16	1			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang Dilakukan	kali	16	3			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Dilakukan	kali	16	4			
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang Terfasilitasi	Persentase	100	100			
				Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimtek DPRD yang disediakan	kali	3	3			
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi Media Cetak yang disediakan	kali	330	584			
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi DPRD yang disediakan	orang	7	7			
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan humas dalam rangka audiensi penanaman Unras	kali	36	21			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi	Persentase	100	100			
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	berkas	50	50			
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	kegiatan	3	3			
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi	Persentase	100	100			
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Badan Kehormatan DPRD yang Disediakan	kali	8	8			
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi	Persentase	100	100			
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Dalam Rangka Forum Komunikasi	kali	48	48			
				Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas tugas DPRD yang terfasilitasi	Persentase	100	100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bamus	kali	8	6			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi	Nilai	100				
				Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan Daerah	dokumen	4	4			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	2	2	Terkendala dengan situasi Covid-19 yang belum mereda sehingga tidak bisa mengundang Narasumber secara langsung	Dalam kondisi situasi covid yang masih berlaku untuk sementara akan dilakukan kegiatan yang menghadirkan narasumber secara	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan	dokumen	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	4	4			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disiapkan	Laporan	6	6	Terkendala dengan situasi Covid-19 yang belum mereda sehingga tidak bisa mengundang Narasumber secara langsung	Dalam kondisi situasi covid yang masih berlaku untuk sementara akan dilakukan kegiatan yang menghadirkan narasumber secara	
				Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan	82				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun	Laporan	38	38			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD yang Tersusun	Laporan	44	44			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	kali	24	22			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pegawai yang mengikuti Diklat	kali	24	22			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis/item	14	12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jenis	8	5	Penyediaan Bahan Cetak berupa Buku Agenda dan Kalender sudah disediakan dari pihak Pemkab Sumenep	Akan lebih cermat lagi dalam menyusun penyediaan kebutuhan bahan perkantoran khususnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	eks	1.689	1689	Adanya pengurangan Oplah berlangganan surat kabar/majalah dan jurnal	akan lebih selektif dalam memilih berlangganan surat kabar/majalah dan jurnal	
				Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	28	28			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	buah	69	69			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Buah	69	69			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yg disediakan	Persentase	100	186			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat	kali	48	24	Minimnya jasa pengiriman surat melalui kantor pos	Akan lebih cermat dalam menyusun perencanaan kebutuhan jasa pengiriman surat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik, Air, telepon dan internet	kali	144	144	Belum mendapatkan informasi yang tepat mengenai jasa Tehnologi dan Informasi	Akan lebih selektif dalam memilih jasa tehnologo dan informasi	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	orang	18	18			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persentase	100	100			
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang dikelola	kali	41	41			
				Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kali	24	19	Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang masih terpelihara dengan baik	Akan menganggarkan perencanaan kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor secara lebih cermat	
				Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kali	69	39			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan	kali	100	100			
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terpenuhi gaji dan administrasi keuangannya	kali	26	26			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian dinas dan atribut DPRD	stel	250	250			
				Pelaksanaan Medical Check up	Jumlah Daftar Iuran Jaminan Kesehatan dan Medical Check Up DPRD yang disiapkan	bulan	13	13	Karena masa Pandemi yang masih berlangsung, sebagian besar Pimpinan dan Anggota DPRD belum mengajukan permintaan medical chekup	Tetap menganggarkan penyediaan kebutuhan medical chekup Pimpinan dan Anggota DPRD mengingat hal tersebut diamanatkan dalam PP 17 Tahun 2018	
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	Persentase	100	100			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD yang dilaksanakan	kali	21	16	Karena diberlakukannya status PPKM diseluruh wilayah Indonesia maka kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah lebih menggunakan transportasi darat yang secara kalkulasi biaya Perjalanan Dinasnya lebih efisien dibandingkan menggunakan transportasi udara	Tetap menganggarkan pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD namun dalam penganggarnya lebih menekankan pada standart biaya Perdin melalui jalur darat	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Petugas Pengamanan Dalam DPRD	orang	10	10			

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumenep, serta acuan bagi stakeholders terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit **“Sumenep SUPERMANTAP”**.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan Strategis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2021

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Peningkatan produksi perikanan mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan menumbuh kembangkan usaha perikanan (Dinas Perikanan)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 06 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021	Arah kebijakan pembangunan Dinas Perikanan diprioritas untuk peningkatan produksi perikanan nelayan kecil dimana peningkatan produksi perikanan dapat meningkatkan perekonomian nelayan dan pembudidaya serta pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat.

3.1.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tabel 3. 5
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi / analisis jabatan	Persen	95	29,4	Penyederhanaan Birokrasi	Akan dilakukan pengisian setelah hasil Penyederhanaan Birokrasi selesai	
					Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	95	87,41	Beberapa ASN belum mengikuti uji kompetensi sesuai jabatannya	Pemkab memfasilitasi pengembangan kompetensi sesuai jabatan ASN	
					Persentase Jumlah Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan dengan SOTK	Persen	95	90,16	Pemberlakuan Penyederhanaan Birokrasi	Akan dilaksanakan pengisian Jabatan sesuai dengan hasil Penyederhanaan Birokrasi selesai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN sesuai kebutuhan dan Formasi	Orang	8.656	8.746			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Kebutuhan Formasi ASN (CPNS dan PPPK)	Dokumen	2	2			
				Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	Kegiatan	3	3			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Proses Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pensiun ASN	350	628			
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Pengembangan Bakat Seni Mental dan Rohani	ASN	40	40			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Sistem Informasi Kepegawaian	Persen	90	90			
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Tercapainya Penyediaan Data dan Updating Data Kepegawaian	Persen	90	90			
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Mutasi dan Promosi ASN yang terproses	Orang	4.640	2.237	Kenaikan Pangkat merupakan kegiatan yang bersifat periodik yang ditetapkan pada tanggal 01 April dan 01 Oktober setiap Tahun. Sehingga jumlah Realisasi Kinerja pada setiap tahunnya akan mengalami perubahan yang signifikan tergantung dari TMT Kenaikan Pangkat dari masing-masing PNS pada Perangkat Daerah	Karena sifatnya yang dinamis maka dibutuhkan Target Kinerja sebesar 2.600 sebagai persediaan tiap tahunnya	
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN dalam Penataan, Pengelolaan, Penempatan, Pengangkatan dan Mutasi	ASN	2.000	2.854			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terealisasi dan tepat waktu	PNS	2.600	1.053			
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi	Orang	40	23	Seleksi pengisian JPT Pratama tahapannya dibatalkan karena adanya Perubahan SOTK baru sesuai dengan perda nomor 15 tahun 2020	Akan dikukan setelah adanya rotasi./mutasi JPT pratama yang sesuai dengan SOTK baru	
				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peserta Lulus Diklat Pengembangan Kompetensi	Orang	120	234			
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional	Orang	20	87			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang melakukan ijin belajar dan tugas belajar	Orang	100	147			
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dievaluasi Kinerjanya	Orang	8.656	7.200	Terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang belum mengumpulkan SKP nya tepat waktu.	Melakukan percepatan yang di anggap perlu dalam langkah evaluasi kinerja	
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian Kinerja dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Orang	8.656	8.656			
				Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	60	43,46	Dikarenakan data yang terdapat di SAPK bagian kompetensi telah kadaluarsa dan belum di update	Melakukan peningkatan peremajaan data	
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pemberian TPP dan Kesejahteraan PNS	Dokumen	12	16			
					Selesaiannya Karpeg/Taspen ASN	Kartu	50	531			
					Selesaiannya usulan ijin Cuti ASN	Dokumen	600	242			
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pemberian Satyalancana Karya Satya	ASN	150	350			
				Pembinaan Disiplin ASN	Terealisasinya pengisian dan pelaporan LP2P	Orang	4.000	4271			
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikan penanganan kasus pelanggaran disiplin	Kasus	30	9			
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Selesaiannya Karis/Karsu ASN	Kartu	100	181			
					Selesaiannya Proses Cerai dan Karis/Karsu ASN	Dokumen	30	13			
				Evaluasi Disiplin ASN	Terealisasinya pelaporan LHKPN	Orang	39	39			
2	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1). Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karier ASN mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan Jabatan Pelaksana. (2). Peningkatan disiplin, integritas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara	Persen	90	102,09			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah data analisa kebutuhan pengembangan Kompetensi ASN di Kab. Sumenep	Dokumen	1	1			
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah data analisa kebutuhan pengembangan Kompetensi ASN diseluruh OPD	OPD	60	74			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional TK II, Administrator, Pegawai dan Manajemen Talent	Orang	382	390			
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Prosentase Pejabat Administrator dan Pegawai yang mengikuti kegiatan Manajemen Talent	Orang	72	82			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tk.II bagi ASN Daerah	Orang	2	2			
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi ASN Daerah	Orang	5	5			
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas bagi ASN Daerah	Orang	5	5			
					Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Diklat Latsar	Orang	298	296	Pada pelaksanaan Diklat Latsar ada 2 orang yang tidak mengikuti. (1 orang meninggal dunia dan 1 orang ditunda kelulusannya)	Didaftarkan Kembali tahun depan untuk mengikuti diklat Latsar	
				Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terinventarisasinya evaluasi pengembangan kompetensi ASN di tiap OPD	Dokumen	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Perangkat Daerah yang disediakan	Persen	100	100			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dilaporkan	Dokumen	7	7			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	7			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun tepat waktu dan akuntabel	Dokumen	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	Orang	66	66			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan keuangan yang disusun	Buku	100	100			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan untuk 2 lokasi (BKPSDM dan SKD)	Jenis	17	17			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Unit	75	75			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jenis	38	38			
					Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Orang	75	75			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan untuk 2 lokasi (BKPSDM dan SKD)	Tahun	1	1			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jenis	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Kali	113	133			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Unit	82	82			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor	Unit	82	82			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Pelayanan Kantor						
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	Surat	10.000	10.029			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 2 lokasi (BKPSDM dan SKD)	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja non PNS	Orang	25	25			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional dan gedung bangunan yang dipelihara	Unit	15	15			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	13	13			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	m2	1.200	1.200			
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang holistic, teknokratik dan partisipatif	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program/ Kegiatan RPKD yang diakomodir dalam PPAS	%	100	100			
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan disusun tepat waktu	Dokumen	4	4			
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah SKPD yang diverifikasi selaras dengan program Pembangunan Daerah	Kecamatan	58	58			
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menyampaikan usulan kegiatan	Kecamatan	27	27			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu	Laporan	1	1			
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terpenuhi	Dokumen	1	1			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang memenuhi data dan informasi pembangunan	SKPD	58	58			
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun tepat waktu	Laporan	6	6			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan realisasi hibah dan bansos yang disusun	laporan	1	1			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan penyusunan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu	Laporan	1	1			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang difasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	%	100	100			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	laporan	1	1			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Asistensi penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	laporan	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia yang disusun	Laporan	1	1			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun	Laporan	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang disusun	Laporan	1	1			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan Perencanaan	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perencanaan yang disusun	Laporan	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	Laporan	1	1			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	laporan	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Keulayahan yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keulayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Keulayahan yang disusun	Laporan	1	1			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Keulayahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Keulayahan yang disusun	Laporan	1	1			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Keulayahan	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	Laporan	1	1			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	laporan	1	1			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Keuangan disusun tepat waktu	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah disusun tepat waktu	Dokumen	4	4			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS yang disusun	Laporan	2	2			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Laporan	2	2			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun disusun tepat waktu	laporan	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran disusun tepat waktu	laporan	2	2			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Dokumen	13	13			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah disusun tepat waktu	Dokumen	3	3			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan disusun tepat waktu	Dokumen	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Dokumen	3	3			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Internal Perangkat Daerah disusun tepat waktu	Dokumen	4	4			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN mengikuti pelatihan	ASN	10	10			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	ASN	10	10			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Pelayanan administrasi umum Aparatur	Jenis	5	5			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli	item	4	4			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	item	4	4			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang dibeli	item	22	22			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	cetak	77	77			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan publikasi yang disediakan	exemplar	15	15			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dihadiri	kali	120	120			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata	meter lari	80	80			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan yang dibeli	Jenis	2	2			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang dibeli	item	3	3			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	item	5	5			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disediakan	Komponen	3	3			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	item	4	4			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jenis	1	1			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pajak	Jenis	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Jenis	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Gedung	1	1			
4	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang inovatif	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti	%	100	100			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang disusun	laporan	1	1			
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan yang di selesaikan	Kajian	13	13			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di selesaikan	Kajian	3	3			
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang disusun	laporan	1	1			
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Hasil kajian Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang disusun	laporan	1	1			
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi disusun	Laporan	1	1			
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah laporan kegiatan inovasi dan penerapan teknologi yang disusun	laporan	1	1			
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan penyusunan jurnal penelitian hasil kelitbangan yang disusun	laporan	1	1			
5	Keuangan	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	90	88			
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen Rancangan perencanaan anggaran belanja Daerah dan perubahan anggaran belanja daerah	%	100	100			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang selaras dengan APBD	Dokumen	58	58			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKP	Jumlah dokumen DPPA yang selaras dengan Perubahan APBD	Dokumen	58	58			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengikaban APBD	Jumlah Perda APBD dan Perbup Pengikaban APBD yang disusun	Perda Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengikaban Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perbup Perubahan Pengikaban APBD yang disusun	Perda Perbup	1 Perda Perubahan dan 1 Perbup Perubahan	1 Perda Perubahan dan 1 Perbup Perubahan			
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pendapatan Daerah	Dokumen	2	2			
				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota		OPD	58	58			
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Perbendaharaan Yang dikelola Daerah	%	95	95			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan kas daerah	Laporan	6	6			
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	Dokumen	183	183			
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan realisasi pengeluaran dana peimbangan dan dana transfer lainnya	Laporan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga /DFK	Jumlah laporan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran phsk ketigs (PFR)	Laporan	12	12			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	%	95	95			
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan	Dokumen	58	58			
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian laporan keuangan daerah	%	100	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas	Dokumen	8	8			
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Dokumen	3	3			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD K		Dokumen	1	1			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen	58	58			
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		%	95	95			
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Penyaluran Bantuan Keuangan desa sesuai dengan usulan	%	95	95			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		%	95	95			
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota		%	95	95			
				Program Pengelolaan Barang Milik daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90	90			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah data OPD penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	58	58			
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah daftar aktiva tetap se Kabupaten Sumenep	Dokumen	1	1			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan data pengamanan asset/ barang milik daerah se Kabupaten Sumenep	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah data perubahan status Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1			
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Daerah	%	2	2			
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	%	2,84	2,84			
				Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Penyusunan Potensi Penerimaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Penyusunan dan Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah	Regulasi	1	1			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	kali	20	20			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak Daerah Lainnya/PDL yang terupdate	Pajak Daerah	7	7			
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Data Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang terupdate	Pajak Daerah	2	2			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah	Pajak Daerah	2	2			Berdasarkan struktur pendapatan bahwa secara proporsi PAD terhadap APBD sekitar 10%. Selain itu 70% PAD bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah. Sehingga dalam kondisi ini Kabupaten masih jauh dari mandiri. Sedangkan untuk pencapaian target PAD dapat kami sampaikan bahwa secara keseluruhan untuk tahun 2020 memang mencapai, namun demikian tingginya perolehan PAD tidak lepas dari kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah seperti Rekening Bunga Deposito, JKN dan BLUD. Sementara kontribusi dari sektor yang secara umum dianggap potensial seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih minim. Sementara untuk tahun 2021 Pemerintah kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa upaya seperti mengerjakan sosialisasi Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan beberapa kegiatan inovasi dalam pemungutan Pajak Daerah, seperti PBB P2, BPHTB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, termasuk penerapan Elektronifikasi Transaksi
											Penerimaan Daerah (ETP) dalam hal penerimaan dengan model Non Tunai. Namun demikian ikhtiar untuk mengoptimalkan penerimaan PAD khususnya Pajak daerah dan Retribusi Daerah pada tahun masih terkendala adanya Pandemi Covid-19.
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis	10	10			
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Data Pelaporan jenis Wajib Pajak Self Assignment yang terverifikasi	Pajak Daerah	7	7			
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah jenis Pajak Daerah yg dilakukan penagihan	Pajak Daerah	10	10			
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Pajak Daerah	9	9			
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan Wajib Pajak Daerah	Kegiatan	24	20	Banyak proses pemeriksaan pajak tidak dilaksanakan untuk mengurangi kontak fisik selama pandemi Covid-19		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	%	90	90			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan capaian Kinerja yang terusun	%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan	Laporan	4	4			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	86	86			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang terverifikasi	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	90	80	Tahun 2021 terdapat pandemic yang mengakibatkan tidak terlaksananya pendidikan dan bimbingan seperti sebelumnya		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Orang	5	4			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Orang	20	15			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90	85			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Item	10	10			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	20	20			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Jenis	10	10			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	Paket	1	1			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	Kali	50	50			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur	meter kaki	100	100			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik daerah	%	90	90			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	10	6	Ada beberapa unit yang tidak sesuai dengan harga di lapangan dan Ada unit yang harus indent 3 bulan		
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	2	2			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	90			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Tagihan	4	4			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	90	90			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	Unit	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	50			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2			

3.1.6 Pelaksanaan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tabel 3. 6
Pelaksanaan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengawasan	Inspektorat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	%	60	60			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP >= BB	%	50	50			
					Jumlah kegiatan pengawasan bersifat mandatory yang berhasil dilaksanakan	kali	10	10			
					Persentase kesesuaian LKPD dengan SAP	%	75	75			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	85	80			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan (Audit KepatuhanPBJ = 1, Audit ketaatan(responsif gender) = 60,Monev Pemulihan Ekonomi Nasional = 20,Monitoring dana BOS = 5, Pemeriksaan KasOpname = 51, Probitiy Audit = 8	laporan	145	145			
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Kinerja dan Keuangan	laporan	50	50			
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan	laporan	1	1			
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa	laporan	60	60			
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan penilaian telaah sejawat	kali	4	4			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Pelaksanaan Monev TLHP BPK RI danAPIP	kali	2	2			
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kerugian daerah dan PDDT	%	75	75			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Kerugian Negara/Daerahyang terselesaikan	laporan	10	10			
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penanganan dan Penyelesaian PDDT	laporan	15	15			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	70	70			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rumusan kebijakan teknis yang dihasilkan	laporan	20	20			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	laporan	10	10			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	%	10	10			
				Pendampingan dan Asistensi		%	75	75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaporkan	laporan	12	12			
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaporkan	laporan	15	15			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah penanganan dan penyelesaian laporan	laporan	20	20			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan asistensi percepatan penyerapan APBD	laporan	24	24			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	95	95			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	%	95	95			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	dokumen	2	2			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA yang disusun tepat waktu	dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	1	1			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	kali	12	12			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan	dokumen	65	65			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan	laporan	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	laporan	1	1			
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disusun sesuai ketentuan	laporan	2	2			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mempunyai keterampilan dan keahlian	%	100	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan	orang	65	65			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang didata	orang	65	65			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	orang	35	35			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	%	95	95			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	macam	15	15			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	macam	20	20			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	macam	10	10			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	macam	20	20			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	paket	15	15			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	kali	10	10			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	kali	45	45			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana penunjang yang laik fungsi	%	98	98			
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	paket	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	paket	1	1			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase jasa penunjang yang laik fungsi	%	95	95			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengantar surat	tahun	3200	3200			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	tahun	1	1			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga outsourcing yang disediakan	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana yang laik fungsi	%	95	95			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	tahun	1	1			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	tahun	1	1			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	paket	1	1			

3.1.7 Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

Tabel 3. 7
Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Kewilayahan	Kecamatan Pasongsongan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENYELENGGA- RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	90	100			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan	Dokumen	500	500			
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	<i>Jumlah dokumen perijinan non usaha yang Dikeluarkan</i>	Dokumen	500	500			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	%	90	100			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2			
				<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang Desa</i>	Desa	10	10			
				<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Peserta Sosialisasi / Bimtek Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</i>	Desa	10	10			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	%	90	100			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kali	15	15			
				<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan</i>	Kali	12	12			
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Kegiatan Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan</i>	Keg	3	3			
				PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	%	90	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	2	2			
				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan</i>	Kegiatan	1	1	Belanja Alat/Bahan tidak terserap maksimal	Belanja Alat/ Bahan untuk Keg. menggunakan bahan tahun sebelumnya guna efisiensi anggaran	
				<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	<i>Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan SARA Pembekalan</i>	desa	10	10			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan	%	90	100			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	90	100			
				<i>Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnua</i>	desa	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	desa	10	10			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	desa	10	10			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades	desa	3	3			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi	desa	10	10			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi Tugas, Fungsi dan Kewajibannya	desa	10	10			
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	desa	10	10			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	desa	10	10			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	90	99,52	Adanya PNS yang Pensiun sebanyak 3 Orang dan Sub Keblatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	3	3			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	Laporan	2	2			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	20	20			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	125	125			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Item Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Jenis	9	9			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang Disediakan	Jenis	12	12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	Paket	2	2			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	88	86	Perdin Luar Daerah tidak terserap maksimal karena adanya pandemi COVID-19 dan sifatnya penyediaan	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	36	36			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	34	34			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	1	1			
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet</i>	<i>Rekening</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	23	23			
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola</i>	<i>Unit</i>	<i>6</i>	<i>6</i>			
				<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan</i>	<i>Unit</i>	<i>14</i>	<i>14</i>			
				<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara</i>	<i>Unit</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
	Kecamatan Kaliangit		1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Dan PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	100 %	100 %	99,98%	Jumlah anggaran relative terbatas	penerapan prinsip efisiensi dan skala prioritas	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu		100 %	99,98%			
				<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>100 %</i>	<i>99,98%</i>			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan	100 %	100 %	99,89%	Masih adanya proyek/ program bantuan, yang pelaksanaannya tidak melalui Kecamatan, sehingga kami tidak dapat melaporkan keseluruhan proyek yang masuk ke Kecamatan	adanya informasi Program/ Proyek bantuan lewat Kecamatan sehingga kami dapat melaporkan keseluruhan proyek yang masuk ke Kecamatan	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase keterlibatan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam pembangunan		100 %	99,89%			
				<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah ASN yang melakukan pendampingan Pelaksanaan MUSDES di Desa se Kecamatan</i>	<i>10 Orang</i>	<i>100 %</i>	<i>99,89%</i>			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	99,98%	Pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya	Melakukan efisiensi terhadap kegiatan dan meningkatkan kualitas kegiatan itu sendiri.	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 %	99,98%			
				<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal</i>	<i>Jumlah Rapat Koordinasi Kamtibmas Forpinka dan Tokoh masyarakat yang dilaksanakan</i>	<i>12 Kali</i>	<i>100 %</i>	<i>100%</i>			
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh yang dilakukan di Kecamatan</i>	<i>2 Kali</i>	<i>100 %</i>	<i>99,92%</i>			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	100 %	100 %	99,97%	Koordinasi yang belum optimal antara Kantor Kecamatan Kaliangit dengan Dinas/Instansi yang terkait.	Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan		100 %	99,97%			
				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar (HUT Proklamasi) yang dilaksanakan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>100 %</i>	<i>99,97%</i>			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	100 %	100 %	96,36%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa		100 %	96,36%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	3 Desa	100 %	96,36%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100 %	100 %	99,92%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100 %	99,93%			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Barang Perlengkapan Kantor yang dibelanjakan	2 Unit	100 %	99,87%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Peralatan Kantor yang di belanjakan	5 Unit	100 %	99,95%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	85,33%	Kurang memadainya sarana dan prasarana pelayanan di kantor Kecamatan	Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian laporan Kinerja OPD tepat waktu		100%	99,90%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	100%	99,90%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang Disusun Tepat Waktu	1 Dokumen	100%				
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun Tepat Waktu bangunan	1 Dokumen	100%	99,93%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ yang disusun dengan tepat waktu	3 Dokumen	100%	99,92%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	Tahun	100%	84,25%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase terpenuhinya pembayaran Gaji dan Tunjangan, Laporan capaian Kinerja serta Laporan Keuangan Bulanan	Bulan	98%	84,25%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas ASN		100%	99,86%			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenakapannua	Jumlah pakaian Batik dan Olahraaa uana disediakan	30 Orang	100%	99,86%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	99,86%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	270 Barang	100%	99,86%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	86 Item	100%	99,99%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Mamin Rapat dan Tamu serta Belanja Jasayang disediakan	1 Tahun	100%	100%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang disediakan serta pameran pembanaunan	3 Jenis Kegiatan	100%	100%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka serap informasi dari luar daerah	9 Orang	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran		100%	85,97%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim dan diterima selama satu tahun	1500 Surat	100%	99,97%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Iuran yang Terbayarkan	3 Jenis Laggana n	100%	70,93%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya peralatan dan sarana prasarana operasional ASN dalam satu Tahun		100%	99,99%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	4 Unit	100%	100%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Perlengkapan Kantor yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	29 Unit	100%	99,97%			
		Kecamatan Bluto	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu				Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, SDM sangat rendah dan Sering terjadinya kekurangan berkas dari pemohon	Melengkapi sarana dan prasara di ruang Pelayanan Publik agar memudahkan masyarakat dalam mengurus berkas permohonan	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan</i>	bin	12	12			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan				Kurangnya peserta yang hadir dalam pelaksanaan musrenbangdes di desa	Kecamatan Bluto dalam hal ini Kasi Pemberdayaan dan Masyarakat Desa mengadakan pembinaan dan pendampingan bersama dengan Pendamping Lokal Desa (PLD)	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa						
				<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam</i>	Kegiatan	1	1			
				<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan (PKK)</i>	Kegiatan	1	1			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Peserta yang hadir dalam acara dibatasi kehadirannya sebanyak 50 % hal ini karena protocol kesehatan	Memberikan pemahaman kepada para peserta bahwa acara Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tidak semuanya diundang berkenaan dengan Aturan Protokol Kesehatan seperti tahun sebelumnya karena pandemic Covid-19	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum						
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Rutuin Forum Ulama dan Umara di Kecamatan</i>	Kegiatan	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kecamatan				Pelaksanaan Upacara Bendera dalam Rangka HUT RI. Di tiadakan hal ini karena disebabkan dalam masa Pandemi Covid 19. Sehingga anggaran yang tersedia dialihkan ke kegiatan yang lain	Anggaran yang tersedia dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan gedung kantor	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksannnya Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunagaal Ika</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT Kemerdekaan RI</i>	Kegiatan	1	1			
				<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiona</i>	<i>Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	Kegiatan	1	1			
				<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Tugas Forpimka</i>	Kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase tata kelola pemerintahan desa				beberapa Kegiatan yang ditiadakan terkendala masa pandemic Covid 19, dan Upaya pengalihan Anggaran ke Kegiatan lain	Meningkatkan realisasi program dan kegiatan sesuai anggaran yang ada di DPA,	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa						
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Rapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa (Sosialisai Pengelolaan Keuangan Desa)	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Terlaksananya Sosialisai BUMDes dan Wirausaha Muda	Kegiatan	1	1			
								95%	90,42%		
								95%	90,32%		
								95%	99,50%		
								100%	100%		
				1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021						
				BELANJA DAERAH							
				BELANJA OPERASI							
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Rakor penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan			100%	100%		
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Jumlah Rapat Koordinasi yang laksanakan	Kegiatan	1	1			
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			95%	99,07%		
				<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan</i>	Jumlah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi	350	428			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				95%	99,96%		
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa			100%	100%		
				<i>Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Jumlah Desa yang melakukan perencanaan pembangunan desa melalui Musdes	orang	12	12			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	jumlah Rakor pemberdayaan lembaga kemasyarakatan			100%	100%		
				<i>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</i>	jumlah pembinaan yang dilaksanakan kecamatan	Kali	12	12			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum				95%	99,95%		
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	jumlah kegiatan Rakor penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum			95%	99,95%		
				<i>Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Rakor Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum Masyarakat yang dilaksanakan	kali	12	12			
				<i>Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Jumlah Pelaksanaan Rakor Forum Ulama dan Umaroh	kali	2	2			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				0%	0%		
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah kegiatan pelaksanaan wawasan kebangsaan			0%	0%		
				<i>Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i>	Jumlah kegiatan kebangsaan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	Kegiatan Pameran Pembangunan dan Hari Jadi tidak dapat dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan lainnya	Dialihkan ke kegiatan Pemeliharaan Bangunan	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				90%	93,32%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan fasilitas kapasitas dan penguasaan aparatur pemerintahan desa yang dilaksanakan		90%	93,32%			
				<i>Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah desa yang diberikan fasilitas pendampingan SIKUIDES</i>	<i>Desa</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
				<i>Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah Fasilitas Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa</i>	<i>Desa</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
				<i>Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>jumlah Desa melakukan pemilihan kepala desa</i>	<i>Desa</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>Honor Camat tidak dapat diserap karena berbentur dengan Perbup APBD (ASN tidak diperbolehkan mendapatkan honorarium)</i>		
				<i>Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>jumlah desa yang diberikan pendampingan pengelolaan DD dan ADD</i>	<i>Desa</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			90%	89,98%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			90%	88,46%			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Terpenuhi atas Gaji dan Tunjangannya</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu</i>	<i>Laporan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			95%	98,30%			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu</i>	<i>Dokumen</i>	<i>15</i>	<i>15</i>			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tepat waktu</i>	<i>Dokumen</i>	<i>15</i>	<i>15</i>			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tepat waktu</i>	<i>Dokumen</i>	<i>15</i>	<i>15</i>			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tepat waktu</i>	<i>Dokumen</i>	<i>15</i>	<i>15</i>			
				<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun</i>	<i>Laporan</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90%	90,89%			
				<i>Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya</i>	<i>Jumlah pegawai yang diberikan fasilitas pakaian dinas</i>	<i>Orang</i>	<i>17</i>	<i>17</i>			
				<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pim</i>	<i>Orang</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			95%	99,83%			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>jumlah Jenis komponen listrik yang dibeli</i>	<i>Jenis</i>	<i>38</i>	<i>38</i>			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik</i>	<i>Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan</i>	<i>kali</i>	<i>36</i>	<i>36</i>			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah jenis Bahan Bacaan Majalah dan Koran berlangganan</i>	<i>Jenis</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			
				<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>155</i>	<i>155</i>			
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			<i>100%</i>	<i>97,48%</i>			
				<i>Sub Kegiatan Pengadaan Meubele</i>	<i>Jumlah meja rapat yang dibeli</i>	<i>unit</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				<i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Pengadaan Barang Peralatan yang dibeli</i>	<i>Unit</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	97%			
				<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Bulan Terpenuhinya Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet</i>	<i>Bulan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menuurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Surat	1000	1336			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Alat dan bahan kebersihan yang dibelanjakan	Jenis	25	25			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			95%	99,86%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III dan IV yang dipelihara	unit	8	8			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Barang Peralatan dan Mesin yang di pelihara	unit	23	23			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas bangunan dan gedung serta lahan parkir yang dipelihara	M2	550	550			
		Kecamatan Kota Sumenep	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	persen	95	99			
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	100	100			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kelompok masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	persen	80	100			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pembinaan dan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	persen	85	89			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi umum yang tepat waktu	persen	95	100			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang di fasilitasi	desa	3	3			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Persen	80	94			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	8	8			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	2	2			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel untuk Kantor yang di beli	set	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan <u>Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	Jumlah peralatan Kantor yang diadakan	unit	2	2			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas <u>Operasional atau Lapangan</u>	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	paket	1	1			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	Persen	85	99,5			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana <u>Kelurahan</u>	Jumlah sarana prasaran Kelurahan yang di bangun	paket	4	4			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	jenis	4	4			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	3	3			
		KELURAHAN KEPANJIN		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Persen	80	94			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut <u>Kelengkapannya</u>	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Batik yang diadakan	stel	9	9			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	4	4			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	8	8			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	2	2			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	jenis	2	2			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan <u>Mebel</u>	Jumlah kursi yang di beli	buah	9	9			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan <u>Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	Jumlah peralatan Kantor yang diadakan	unit	2	2			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	jenis	3	3			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa <u>Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan <u>Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	jenis	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan <u>Lainnya</u>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	paket	2	2			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	Persen	85	95			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang di bangun	paket	8	8			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	jenis	10	10			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	3	3			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	kegiatan	1	1			
		KELURAHAN BANGSELOK		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Persen	80	96			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Batik yang diadakan	stel	13	13			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	1	1			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	8	8			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	2	2			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel untuk Kantor yang di beli	buah	2	2			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang diadakan	unit	5	5			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	unit	6	6			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	paket	1	1			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitas dan Pembinaan Kecamatan	Persen	85	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang di bangun	paket	7	7			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	jenis	7	7			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	3	3			
		KELURAHAN KARANGDUAK		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Persen	80	94			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Batik yang diadakan	stel	20	20			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	jenis	1	1			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	3	3			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	3	3			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	Jumlah kursi yang di beli	set	1	1			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang diadakan	unit	5	5			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	jenis	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan berizin	unit	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	jenis	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	paket	2	2			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	Persen	85	96			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang di bangun	paket	10	10			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	jenis	9	9			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	1	1			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	jenis	3	3			
		KELURAHAN PAJAGALAN		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	Persen	90	99,5			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diadakan	jenis	2	2			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kaos Olahraga yang diadakan	stel	20	20			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	18	18			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	3	3			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	2	2			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	2	2			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang di beli	jenis	8	8			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	jenis	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Layanan kebersihan yang dibayar	jenis	2	2			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Layanan Umum yang dibayar	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Pelihara	unit	5	5			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di Pelihara	jenis	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	M2	372	372			
								100%	87,59%		
								100%	87,61%		
								100%	98,97%		
								100%	98,97%		
								100%	98,13%		
								100%	99,80%		
								100%	99,87%		
								100%	99,87%		
								100%	99,97%		
								100%	99,62%		
								100%	93,07%		
								100%	93,07%		
								100%	93,07%		
								100%	99,97%		
								100%	99,97%		
								100%	100%		
								100%	99,92%		
								100%	100%		
								100%	87,12%		
								100%	87,12%		
								100%	85,49%		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%	99,92%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat			100%	99,92%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	Jumlah Desa Sasaran Pelaksanaan Kegiatan	Desa	100%	99,92%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penyelesaian Laporan Kinerja OPD tepat waktu	Dokumen	100%	86,72%			
				Administrasi Keuangan dan Perangkat daerah			100%	85,78%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang terpenuhi pembayaran gaji dan tunjangan	Orang	100%	85,78%			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah			100%	98,64%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kali	100%	98,64%			
				Administrasi Keuangan Perangkat daerah			100%	98,88%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kali	100%	98,88%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	89,94%			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	Stel	100%	89,94%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	90,37%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	Komponen	100%	99,99%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas	Unit	100%	99,76%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa Kantor yang tersedia	Jenis	100%	99,94%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Exemplar	100%	44,21%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan atas kegiatan Rakor dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jenis	100%	84,86%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	92,99%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	100%	89,99%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan dalam kegiatan surat menyurat	Jenis	100%	99,13%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	99,42%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Unit	100%	99,01%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	100%	98,24%			
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas	Unit	100%	100%			
				KECAMATAN GANDING			%	100	95,46		
				1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BELANJA DAERAH		%	100	95,4		
				2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 75 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	BELANJA OPERASI		%	100	99,98		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%	100	99,96		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan		%	100	99,96		
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Upaya Kegiatan dalam Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Keg	5	5		
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		%	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Instansi Vertikal yang di laksanakan	Kegiatan	20	20			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		%	100	99,92			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		%	100	99,92			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan	Keg	14	14			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	99,92			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		%	100	99,92			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro yang dilaksanakan	Keg	5	5			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		%	100	99,97			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		%	100	99,97			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang diberikan fasilitasi pendampingan SISKEUDEDES	Desa	14	14			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang telah difasilitasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Desa	14	14			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang telah difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Desa	14	14			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Desa yang telah difasilitasi dalam pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Desa	14	14			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang diberikan pendampingan pengelolaan DD dan ADD	Desa	12	12			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	95,19			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	100		-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	94,59			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	Orang	21	21			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	99,68			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pemenuhan Pakaian dinas dan Atribut	orang	23	23			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	100	99,97			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Jenis komponen listrik yang dibeli	Jenis	8	8			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	kali	12	12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	lembar	4000	3985			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan Majalah dan Koran berlangganan	Jenis	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	25	25			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	99,69			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	23	23			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD	desa	11	11			
				PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang terlayani Administrasi Keuangannya	org/th	29	29			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	dok	20	20			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu	dok	6	6			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	35	35			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	komponen	16	16			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	jenis	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat Yang Disediakan	bln	12	12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetakan dan pengandaan yang diadakan	lbr	22200	22200			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	paket	24	24	Kegiatan Pameran ditidakan sehubungan dengan Masa PPKM	Dialihkan dengan PAK 2021 pada Kegiatan Pemerlihaaran Gedung Kantor	
					Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Yang Dikuti	keg	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	kali	246	246			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	rek	3	3	Kelebihan Penganggaran untuk Rekening Listrik	Dikembalikan Ke Kasda	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	unit	6	6			
					Jumlah Tenaga Supir Yang Bertugas	org	1	1			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	unit	20	20	Tambahan dana dari PAK Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	M2	262	262			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	unit	6	6			
				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan Yang Diadakan	unit	8	8			
				1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan	BELANJA DAERAH						
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	
			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>				
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
					<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>8</i>	<i>8</i>			
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
					<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
					<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	<i>Jumlah kegiatan Bimtek yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
					<i>Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Keg</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Peranakat Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pilkades yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan MUSrenbangcam dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Rakon PKK dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
					<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan Monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Prosentase Peningkatan kapasitas ASN</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Prosentase Penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu</i>	<i>%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya</i>	<i>Orang</i>	<i>20</i>	<i>20</i>			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Bahan Kebersihan kantor</i>	<i>Jenis</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Prosentase Pemenuhan Pakaian dinas dan Atribut</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>			
					<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah item/jenis komponen yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>8</i>	<i>8</i>			
					<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>10</i>	<i>10</i>			
					<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>			
						<i>jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan</i>						
					<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>2</i>	<i>2</i>			
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan</i>	<i>Keg.</i>	<i>124</i>	<i>124</i>				
				<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Rekening yang dibayarkan</i>	<i>Jenis.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>				
				<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas</i>	<i>Unit</i>	<i>7</i>	<i>7</i>				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	Unit	10	10			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jenis	3	3			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang di pelihara	Bangunan	2	2			
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer yang diadakan	unit	1	1			
				BELANJA DAERAH							
				Belanja Operasi							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				<i>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah desa yang dimonitoring pelaksanaan pelayanannya kepada masyarakat</i>	<i>Kali</i>	<i>13 Kali</i>	<i>13 Kali</i>			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	%	100	100			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa</i>	<i>Kali</i>	<i>8 Kali</i>	<i>8 Kali</i>			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>1 Kali</i>	<i>1 Kali</i>			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	1	1			
				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Proesentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				<i>Fasilitasi, Pelaksanaan Pemulihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah desa yang melaksanakan Pemulihan Kepala Desa</i>	%	100	100			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	83,99			
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah	Laporan	1	1			
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan</i>	Dokumen	8	8			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	4	4			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangan	Bulan	12	12	Adanya PNS yang Meninggal sebanyak 2 Orang dan Sub Keblatan ini sifatnya penyesuaian sehingga tidak teresap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun	Laporan	12	12		-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	18	18		-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	4	4			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	11	11		-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Item	7	7		-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2 Jenis	2 Jenis		-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	135 Kali	135 Kali		-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan						
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit	4 Unit	4 Unit		-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	12 Unit	12 Unit		-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	1	1			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Tagihan/Rekening	12	12		-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	jenis	3	3			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Meter2	250 M2	250 M2		-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	4 Unit	4 Unit		-	-
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	16 Unit	16 Unit		-	-
	Kecamatan Arjasa		1. Perda Kab Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang APBD TA 2020	BELANJA DAERAH							
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	Jumlah ASN yang terpenuhi pembayaran Gaji, Tunjangan	ASN	28	28		-	-
				BELANJA LANGSUNG							
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2.000	1.332		-	-
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12		-	-
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	9	9		-	-
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	5	5		-	-
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12		-	-
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12		-	-
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	78	72		-	-
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKARAN antar Kegiatan	-
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenepl)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKARAN antar Kegiatan	-
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang ditugaskan	Personel	1	1		-	-
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	247	247		-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	4	4		-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	8	8		-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas)	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	40	40		-	-
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	34	34		-	-
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)	Jumlah Pakaian Olah Raga yang dibeli	Stell	34	34		-	-
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	Jumlah kegiatan desk yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3		-	-
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan	Kali	1	-	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKARAN antar Kegiatan	-
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	4	4		-	-
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (e-planning))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	4	4		-	-
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	92,53			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	6	6			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	ASN	336	336			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	20	20			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Kali	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Stel	28	28			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	72	72			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneraan Banaunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jenis	338	338			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jenis	160	160			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jenis	348	348			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan Yang diadakan	Jenis	22.200	22.200			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Jenis	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	294	294			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Jenis	5	5			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	unit	2	2			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Unit	3	3			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	48	48			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	48	48			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	57	56			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unit	17	17			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	36	36			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	Unit	1.265	1.265			
	Kecamatan Batuan		1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Keg	8	8			
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbangcam dan Musrenbangdes yang dilaksanakan	Keg	7	7			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			1	1			
				Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			13	13			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			13	13			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Forpimka dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan	Kali	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan di Kecamatan	Keg	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Keg	2	2			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Keg	1	1			
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar (Pameran Pembangunan, HUT Proklamasi dan Hari Jadi Kabupaten Sumenep) yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Keg	74	74			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Keg	74	74			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Fasilitasi Pendampingan ADD dan DD	ASN	70	70			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Keg	3	3			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Keg	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Keg	430	424			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keg	28	22			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Kecamatan yang dibayarkan atas Gaji dan Tunjangan Lainnya	ASN	28	22			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keg	2	2			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Keg	28	28			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang diberikan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olahraga	ASN	28	28			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keg	319	319			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibelanjakan dalam satu Tahun	Jenis	9	9			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor yang di Belanjakan	Unit	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makan dan minum yang disediakan	Unit	198	198			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bacaan Koran dan Majalah yang dibelanjakan dalam satu Tahun	Jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan luar daerah	ASN	98	98			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Keg	9	9			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	9	9			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg	37	37			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan Listrik	Rekening	2	2			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis ATK yang disediakan	Unit	35	35			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keg	7	7			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Unit	1	1			
				Pemeliharaan Peralatan dan Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Unit	4	4			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Unit	2	2			
				BELANJA DAERAH							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan di kecamatan	Persen	100	100			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	900	867			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Rekomendasi Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Dokumen	900	867			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Kecamatan	Persen	100	99,95			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kali	14	14			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbangcam dan Musrenbangdes yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2			
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pertemuan Rutin Pembinaan dan Pemberdayaan PKK Desa yang dilaksanakan	Kali	12	12	Adanya peserta yang tidak hadir walaupun dlm jumlah yang sangat sedikit (ada sisa dana Mamin)	Peningkatan koordinasi dengan pengurus TP. PKK Desa	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kerjasama penanganan ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Persen	100	100			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	6	6			
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang dilaksanakan	Kali	6	6			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jml Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan di Kecamatan	Kali	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	-	0	0			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	-	0	0			
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan (Pameran pembangunan, HUT Proklamasi dan Hari Jadi Kabupaten Sumenep)	-	0	0			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	Persen	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Persen	100	100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kali	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	93,78			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	9	9			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tepat waktu	Dokumen	1	1			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Dokumen	3	3			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	4	4			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Kecamatan yang dibayarkan atas Gaji dan Tunjangan Lainnya	Orang	22	22	Sub Keblatan ini sifatnya penyediaa sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun Tepat Waktu	Laporan	4	4			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	2	2			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) yang Dilaksanakan	Kali	14	14			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Stel	56	56			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Jenis	5	5			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item/jenis komponen yang disediakan	Item/Unit	159	159			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	Item/Unit	240	240			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai yang Disediakan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang Disediakan	Eksemplar	24	24			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan	Kali	192	192	Perdin Luar Daerah tidak terserap 100% karena adanya pandemi COVID-19 Yang membatasi mobilitas masyarakat	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	37	37			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	Unit	37	37			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	2	2			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan diterima selama 1 tahun	Surat	2025	2015	Target kinerja berdasarkan jumlah register surat pada tahun sebelumnya	Dijadikan acuan untuk penentuan target kinerja pada TA. berikutnya	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan Iuran yang Terbayarkan (Sumberdaya Air, Listrik, Telepon dan Internet)	Bulan	12	12	Dana yang disediakan berdasarkan estimasi tahun sebelumnya dan berdasarkan kebutuhan	Dijadikan acuan untuk rencana penyediaan dana pada TA. berikutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	21	21			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan secara berkala	Kali	6	6	Pemeliharaan berdasarkan kondisi fisik mobil	Dijadikan acuan untuk rencana penyediaan dana pada TA. berikutnya	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	15	Terdapat sisa anggaran pemeliharaan	Dijadikan acuan untuk rencana penyediaan dana pada TA. berikutnya	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	M ²	1019	1019	Penyusunan anggaran berdasarkan koefisien sehingga ada sisa anggaran walaupun sangat kecil	Dijadikan acuan untuk rencana penyediaan dana pada TA. berikutnya	
		KECAMATAN SARONGGI	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	99,96%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang dikeluarkan	Dokumen	60	60			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen yang Direkomendasi	Dokumen	500	500			
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100,00%	100,00%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Keg	14	14			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan desa	Orang	200	200			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	ASN					
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	15	15			
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan kecamatan	Lembaga	6	6			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100,00%	100,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	13	13			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro Yang Dilaksanakan	Kali	2	2			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100,00%	100,00%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	8	8			
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari besar	Orang					
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Keg	6	6			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100,00%	97,04%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Keg	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD	Desa	14	14			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Desa	6	6			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Musrenbang	Desa	14	14			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	90,68%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	6	6			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	ASN	288	288			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	20	20			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Unit	33	33			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	ASN					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Brg	72	72			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Unit	149	149			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Unit	818	818			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Unit	12.588	12.588			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang diadakan	Unit	22.200	22.200			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Unit	24	24			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	284	284			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	7	7			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Unit	4	4			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang diadakan	Unit					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dipelihara	Unit	3	3			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	24	24			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	24	24			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	30	30			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unit	17	17			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	10	10			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	M2	595	595			
		Kecamatan Lenteng	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	BELANJA DAERAH		%	100	90,38			
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Keg	1	1			
				Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Keg	1	1			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umara yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah kegiatan Bimtek yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Desa	20	20			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pilkades yang dilaksanakan	Desa	8	8			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan MUSrenbangcam dilaksanakan	Desa	20	20			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Rakon PKK dilaksanakan	Desa	20	20			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	Desa	20	20			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan kapasitas ASN	%	100	89,89			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	Orang	19	19		-	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	%	100	97,34	Realisasi surat masuk tidak sesuai prediksi		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pemenuhan Pakaian dinas dan Atribut	Stel	28	28			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item/jenis komponen yang disediakan	Jenis	10	10			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	8	8			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan	Jenis	1	1			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Keg.	132	132			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas	Unit	1	1			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Unit	20	20			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang di pelihara	M ²	250	250			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Unit	1	1			
	Kecamatan Rubaru		1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	BELANJA DAERAH							
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan Musrenbangdes yang dilaksanakan	Keg	8	8			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan	Keg	8	8			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Peringatan HUT RI yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umara yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian <i>Bhinneka Tunggal Ika</i>							
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pilkades yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pilkades yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pilkades yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pilkades yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Kantor Alat Pendingin, Komputer dan mebel yang diadakan	unit	1	1			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang di pelihara	Bangunan	2	2			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayani administrasi keuangannya	Orang	20	20			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian laporan kinerja OPD tepat waktu	%	100%	100%		-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pemenuhan Pakaian dinas dan Atribut	%	100	100			
				Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item/jenis komponen yang disediakan	Jenis	8	8			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	10	10			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi	Kegiatan	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang disediakan	Jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Keg.	124	124			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Jenis.	2	2			
				Penyediaan Surat Menyurat Serta Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Surat Menyurat Serta barang cetakan dan penggandaan yang diadakan						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas	Unit	7	7			
				BELANJA DAERAH							
				PROGRAM PENYELENGGA- RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan	Dokumen	60	60			
				<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</i>	<i>Jumlah dokumen perijinan non usaha yang dikeluarkan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>60</i>	<i>60</i>			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	9	9			
				<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Peserta Sosialisasi / Bimtek Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>Desa</i>	<i>9</i>	<i>9</i>			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	%	100	100			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kali	4	4			
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Kegiatan Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>4</i>	<i>4</i>			
				PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan	%	100	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kegiatan	1	1			
				<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang Dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Belanja Alat/Bahan tidak terserap maksimal</i>	<i>Belanja Alat/ Bahan untuk Keg. menggunakan bahan tahun sebelumnya guna efisiensi anggaran</i>	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	100	100			
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa	9	9			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	9	9			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Pilkades	Desa	5	5			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Difasilitasi	Desa	9	9			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan dilaksanakan	Desa	9	9			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Diberikan Pendampingan Pengelolaan DD dan ADD	Desa	9	9			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	98,92			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	Adanya PNS yang Pensiun sebanyak 3 Orang dan Sub Kebiasaan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	3	3			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	22	22			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di Sediakan	Unit	25	25			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Item Komponen Instalasi Listrik yang di sediakan	Jenis	8	8			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang di sediakan	Jenis	12	12			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan	jumlah barang cetak dan pengagandaan yang disediakan	Paket	1	1			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	90	89	Perdin Luar Daerah tidak terserap maksimal karena adanya pandemi COVID-19 dan sifatnya penediaan	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	7	7			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	7	7			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Layanan	5	5			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rekening	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	15	15			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	Unit	12	12			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3			
		Kecamatan Sapeken	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi	%	100	85,2			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	100	99,54			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	Pengukuran Kinerja OPD	5	5			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	100	83,32			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14	14			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	100	99,74			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	23	23			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	100	99,87			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	59	59			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	6	6			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	3	3			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang cetakan dan Pengandaan yang diadakan	Jenis	15	15			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	3	3			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	100	99,5			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	5	5			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	100	99,74			
				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	jumlah belanja modal yang diadakan	Unit	2	2			
				Belanja Modal asset Tetap lainnya	jumlah lainnya yang diadakan	Unit	1	1			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	100	99,95			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat Menyurat	Kali	2000	2000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rek	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Tahun	100	99,97			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dikelola	unit	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah yang mengikuti kegiatan	Kali	1	1		-	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						-	-
				Kordinasi rusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisai, Konsultasi)	Jumlah yang mengikuti Bintek	Kali	1	1		-	-
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						-	-
				Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				BELANJA MODAL	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	-
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
				Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan yang dibeli	kali	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah							
				Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan yang dibeli	kali	1	1			
				PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan		22	12	22	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Bulan	12	22		-	-
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Jenis	12	22		-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang dibutuhkan	Jenis	12	22		-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12		-	-
				Penyediaan Komponem Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Koponem Instalasi listrik dan Bangunan yang dibutuhkan	jenis	12	12		-	-
				Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang dibutuhkan	Jenis	12	12		-	-
				Peringatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan yang dibutuhkan	Kegiatan				-	-
				Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat rapat yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12		-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan	12	-		-	-
				Penyediaan jasa Komonikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah psumber daya air dan listrik yang di butuhkan	Unit	12	12		-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang dibutuhkan	Jenisn	12	12		-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan	Kegiatan	12	12		-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Unit	8	8		-	-
				Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	8	8		-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantord dan bangunan lainnya</i>	<i>Jumlah Bangunan atau gedung uana dipelihara</i>	<i>paket</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		-	-
				<i>Penataan Oraanesasi</i>						-	-
				<i>Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tataaksana</i>	<i>Jumlah masyarakat yang melakukan pelayanan</i>	<i>orang</i>	<i>12</i>	<i>12</i>		-	-
							100	98,13			
			Kecamatan Masalembu	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	UNSUR KEWILAYAHAN						
				2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		%	100	100		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keg	4	4			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Yang Dilaksanakan	Keg	1	1			
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		%	100	100		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Keg	4	4			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	Keg	1	1			
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		%	100	99,99		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	15	15			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Dilaksanakan	Keg	1	1			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umara Yang Dilaksanakan	Keg	3	3			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		%	100	99,99		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Keg	8	8			
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bintek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Dilaksanakan	Keg	1	1			
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Keg	12	12			
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		%	100	100		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Keg	13	13			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Sosialisasi Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Dilaksanakan	Keg	1	1			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Desa	1	1			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan Musrenbangdes Yang Dilaksanakan	Keg	1	1			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan TP-PKK Desa Dan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Keg	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD</i>	<i>Desa</i>	4	4			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	88,76			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6			
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu</i>	<i>Dokumen</i>	6	6			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	ASN	156	156			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	20	20			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1			
				<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan</i>	<i>Stel</i>	13	13			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Unit	72	72			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jenis	342	342			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Unit	156	156			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jenis	338	338			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengagandaan Yang diadakan	Unit	22.200	22.200			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Unit	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	267	267			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	14	14			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	Unit	10	10			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Unit	4	4			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	36	36			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rek	36	36			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	63	63			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unit	17	17			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	43	43			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/ Dipelihara	M2	547	547			
				KECAMATAN PRAGAAN	1. Perda Kab Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang APBD TA 2021	BELANJA DAERAH		100	99,09		
				2. Peraturan Bupati	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	4	4	-	-	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	-	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	14	14	-	-	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	99,76	-	-	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	13	13	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umara Yang Dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	8	8	-	-	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang Dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali	4	4	-	-	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	25	25	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Jumlah Sosialisasi Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Desa	3	3	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan Musrenbangdes Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan TP-PKK Desa Dan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali	6	6	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD	Desa	14	14	-	-	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	94,78	-	-		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	6	6	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya	Orang	288	288	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	20	20	-	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenakapannua	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Stel	27	27	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Unit	72	72	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jenis	310	310	-	-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jenis	112	112	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jenis	382	382	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang diadakan	Lembar	22.200	22.200	-	-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Paket	12	12	-	-	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	318	318	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	8	8	-	-	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	Unit	4	4	-	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Unit	4	4	-	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	72	72	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	72	72	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	66	66	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unut	17	17	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	46	46	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	M2	810	810	-	-	
		Kecamatan Kangayan	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		100	100			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100			
				<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang Desa</i>	<i>Desa</i>	9	9			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100			
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Rakor Forum Ulama dan Umaroh yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Rapat koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan Persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang dilakukan pembinaan	%	100	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	100	100			
				<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	<i>Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi)</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah rakor forkopimcam yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	100	100			
				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>Jumlah perangkat desa yang diberikan fasilitasi</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah desa yang mengikuti Musrenbangcam</i>	<i>Desa</i>	9	9			
				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi tugas, fungsi dan kewajibannya</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>Jumlah desa yang diberikan pendampingan pengelolaan DD dan ADD</i>	<i>Desa</i>	9	9			
				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah desa yang melaksanakan pilkades</i>	<i>Kegiatan</i>	1	1			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi	%	100	79,38	Tidak ada Permasalahan dan sudah terealisasi		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	100	100			
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan</i>	<i>Dokumen</i>	5	5			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	100	76,76			
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN</i>	<i>Bulan</i>	14	14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	100	99,08			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenakapannua	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	17	17			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	100	96,64			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	15	15			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	6	6			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	6	6			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan		12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	3	3			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	100	99,63			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	15	15			
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	100	99,89			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kali	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Tahun	100	99,85			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dikelola	unit	8	8			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	5			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	M2	160	160			
							100	97,27			
				KECAMATAN GILIGENTIN G	1. Perda Kab Sumenep Nomor Tahun 2020 ttg APBD TA 2021	BELANJA DAERAH					
					2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 ttg Perubahan APBD TA 2021	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kali	4	4	-	
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	%	100	100	-	
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	8	8	-	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	99,9	-	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	13	13	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>	<i>Jumlah Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	-	-	
				<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	<i>Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umoro Yang Dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	
				<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	-	-	
				<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	-	-	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	
				<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	-	-	
				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)</i>	<i>Desa</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	-	-	
				<i>Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa</i>	<i>Jumlah Pembinaan Musrenbangdes Yang Dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	-	-	
				<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah Pembinaan TP-PKK Desa Dan Kecamatan Yang Dilaksanakan</i>	<i>Kali</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	-	-	
				<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	<i>Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD</i>	<i>Desa</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	83,73	-	-	
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun</i>	<i>Dokumen</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	-	-	
				<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu</i>	<i>Dokumen</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	-	-	
				<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun</i>	<i>Laporan</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	-	-	
				<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuangannya</i>	<i>Orang</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	-	-	
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu</i>	<i>Dokumen</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	-	-	
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	-	-	
				<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan</i>	<i>Stel</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	-	-	
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi</i>	<i>Unit</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	-	-	
				<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banaunan Kantor</i>	<i>Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>312</i>	<i>312</i>	-	-	
				<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-	-	
				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan</i>	<i>Jenis</i>	<i>378</i>	<i>378</i>	-	-	
				<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	<i>Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan Yang diadkan</i>	<i>Lembar</i>	<i>22.440</i>	<i>22.440</i>	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan Yang Disediakan	Paket	12	12	-	-	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	234	234	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	11	11	-	-	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	Unit	5	5	-	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Unit	6	6	-	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	36	36	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	36	36	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	54	54	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unut	16	16	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	35	35	-	-	
	Kecamatan Gayam		1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/ Dipelihara	M2	265	265	-	-	
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang Dikeluarkan	Kali	1	1			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Yang Dilaksanakan	Kali	1	1			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat Dan Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan	%	100	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam Yang Dilaksanakan	Kali	1	1			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Dalam Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengendalian Ketentraman Dan Ketertiban Umum	%	100	100			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Kali	1	1			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro Yang Dilaksanakan	Kali	1	1			
				PROGRAM PENYELENGGA- RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Kecamatan	%	100	100			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Di Kecamatan	%	100	100			
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forum Pimpinan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali	8	8			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	100	100			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pada Pemerintahan Desa	%	100	100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	desa	1	1			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan Musrenbangdes Yang Dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentata DD dan ADD	Desa	10	10			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	100	97,04			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang terpenuhi	%	100	96,63			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	Adanya PNS yang Pensiun sebanyak 1 Orang dan Sub Keabatan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	Dokumen	20	20			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	6	6			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jenis Layanan Kepegawaian Yang Dipenuhi	%	100	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenakapannua	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	27	27			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	%	100	98,84			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen yang Disediakan	Jenis	152	152			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	115	115			
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan	jumlah barang cetak dan pengagandaan yang diadakan	Lembar	18.500	18.500			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	Paket	12	12			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	102	102			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Yang Diadakan	%	100	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	Unit	27	27			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	6	6			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Langganan Jasa Sumber Daya Air, Listrik Dan Komunikasi Yang Dipenuhi	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	4	4			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin yang Dipelihara	Unit	2	2			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	7	7			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2			
		Kecamatan Gapura	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 2. Peraturan Bupati Sumenep	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	Tidak ada Permasalahan dan sudah terealisasi		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
			Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan	1	1			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan		100	100	Tidak ada Permasalahan dan sudah terealisasi		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	17	17			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi/bintek kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	17	17			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Kelompok usaha yang difasilitasi	Kegiatan	1	1			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparat pemerintah desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	80,67	Tidak ada Permasalahan dan sudah terealisasi		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	kali	17	17			
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	Desa	5	5			
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbangcam	Desa	17	17			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajibannya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi tugas, fungsi dan kewajibannya	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang diberikan pendampingan pengelolaan DD dan ADD	Desa	17	17			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi	%	100	90,92	Tidak ada Permasalahan dan sudah terealisasi		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	5			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	5	5			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	1	1			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	17	17			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	6	6			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis/item komponen instalasi listrik yang disediakan	Jenis	15	15			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit	6	6			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK yang disediakan	Jenis	6	6			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penaandaan	jumlah barang cetak dan penaandaan yang disediakan	Jenis	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	3	3			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	12	12			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah yang diadakan	Unit	17	17			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	15	15			
				Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang diadakan	Unit	2	2			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah layanan jasa yang disediakan	Jenis	3	3			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kali	3	3			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	unit	15	15			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibauarkan Pajaknya	unit	8	8			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	5	5			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	2	2			
		Kecamatan Dungek	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi/ Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan	%	32	32			
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	2			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang Desa	Desa	15	15			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Sosialisasi / Bimtek Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	orang	45	45			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	%	90	90			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	Kali	15	15			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dilaksanakan	Kali	12	12			
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Forum Ulama dan Umaroh yang Dilaksanakan	Keg	3	3			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Sudah Diberikan Pembekalan	%	90	90			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan	%	90	90			
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keuangan	desa	15	15			
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	Desa	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkadesnua	Desa	15	15			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	%	90	99,52			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pembayaran Gaji ASN KecamatanDungkek	Bulan	12	12			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	Kebiasaan ini sifatnya penyediaan sehingga tidak terserap maksimal	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	2	2			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas ASN	Stel	20	20			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	5	5			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Item Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	Jenis	9	9			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	12	12			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan/ Alat untuk Kegiatan Kantor (Logistik) yang Disediakan	Jenis	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan Perketentuan Perundang-undangan yang disediakan	Jenis	2	2			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Kali	88	86	Perdin Luar Daerah tidak terserap maksimal karena adanya pandemi COVID-19 dan sifatnya penunndaan	Penyesuaian anggaran dan sisa anggaran dikembalikan ke KAS Daerah	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Tagihan Listrik,	Rekening	1	1			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat dalam waktu 12 bulan	Surat	1500	1500			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Kelengkapan Pelayanan	Jenis	4	4			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	9	9			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	4	4			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Peralatan yang dibutuhkan	unit	2	2			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	12	12			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dikelola	Unit	3	3			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	6	6			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3	3			
		KECAMATAN BATANG BATANG	1. Perda Kab Sumenep Nomor Tahun 2020 tentang APBD TA 2021	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	%	100	100	-	-	
			2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat desa	Kali	4	4	-	-	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	%	100	100	-	-	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Kali	13	13	-	-	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umara Yang Dilaksanakan	Kali	1	1	-	-	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Kegiatan	1	1	-	-	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rakor forpimka yang dilaksanakan	Kali	8	8	-	-	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	%	100	100	-	-	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)	Desa	1	1	-	-	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pembinaan Musrenbangdes Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	1	-	-	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Keajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan TP-PKK Desa Dan Kecamatan Yang Dilaksanakan	Kali	6	6	-	-	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Desa Tentang DD dan ADD	Desa	16	16	-	-	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	%	100	98,49	-	-	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, Perubahan RKA, DPA Dan Perubahan DPA Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	6	6	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	12	12	-	-	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Terlayani Administrasi Keuanaannua	Orang	25	25	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan Yang Disusun Tepat Waktu	Dokumen	20	20	-	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya Yang Disediakan	Stel	27	27	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi	Unit	72	72	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Yang Disediakan	Jenis	310	310	-	-	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jenis	112	112	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Jenis	382	382	-	-	
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengagandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengagandaan Yang diadakan	Lembar	22.200	22.200	-	-	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundangan Yang Disediakan	Paket	12	12	-	-	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	Kali	318	318	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	Unit	8	8	-	-	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair Kantor Yang Diadakan	Unit	4	4	-	-	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Diadakan	Unit	4	4	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis layanan jasa yang disediakan	Jenis	2	2	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayar Setiap Bulan	Rekening	5	5	-	-	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Unit	66	66	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Dipelihara Dan Berizin	Unit	17	17	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit	46	46	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banaunan Lainnua	Jumlah Luas Bangunan Gedung Yang Direhabilitasi/Dipelihara	M2	810	810	-	-	

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			Selain itu pula didorong dengan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan dan nilai tambah terhadap produk usaha perikanan
2	Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata unggulan dengan arah kebijakan mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata daerah (Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata)	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumenep	Dalam rangka mengenalkan wisata daerah guna peningkatan kunjungan wisatawan serta mendukung kontribusi terhadap pendapatan daerah.
3	Layanan Penerapan Pelayanan Kepegawaian berbasis Elektronik (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan cara melakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer
4	Penyusunan, Pembahasan, Harmonisasi Perda Baru Pertembakauan (Dinas Pertanian Tanaman Hortikultura dan Perkebunan)	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau	Meminimalisir permasalahan Pertembakauan yang setiap tahun selalu menjadi polemik bagi masyarakat /petani Tembakau di Sumenep
5	Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemkab Sumenep (Peraturan Bupati No. 78 tahun 2021)	Permepan dan RB Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	<i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Administrasi Pemerintahan sehingga memberikan guideline proses administrasi oleh seluruh OPD di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, OPD memiliki pemahaman tentang alur informasi, kelengkapan yang

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			dibutuhkan dan proses yang pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien
	Penyusunan Standar Harga Barang, Upah dan Belanja Kabupaten Sumenep	PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden No. 33 tahun 2021 tentang Standar harga Regional; Permendagri No. 64 tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 21	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman dalam penyusunan RKA atau DPA Pemerintah Kabupaten Sumenep agar terjadi keseragaman atau terstandarisasi antar OPD 2. Untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dengan demikian, penyusunan RKA dapat memiliki standar yang sama 3. Pedoman dalam penyusunan RKA atau DPA Pemerintah Kabupaten Sumenep supaya terjadi keseragaman atau terstandarisasi antar OPD
	Pembentukan dan Perampingan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Sekretariat Daerah)	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pembinaan Perangkat Daerah	Evaluasi SOTK sehingga terbentuk SOTK baru yang lebih ramping dan efisien sesuai amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2018
6	Mendukung terwujudnya pengembangan Pulau Kangean sebagai lumbung pangan melalui pembangunan rumah produksi (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan)	UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani wilayah setempat melalui penyerapan secara optimal produksi gabah lokal. 2. Meningkatkan kualitas produksi

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			<p>gabah lokal menjadi beras berkualitas terbaik (premium) untuk ketersediaan pangan masyarakat di Pulau Kangean dan kepulauan disekitarnya.</p> <p>3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.</p> <p>4. Mengatasi gejolak harga pangan (beras) dan stabilitas pasokan apabila terjadi cuaca ekstrim yang menghambat proses pendistribusian pangan dari wilayah darat ke wilayah kepulauan</p>
7	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (Dinas PU. Bina Marga)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
8	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (Dinas Komunikasi Dan Informatika)	Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik	Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elektronik secara nasional

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
9	<p>Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif</p> <p>Meningkatnya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Akibat Bencana</p> <p>Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga pada fasilitas kesehatan</p> <p>Mengoptimalkan dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan)</p>	Peraturan Bupati Sumenep No 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
10	Penerapan sistem pembayaran pajak secara online (BPHTB) (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Penilaian pajak yang lebih akurat
11	Kebijakan Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD	PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak-hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD	Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat terhadap DPRD diperlukan guna menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti penyampaian saran dan pendapat yang disampaikan kepada DPRD Sumenep dalam hal ini Sekretariat DPRD memfasilitasi pertemuan dan dialog antara elemen masyarakat dengan Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Sumenep

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD (Sekretariat DPRD)	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	Penyusunan IKM Sekretariat DPRD ini dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD
12	Peningkatan Pelayanan Melalui Aplikasi Simponi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
13	Mereviu dan menetapkan SPO Pelayanan Kesehatan kesehatan, pelayanan unggulan, sistem informasi yang terintegrasi, dan tata kelola rumah sakit (RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep)	1. SK Bupati Nomor 188/459/455.013/2011 tentang RSUD Moh Anwar ditetapkan sebagai RS PPK BLUD Penuh; 2. Permendagri No 79 Tahun 2018. tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 2. Terwujudnya tata kelola yang baik
14	Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Sehat Berstandar Nasional Indonesia	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2021	Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan: a. Mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung penyelenggaraan kabupaten /kota sehat; b. Memberikan acuan pada pemerintah daerah serta pemangku kepentingan termasuk komunitas pasar rakyat untuk mewujudkan pasar sehat bersandar SNI; c. Menciptakan kemandirian komunitas pasar rakyat dalam mewujudkan pasar sehat berstandar SNI;

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			d. Mendorong pengelolaan pasar rakyat yang lebih profesional dan berdaya saing
	Izin Penggunaan dan Pengelolaan Fasilitas Pasar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2021	Melaksanakan ketentuan dalam pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum. <ul style="list-style-type: none"> 1. untuk membantu program/ kegiatan Pemkab dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran barang pokok berupa ikan dan turunannya, 2. menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan usahanya di Pasar Anom Sumenep 3. mendorong pelaku kegiatan usaha perdagangan ikan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan 4. berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha sesama anggota paguyuban
15	Meningkatkan pelayanan dasar PMKS bagi masyarakat kurang mampu	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Meningkatkan kualitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup dan	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	Menjamin kebutuhan hidup dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak produktif seperti Penyandang Disabilitas

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	kesejahteraan PMKS (Dinas Sosial)		Berat dan Lanjut Usia Terlantar.

3.3. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Salah satu mekanisme penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) harus memuat tindak lanjut dari LKPJ tahun sebelumnya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 19 ayat (1) menyebutkan : “Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dan pasal 20 ayat (2) menyebutkan : “Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam : a) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan c) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Adapun beberapa catatan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep yang harus tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap hasil rekomendasi yang diberikan pada tahun anggaran 2020 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	DPRD menginginkan untuk menjaga kualitas bantuan yang diserahkan kepada penerima, maka perlu dipertimbangkan untuk pengadaannya	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut telah dilaksanakan mekanisme pengadaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana berikut : Program pengelolaan perikanan tangkap dengan realisasi sebesar Rp.	Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat mampu memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>diberikan kepada pihak ketiga yang independen dan bertanggung jawab (Dinas Perikanan)</p>	<p>2.153.045.700 dengan kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan penebaran prikanan di perairan umum dilaksanakan oleh CV. Utama Wahana Abadi sebesar Rp. 95.700.000,- 2. Pekerjaan pengadaan mesin 23 PK dilaksanakan oleh CV. Pelangi sebesar Rp. 198.577.500,- 3. Pekerjaan pengadaan perahu 3 GT dilaksanakan oleh CV. Anugrah Pratama sebesar Rp. 199.023.000,- 4. Pekerjaan pengadaan perahu LPG dilaksanakan oleh CV. Rafi Jaya sebesar Rp. 197.505.000,- 5. Pekerjaan pengadaan jaring gondrong dilaksanakan oleh CV. Emanda sebesar Rp. 193.435.000,- 6. Pekerjaan pengadaan pancing ulur dilaksanakan oleh CV. Amor Jaya sebesar Rp. 196.561.200,- 7. Pekerjaan pengadaan perahu dilaksanakan oleh CV. Triton Trisula sebesar Rp. 491.865.000,- 8. Pekerjaan pengadaan jring millenium dilaksanakan oleh CV. Tunisanga sebesar Rp. 203.280.000,- 9. Pekerjaan pengadaan jaring ketambak dilaksanakan oleh CV. Berkah Pratama sebesar Rp. 199.584.000,- 10. Pekerjaan pengadaan genset dilaksanakan oleh CV. Karya Kembar sebesar Rp. 147.980.000,- 11. Pekerjaan pengadaan coolbox dilaksanakan oleh Toko Alat 	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<p>Perikanan Sejahtera Kediri sebesar Rp. 29.535.000,-</p> <p>Program Pengelolaan Perikanan Budiaya dengan realisasi sebesar Rp. 1.849.707.987,- dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan pengadaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dilaksanakan oleh CV. Noer Utama Jaya sebesar Rp. 190.262.600,- 2. Pekerjaan pengadaan sarana dan prsarana udang vanamei dilaksanakan oleh CV. Nada Mulya sebesar Rp. 140.532.700,- 3. Pekerjaan Perencanaan paving dilaksanakan oleh CV. Karya Nyata sebesar Rp. 28.493.200,- 4. Pekerjaan pengawasan pembangunan paving dilaksanakan oleh CV. Arya Duta Engineering sebesar Rp. 18.493.200,- 5. Pekerjaan pembangunan paving dusun timur dilaksanakan oleh CV. Malindo Contruction sebesar Rp. 199.641.552,- 6. Pekerjaan pembangunan paving dusun pangkalan dilaksanakan CV. Agatindo sebesar Rp. 199.510.689,- 7. Pekerjaan pembangunan paving dilaksanakan oleh CV. Putra Gilang sebesar Rp. 199.640.776,- 8. Pekerjaan perencanaan pembangunan paving dilaksanakan oleh CV. Arya Duta Engineering sebesar Rp. 27.357.000,- 	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<p>9. Pekerjaan pengawasan pembangunan saluran dilaksanakan oleh CV. Karya Nyata sebesar Rp. 18.209.400,-</p> <p>10. Pekerjaan pembangunan saluran desa Bungin bungin dilaksanakan oleh CV. Alfarisi sebesar Rp. 198.897.377,-</p> <p>11. Pekerjaan pembangunan saluran dusun Ares dilaksanakan oleh CV. Pelangi sebesar Rp. 198.928.986,-</p> <p>12. Pekerjaan pembangunan saluran dusun Pangkalan dilaksanakan oleh CV. 198.678.584,-</p> <p>13. Pekerjaan pengadaan geoselator dilaksanakan oleh PT. Mutiara Cahaya Plastindo sebesar Rp. 197.928.720,-</p> <p>14. Pekerjaan pengadaan sarpras budidaya dilaksanakan oleh toko Meranggi Berhias sebesar Rp. 2.424.400,-</p> <p>15. Pekerjaan pengadaan kolam viber dilaksanakan oleh Fish Boster Center sebesar Rp. 25.146.000,-</p> <p>16. Pekerjaan pengadaan pakan ikan dilaksanakan oleh PT. matahari Sakti sebesar Rp. 3.993.000,-</p> <p>17. Pekerjaan bibit lele dilaksanakan oleh Pokdakan lele Makmur sebesar Rp. 1.980.000,-</p> <p>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan realisasi sebesar Rp. 101.006.400 dengan pekerjaan pengadaan coolbox untuk pemasar sebesar Rp. 101.006.400,-</p>	
2	Pendapatan Daerah yang tercantum dalam LKPJ Bupati mengalami	Berdasarkan struktur pendapatan bahwa secara proporsi PAD terhadap APBD sekitar 10%. Selain itu 70% PAD	Beberapa upaya inovasi yang telah dan akan dilakukan antara lain :

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>peningkatan, dimana peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah tersebut sudah melebihi target. Namun sangat disayangkan bahwa komponen pendapatan asli daerah tersebut masih bertumpu pada pajak dan bagi hasil, Maka dari itu diharapkan agar kedepannya dapat lebih dapat berinovasi dan lebih kreatif dalam upaya memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sumenep guna menumbuhkembangkan pendapatan Asli Daerah</p> <p>(Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)</p>	<p>bersumber dari Lain-Lain PAD yang Sah. Sehingga dalam kondisi ini Kabupaten masih jauh dari mandiri. Sedangkan untuk pencapaian target PAD dapat kami sampaikan bahwa secara keseluruhan untuk tahun 2020 memang mencapai, namun demikian tingginya perolehan PAD tidak lepas dari kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah seperti Rekening Bunga Deposito, JKN dan BLUD. Sementara kontribusi dari sektor yang secara umum dianggap potensial seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih minim.</p> <p>Sementara untuk tahun 2021 Pemerintah kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa upaya seperti menggerakkan sosialisasi Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan beberapa kegiatan inovasi dalam pemungutan Pajak Daerah, seperti PBB P2, BPHTB, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, termasuk penerapan Elektronifikasi Transaksi Penerimaan Daerah (ETP) dalam hal penerimaan dengan model Non Tunai. Namun demikian ikhtiar untuk mengoptimalkan penerimaan PAD khususnya Pajak daerah dan Retribusi Daerah pada tahun masih terkendala adanya Pandemi Covid-19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Online System Pajak Daerah dari pengelolaan sampai dengan pembayaran pajak. Kebijakan ini untuk pertama kali diimplementasikan dalam proses pemungutan BPHTB di Kabupaten Sumenep. Proses BPHTB mulai pengelolaan/ pemungutan dilakukan dengan system eBPHTB bahkan sampai dengan proses pembayaran pajak yang dilakukan secara non tunai (elektronifikasi pembayaran) melalui <i>Virtual Account (VA)</i> terbukti mampu mendongkakan peningkatan penerimaan BPHTB. 2. Pada saat ini <i>Online System Pajak Daerah</i> terus dikembangkan dan akan diimplementasikan pada objek pajak daerah lainnya seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel. Dengan Online System Pajak Daerah baik dalam proses

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
			<p>pengelolaan sampai dengan pembayaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meingkatkan trust masyarakat dan tak kalah pentingnya mampu meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.</p> <p>3. Dalam pemungutan PBB P2 dari sisi pelayanan, kebijakan ektronifikasi pembayaran PBB yang pada saat ini bisa dilakukan di Kantor Layanan BPPKAD, Bank JATIM, ATM dan <i>Mobile Banking</i> BankJatim, melalui mitra Bank kedepan akan dilakukan perluasan melalui penambahan kanal-kanal pembayaran seperti dengan beberapa <i>marketplace</i>. Selain itu dalam rangka perbaikan validitas data base PBB P2 maka telah dilakukan pemuktakhiran data PBB P2 secara bertahap</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
3	Belum representatifnya sarana dan prasarana pendidikan yang disebabkan oleh tidak adanya grand desain yang jelas serta tidak didukung oleh anggaran khususnya pada pembangunan akses jalan menuju sekolah dan bangunan gedung sekolah di daerah-daerah terpencil	Akan dilakukan pendataan ulang terhadap akses jalan ke masing-masing lembaga, terkait kebutuhan pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi terkait Akses Jalan tersebut terutama di daerah terpencil akan di sampaikan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti pelaksanaannya	Penyusunan <i>grand design</i> terhadap sarana dan prasarana pendidikan
4	Masih ditemukan adanya sekolah yang jumlah muridnya tidak mencapai jumlah yang dipersyaratkan (bahkan ada sekolah yang muridnya hanya ada satu sampai lima per kelas) dan ini tidak ada langkah tegas dari pemerintah kabupaten sumenep untuk dilakukan regrouping	Sudah ditindak lanjuti terkait regrouping bagi lembaga yang semakin tahun berkurang Peserta didiknya dan berdekatan dengan lembaga lain untuk di regrouping ke lembaga terdekat, namun bagi lembaga yang letak lokasinya berjauhan dengan lembaga lain, kami masih mempertimbangkan untuk melakukan regrouping terkait jarak tempuh siswa, terutama di daerah yang jumlah usia sekolahnya sedikit dan Kepala Keluarganya di daerah tersebut memang sedikit	Penyelesaian Lembaga yang peserta didiknya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan regrouping
5	Masih ditemukan adanya guru-guru yang melalaikan tugasnya (bolos) khususnya guru-guru yang ada di kepulauan dan ini masih belum ada tindakan tegas (Dinas Pendidikan)	Terkait Hal tersebut bagi Guru-guru yang lalai terhadap tugasnya terutama di daerah kepulauan, kami sudah menindak lanjuti dan sudah dilaporkan ke Inspektorat serta dilakukan Pembinaan dan tindakan repressif kepada guru-guru yang lalai dalam menjalankan tugasnya	Pembinaan dan tindakan kepada guru-guru yang lalai dalam menjalankan tugasnya
6	Perlu melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui penarikan restribusi menara telekomunikasi,

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	(PAD) Daerah di Kabupaten Sumenep semakin baik (Dinas Komunikasi Dan Informatika)	Kegiatan Survey Pengawasan Menara Telekomunikasi (BTS) Tower Rp. 31.250.000 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan redistribusi menara telekomunikasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penarikan Restribusi Jasa Umum	Perlu adanya inovasi daerah dalam upaya peningkatan PAD
7	Keberadaan Puskesmas Pandian yang pelayanan kesehatannya seperti sudah melampaui pelayanan kesehatan di RSD seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Sumenep karena lahan parkir puskesmas yang terbatas sangat mengganggu kenyamanan lalu lintas para pengguna jalan umum, dan seharusnya puskesmas tersebut direlokasi dan dicarikan tempat yang lebih representatif. Selain itu, sampai sekarang, masih terdapat puskesmas yang masih belum memiliki pengolahan limbah, khususnya limbah B3, tolong segera ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan- perbaikan. (Dinas Kesehatan)	Memenuhi harapan peningkatan pelayanan kesehatan melalui relokasi Puskesmas Pandian, akan kami usulkan dan mulai merencanakan kemungkinan lokasi baru dengan mempertimbangkan kewilayahan mengingat berdirinya fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah jumlah penduduk dan akses fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Mempersiapkan hal diatas, dalam jangka pendek, akan mencari solusi dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar yang memiliki lahan untuk parkir selama kegiatan pelayanan kesehatan. Untuk pemenuhan pengelolaan limbah, terus kami lengkapi secara bertahap, tahun 2021 dilakukan pembangunan IPAL di Puskesmas RAAS. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rp. 472.508.306,-)	Permasalahan keberadaan Puskesmas Pandian dengan lahan yang terbatas sehingga mengganggu kenyamanan lalu lintas dan penyelesaian limbah B3 puskesmas

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
8	<p>Percepatan pembangunan infrastruktur di kepulauan masih belum terpenuhi, khususnya di daerah-daerah terpencil dan diharapkan bisa terwujud pada tahun-tahun berikutnya, agar disparitas antara daratan dan kepulauan tidak terlalu tampak, dan diharapkan juga pada tahun-tahun berikutnya jalan-jalan (khususnya jalan kabupaten) yang mendesak dibangun haruslah menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran dan dikerjakan.</p>	<p>Dinas PU Bina Marga mengapresiasi positif atas rekomendasi DPRD dan tindaklanjutnya adalah dengan melaksanakan survey kondisi jalan secara berkala dan dilanjutkan dengan Kegiatan Survey Teknis (Perencanaan Teknis) pada H-1 untuk Ruas-Ruas Jalan yang dipandang prioritas untuk ditingkatkan atau dipelihara baik di daratan maupun di kepulauan. Sehingga dapat diketahui lebih awal kebutuhan anggaran dan lokasi yang diperlu diprioritaskan pada tahun berikutnya. Kemudian pada tahun berikutnya Pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan dapat dilaksanakan lebih awal karena Perencanaan Teknisnya sudah tuntas. Sehingga hasil pekerjaan akan selesai sebelum akhir tahun anggaran.</p>	<p>Percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas dan upaya untuk meminimalkan disparitas pembangunan infrastruktur di daratan dan kepulauan</p>
	<p>Perlu penambahan anggaran yang signifikan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan-jalan poros kecamatan dan daerah terpencil (Dinas PU. Bina Marga)</p>	<p>Usulan penambahan anggaran kami sikapi dengan mencari alternatif selain Dana APBD, Kegiatan pembangunan infrastruktur kami usulkan untuk didanai pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Pajak Rokok.</p>	<p>Penambahan Anggaran melalui sumber dana alternatif untuk mepercepat pembangunan infrastruktur.</p>
9	<p>Banyak Keluhan tentang PJU yang sudah mati, namun penanganan pemeliharanya begitu lambat bahkan tidak ada. Ada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan studi banding ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tentang pengelolaan PJU namun disana hanya melakukan pengelolaan PJU di perkotaan 	<p>Pemeliharaan PJU selesai tepat waktu di tahun 2021</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>berkali-kali menyampaikan aduan langsung kepada Dinas Perhubungan, namun yang ada hanya janji-janji untuk segera ditangani tapi tidak segera ditangani. Maka, pada kesempatan ini Pansus merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pemeliharaan PJU, pengelolaannya diserahkan kepada Pihak Ketiga (Dinas Perhubungan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak ketiga yang mau menangani pengelolaan PJU sudah melakukan presentasi kontrak namun setelah pihak ketiga melakukan survey lapangan hasilnya tidak sesuai dengan kontrak yang ditawarkan • Pemeliharaan PJU yang tidak selesai di tahun 2020 dilanjutkan kembali di tahun 2021 dengan anggaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan pagu anggaran Rp. 4.694.320.126 - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 3.091.461.669 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran Rp. 407.999.790 	
10	<p>Permasalahan banjir di Tahun 2020 semakin menjadi-jadi dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang menyeluruh. Kami matimati- matian bertahan untuk tidak mengatakan bahwa Nata Kota Bangun Desa itu gagal, akan tetapi fakta yang terjadi justru mengarah kea rah itu. (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya)</p>	<p>Telah dilakukan Rehabilitasi Saluran Drainase Kawasan RSUD Dr. H. Moh. Anwar Kab. Sumenep, Pembangunan Saluran Drainase Jl. Jati Emas, Pembangunan Saluran Pipa Pembuang Kolam Detensi ASABRI, beberapa lokasi di Ibu Kota Kecamatan, dan beberapa lokasi usulan POKIR, dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, sehingga penanganan banjir di Kabupaten Sumenep diharapkan memperoleh hasil yang optimal.</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Rp 1.770.502.089,-</p> <p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang</p>	<p>Permasalahan banjir yang terjadi</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.770.502.089,- Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp 1.270.170.369,- Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Rp. 500.331.720,-	
11	Revitalisasi pasar tahun 2020 mungkin sukses dari sisi serapan anggaran dan pembangunannya, akan tetapi belum bias dikatakan sukses dalam hal menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena terbukti beberapa pasar yang sudah dibangun tidak mau ditempati oleh masyarakat. Bahkan yang terjadi di pasar ganding, perekonomian malah tumbuh subur di luar pasar	Penyediaan sarana perdagangan pasar yang nyaman, bersih, dan aman tugas yang harus diberikan oleh pemerintah daerah melalui Diskopukmperindag pada masyarakat. Pada tahun ini Diskopukmperindag telah merevitalisasi beberapa pasar untuk merealisasikan tujuan tersebut. Disebabkan anggaran yg terbatas maka penyediaan sarana ini dipilih berdasarkan urgensinya. Di pasar Ganding semua pedagang pasar sudah terfasilitasi tempat berdagang d dalam pasar akan tetapi pedagang kebanyakan selalu memperebutkan posisi terdepan sehingga kadangkala memindahkan barang dagangannya ke depan selain itu ada juga pedagang keliling atau mingguan yang menjajakan barangnya diluar pasar sehingga terlihat ramai diluar Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan pagu Rp. 11.373.598.656	Penyelesaian pedagang di pasar ganding

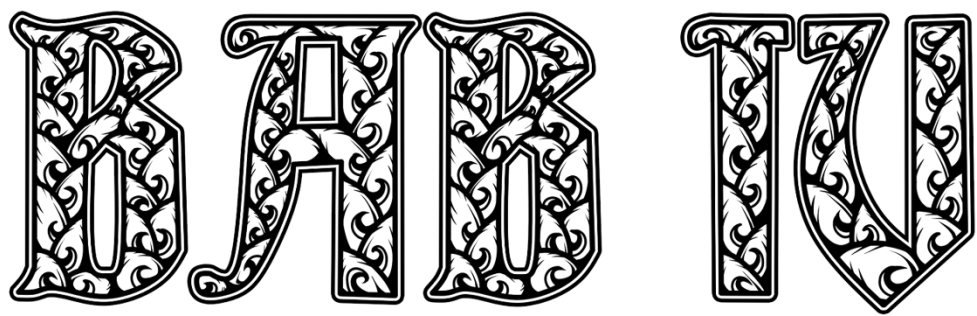
NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>Untuk memaksimalkan peningkatan PAD dari sector pasar dan dalam rangka meminimalisir kebocoran, maka pansus merekomendasikan agar pengelolaan pasar diserahkan kepada Pihak Ketiga. (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)</p>	<p>PAD dari sector pasar tahun 2021 melebihi dari target Rp. 1,9M walaupun tidak ada jaminan jumlah tersebut tidak bocor. Tahun ini kami melakukan kegiatan dalam rangka meminimalisir kebocoran PAD sector pasar dari pendapatan parkir dengan pengadaan peralatan palang parkir otomatis dimana nantinya semua pendapatan akan terekam dengan otomatis. Kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga masih dalam tahap kajian dengan adanya studi banding ke PD Pasar Jaya Jakarta. Apabila memungkinkan bisa diterapkan di pasar daerah di Sumenep</p> <p>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana</p> <p>Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 881.396.320</p>	<p>Rencana pengelolaan pasar kepada pihak ketiga</p>
12	<p>Pelayanan Kesehatan di RSD Moh. Anwar masih menjadi masalah, dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD masih sama. Pansus pun masih terheran-heran, sebenarnya apa yang diinginkan para pelayan kesehatan di RSD tersebut. Ketika kami tanyakan kepada Direktur RSD tentang</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan adanya Penambahan pengadaan tenaga medis dan para medis sebagian dipenuhi oleh CPNS Sebanyak 32 Orang dan PPPK sebanyak 17 Orang untuk tahun 2021. Untuk selanjutnya menunggu formasi CPNS dan PPPK periode berikutnya</p>	<p>Peningkatan dan Perbaikan kualitas Pelayanan Kesehatan</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p> pelayanan kesehatan , beliau malah curhat. Kami pun mendengarkan dengan sabar dan tabah curhatan direktur tersebut dan didapatkan informasi bahwa beban tugas yang ditanggung oleh para pelayan kesehatan di RSD itu sudah melebihi standard an tidak sebanding dengan jasa pelayanan yang diterima. Kami pun berkesimpulan, bahwa kesejahteraan yang tidak sebanding dengan beban tugas para pelayan kesehatan di RSD adalah salah satu pemicu dari hilangnya “senyum” bibir dari pelayan kesehatan. Direktur RSD juga menyampaikan bahwa RSD mengalami kekurangan “tenaga medis dan para medis”, yang juga menjadi faktor tidak maksimalnya pelayanan kesehatan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka kami meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menambah tenaga medis dan para medis </p>		

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>dan juga selanjutnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait masalah-masalah terjadi di RSD agar masalah pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep bisa terselesaikan. (RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep)</p>		
13	<p>Kegiatan incubator mencetak 5000 wirausaha muda tidak mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Impact dan output program kegiatan tidak tampak (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)</p>	<p>Pada tahun 2021 telah menindak lanjuti rekomendasi dewan atas program mencetak wirausaha muda yaitu dengan membangun sentra RUMAH PRODUKSI di 5 lokasi untuk lebih meningkatkan lagi motivasi berwirausaha serta memfasilitasi alat – alat produksi, sehingga peserta yang sebelumnya telah di beri materi pelatihan dapat langsung memulai memproduksi atau berkarya tanpa khawatir kekurangan modal untuk membeli peralatan</p> <p>Program Pengembangan Umkm Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p>	<p>Wirausaha muda diharapkan memberikan impact pada masyarakat</p>
14	<p>Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program pusat sebagai upaya penanggulangan</p>	<p>Pengendalian pelaksanaan Program BPNT/Sembako di Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dengan</p>	

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>kemiskinan dan ketimpangan ekonomi agar benar-benar diawasi dengan ketat dalam proses pelaksanaannya oleh Tim Pendamping BPNT baik dari TKS Kabupaten Sumenep dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menerima bantuan dengan kualitas bantuan yang baik, dan juga demi mencegah terjadinya status ganda karena di bawah ada oknum yang berperan ganda, menjadi TKSK dan sekaligus menjadi supplier</p>	<p>Surat Keputusan Kepala Daerah dan beranggotakan OPD terkait dan semua Camat se Kabupaten Sumenep. Terkait laporan adanya oknum Tenaga Pelaksana Bansos Pangan sudah ditindaklanjuti oleh tim dengan memberhentikan oknum tersebut dari tugas sebagai pendamping bansos pangan seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya oknum pendamping PKH yang bertindak sebagai supplier dan mengarahkan KPM pada salah satu e-warong sehingga yang bersangkutan diberhentikan sebagai pendamping PKH 	
	<p>Untuk menjaga kualitas bantuan yang diserahkan kepada penerima, maka perlu dipertimbangkan untuk pengadaannya diberikan kepada pihak ketiga yang independen dan bertanggungjawab (Dinas Sosial)</p>	<p>E-Warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM. Dalam melayani KPM, e-warong bebas memilih supplier/pemasok asalkan dapat menyediakan produk dengan kualitas, harga yang kompetitif dan tepat jumlah secara konsisten. KPM juga dibebaskan melakukan transaksi di e-Warong yang menurut mereka paling menguntungkan.</p>	<p>Memastikan pelaksanaan program BPNT/Sembako sesuai dengan 6 Tepat yaitu Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Harga dan Tepat Administrasi</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
15	Permasalahan banjir di Tahun 2020 semakin menjadi-jadi dan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi yang menyeluruh. Kami matimatian bertahan untuk tidak mengatakan bahwa Nata Kota Bangun Desa itu gagal, akan tetapi fakta yang terjadi justru mengarah kearah itu. (Dinas PU Sumber Daya Air)	Tindaklanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Tugas Pematusan untuk menjaga kondisi saluran pembuang dan mengoptimalkan operasional pemeliharaan sungai, serta berencana membangun saluran pembuang dari pusat banjir di daerah jalan dr Cipto (Rumdis Wabup)	Meminimalkan daerah yang terdampak banjir di Kabupaten Sumenep



**CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS DAN
PENUGASAN**

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugastugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan

penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan tugas pembantuan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2021 menerima tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi pada bidang urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian sebagai berikut :

1. Untuk **urusan bidang kelautan dan perikanan** Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 menerima pelimpahan sebagian kewenangannya dalam bentuk tugas pembantuan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk Program Pengelolaan Ruang Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.735.452.000,00 (*dua milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan produksi garam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Madura, khususnya Kabupaten Sumenep sebagai salah satu penghasil garam nasional.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perikanan	Pengelolaan Ruang Laut	2.735.452.000	2.698.425.500	83,53	SPDIPA Nomor : SP.DIPA-032.07.4.059496 /2021
Total			2.735.452.000	2.698.425.500	83,50	

2. **Urusan bidang Pertanian**, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep untuk pelaksanaan program ; 1) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian, 2) Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.259.675.000,00 (*lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur pertanian seperti RJIT (Rehab Jaringan Irigasi Tersier), embung dan irigasi perpompaan serta SID untuk optimasi lahan kering (oplah), Disamping itu, untuk kegiatan monitoring penyebaran benih jagung dan padi yang diberikan kepada masyarakat.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

:

Tabel 4. 2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pertahortbun	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian	5.153.975.000	4.135.822.639	80,25	SP-DIPA-018.08.4.059 185/2021
2	Dinas Pertahortbun	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah	105.700.000	93.100.000	88,08	SP-DIPA-018.03.4.059 178/2021, tgl 16-4-2021
Total			5.259.675.000	4.228.922.639	80,40	

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintahan desa berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya

Transfer Dana Desa yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk 330 desa yang tersebar di 27 Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebesar Rp. 337.720.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 337.720.100.000,00.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035).

- d. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021.
- e. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/24/KEP/435.013/2021 tentang Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021.

Alokasi anggaran serta realisasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep
Tahun 2021

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
27 Kecamatan / 330 Pemerintah Desa	337.720.100.000,00	337.720.100.000,00	-
1. Kecamatan Kota	10.488.985.000,00	10.488.985.000,00	-
1. Kolor	1.013.241.000,00	1.013.241.000,00	-
2. Pabian	931.742.000,00	931.742.000,00	-
3. Marengan Daya	757.419.000,00	757.419.000,00	-
4. Kacongan	831.296.000,00	831.296.000,00	-
5. Paberasan	821.506.000,00	821.506.000,00	-
6. Parsanga	920.054.000,00	920.054.000,00	-
7. Bangkal	755.162.000,00	755.162.000,00	-
8. Kebunan	809.093.000,00	809.093.000,00	-
9. Pamolokan	944.468.000,00	944.468.000,00	-
10. Pangarangan	1.144.566.000,00	1.144.566.000,00	-
11. Pandian	786.171.000,00	786.171.000,00	-
12. Kebonagung	774.267.000,00	774.267.000,00	-
2. Kecamatan Kalianget	7.163.522.000,00	7.163.522.000,00	-
1. Pinggirpapas	1.030.376.000,00	1.030.376.000,00	-
2. Karanganyar	861.969.000,00	861.969.000,00	-
3. Marengan Laok	1.222.475.000,00	1.222.475.000,00	-
4. Kertasada	801.373.000,00	801.373.000,00	-
5. Kalimo'ok	935.351.000,00	935.351.000,00	-
6. Kalianget Barat	1.181.088.000,00	1.181.088.000,00	-
7. Kalianget Timur	1.130.890.000,00	1.130.890.000,00	-
3. Kecamatan Manding	10.339.554.000,00	10.339.554.000,00	-
1. Kasengan	1.166.287.000,00	1.166.287.000,00	-
2. Lalangon	807.859.000,00	807.859.000,00	-
3. Tenunan	961.207.000,00	961.207.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
4. Lanjuk	936.488.000,00	936.488.000,00	-
5. Gadding	1.145.991.000,00	1.145.991.000,00	-
6. Giring	943.606.000,00	943.606.000,00	-
7. Gunung Kembar	862.051.000,00	862.051.000,00	-
8. Jabaan	835.179.000,00	835.179.000,00	-
9. Manding Laok	845.108.000,00	845.108.000,00	-
10. Manding Timur	1.006.395.000,00	1.006.395.000,00	-
11. Manding Daya	829.383.000,00	829.383.000,00	-
4. Kecamatan Talango	8.326.025.000,00	8.326.025.000,00	-
1. Talango	1.042.369.000,00	1.042.369.000,00	-
2. Padike	1.011.051.000,00	1.011.051.000,00	-
3. Cabbiya	973.739.000,00	973.739.000,00	-
4. Essang	945.656.000,00	945.656.000,00	-
5. Kombang	1.053.615.000,00	1.053.615.000,00	-
6. Poteran	1.080.819.000,00	1.080.819.000,00	-
7. Palasa	1.072.712.000,00	1.072.712.000,00	-
8. Gapurana	1.146.064.000,00	1.146.064.000,00	-
5. Kecamatan Bluto	20.169.442.000,00	20.169.442.000,00	-
1. Guluk Manjung	899.280.000,00	899.280.000,00	-
2. Kapedi	1.549.940.000,00	1.549.940.000,00	-
3. Pakandangan Barat	1.328.581.000,00	1.328.581.000,00	-
4. Pakandangan Tengah	1.187.260.000,00	1.187.260.000,00	-
5. Pakandangan Sangrah	1.040.249.000,00	1.040.249.000,00	-
6. Aengdake	1.011.491.000,00	1.011.491.000,00	-
7. Aengbeje Kenek	1.096.000.000,00	1.096.000.000,00	-
8. Bluto	799.442.000,00	799.442.000,00	-
9. Lobuk	1.264.266.000,00	1.264.266.000,00	-
10. Bumbungan	940.842.000,00	940.842.000,00	-
11. Masaran	913.740.000,00	913.740.000,00	-
12. Palongan	1.235.146.000,00	1.235.146.000,00	-
13. Aengbaja Raje	825.317.000,00	825.317.000,00	-
14. Karang Campaka	844.244.000,00	844.244.000,00	-
15. Sera Barat	901.598.000,00	901.598.000,00	-
16. Sera Tengah	726.896.000,00	726.896.000,00	-
17. Sera Timur	1.128.059.000,00	1.128.059.000,00	-
18. Gingging	916.750.000,00	916.750.000,00	-
19. Errabu	819.727.000,00	819.727.000,00	-
20. Gilang	740.614.000,00	740.614.000,00	-
6. Kecamatan Saronggi	13.247.790.000,00	13.247.790.000,00	-
1. Pagarbatu	1.069.942.000,00	1.069.942.000,00	-
2. Tanjung	1.020.977.000,00	1.020.977.000,00	-
3. Kebundadap Timur	948.298.000,00	948.298.000,00	-
4. Langsar	935.275.000,00	935.275.000,00	-
5. Kebundadap Barat	787.924.000,00	787.924.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
6. Saroka	780.749.000,00	780.749.000,00	-
7. Tanamerah	1.288.496.000,00	1.288.496.000,00	-
8. Nambakor	990.669.000,00	990.669.000,00	-
9. Saronggi	875.807.000,00	875.807.000,00	-
10. Muangan	793.512.000,00	793.512.000,00	-
11. Juluk	895.883.000,00	895.883.000,00	-
12. Aeng Tongtong	896.936.000,00	896.936.000,00	-
13. Talang	1.216.636.000,00	1.216.636.000,00	-
14. Kambingan Timur	746.686.000,00	746.686.000,00	-
7. Kecamatan Lenteng	19.054.900.000,00	19.054.900.000,00	-
1. Moncek Barat	906.848.000,00	906.848.000,00	-
2. Moncek Tengah	910.132.000,00	910.132.000,00	-
3. Moncek Timur	1.000.196.000,00	1.000.196.000,00	-
4. Banarassep Timur	1.131.156.000,00	1.131.156.000,00	-
5. Tarogan	723.517.000,00	723.517.000,00	-
6. Kambingan Barat	878.503.000,00	878.503.000,00	-
7. Poreh	911.559.000,00	911.559.000,00	-
8. Lenteng Timur	976.452.000,00	976.452.000,00	-
9. Lembung Timur	995.935.000,00	995.935.000,00	-
10. Lenteng Barat	1.422.822.000,00	1.422.822.000,00	-
11. Banarassep Barat	879.809.000,00	879.809.000,00	-
12. Billapora Rebba	1.106.849.000,00	1.106.849.000,00	-
13. Lembung Barat	904.750.000,00	904.750.000,00	-
14. Ellak Laok	1.202.433.000,00	1.202.433.000,00	-
15. Ellak Daya	934.424.000,00	934.424.000,00	-
16. Daramista	831.766.000,00	831.766.000,00	-
17. Jambu	791.824.000,00	791.824.000,00	-
18. Cangkreng	871.830.000,00	871.830.000,00	-
19. Meddelan	942.104.000,00	942.104.000,00	-
20. Sendir	731.991.000,00	731.991.000,00	-
8. Kecamatan Giligenting	8.175.321.000,00	8.175.321.000,00	-
1. Galis	1.170.991.000,00	1.170.991.000,00	-
2. Gedugan	1.053.996.000,00	1.053.996.000,00	-
3. Bringsang	901.968.000,00	901.968.000,00	-
4. Aeng Anyar	951.568.000,00	951.568.000,00	-
5. Lombang	1.081.716.000,00	1.081.716.000,00	-
6. Jate	945.966.000,00	945.966.000,00	-
7. Banbaru	1.165.027.000,00	1.165.027.000,00	-
8. Banmaleng	904.089.000,00	904.089.000,00	-
9. Kecamatan Guluk-Guluk	15.212.463.000,00	15.212.463.000,00	-
1. Bakeong	1.604.879.000,00	1.604.879.000,00	-
2. Payudan Dundang	1.161.913.000,00	1.161.913.000,00	-
3. Pordapor	1.041.203.000,00	1.041.203.000,00	-
4. Guluk-Guluk	2.129.214.000,00	2.129.214.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
5. Ketawang Laok	967.142.000,00	967.142.000,00	-
6. Pananggungan	767.148.000,00	767.148.000,00	-
7. Bragung	1.534.541.000,00	1.534.541.000,00	-
8. Tambuko	988.836.000,00	988.836.000,00	-
9. Payudan Nangger	1.013.989.000,00	1.013.989.000,00	-
10. Payudan Daleman	1.437.683.000,00	1.437.683.000,00	-
11. Payudan Karang Sokon	1.048.976.000,00	1.048.976.000,00	-
12. Batuampar	1.516.939.000,00	1.516.939.000,00	-
10. Kecamatan Ganding	13.224.957.000,00	13.224.957.000,00	-
1. Bataal Barat	821.292.000,00	821.292.000,00	-
2. Bataal Timur	793.814.000,00	793.814.000,00	-
3. Rombiya Barat	919.799.000,00	919.799.000,00	-
4. Rombiya Timur	913.443.000,00	913.443.000,00	-
5. Talaga	942.288.000,00	942.288.000,00	-
6. Billapora Barat	854.350.000,00	854.350.000,00	-
7. Billapora Timur	927.245.000,00	927.245.000,00	-
8. Ganding	1.127.347.000,00	1.127.347.000,00	-
9. Gadu Timur	1.014.305.000,00	1.014.305.000,00	-
10. Gadu Barat	1.211.709.000,00	1.211.709.000,00	-
11. Ketawang Larangan	940.639.000,00	940.639.000,00	-
12. Ketawang Parebaan	807.615.000,00	807.615.000,00	-
13. Ketawang Daleman	976.697.000,00	976.697.000,00	-
14. Ketawang Karay	974.414.000,00	974.414.000,00	-
11. Kecamatan Pragaan	15.288.409.000,00	15.288.409.000,00	-
1. Kaduara Timur	974.309.000,00	974.309.000,00	-
2. Sendang	832.607.000,00	832.607.000,00	-
3. Rombasan	715.606.000,00	715.606.000,00	-
4. Sentol Laok	755.878.000,00	755.878.000,00	-
5. Larangan Perreng	1.041.011.000,00	1.041.011.000,00	-
6. Sentol Daya	1.203.446.000,00	1.203.446.000,00	-
7. Pakamban Daya	1.066.936.000,00	1.066.936.000,00	-
8. Pakamban Laok	896.543.000,00	896.543.000,00	-
9. Jaddung	1.426.090.000,00	1.426.090.000,00	-
10. Pragaan Laok	1.157.744.000,00	1.157.744.000,00	-
11. Pragaan Daya	1.517.616.000,00	1.517.616.000,00	-
12. Prenduan	1.205.560.000,00	1.205.560.000,00	-
13. Aengpanas	969.990.000,00	969.990.000,00	-
14. Karduluk	1.525.073.000,00	1.525.073.000,00	-
12. Kecamatan Ambunten	15.617.056.000,00	15.617.056.000,00	-
1. Ambunten Barat	993.748.000,00	993.748.000,00	-
2. Ambunten Tengah	1.208.921.000,00	1.208.921.000,00	-
3. Ambunten Timur	963.681.000,00	963.681.000,00	-
4. Tambaagung Barat	1.252.897.000,00	1.252.897.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
5. Tambaagung Tengah	1.407.312.000,00	1.407.312.000,00	-
6. Tambaagung Ares	1.081.272.000,00	1.081.272.000,00	-
7. Sogian	910.371.000,00	910.371.000,00	-
8. Tambaagung Timur	926.184.000,00	926.184.000,00	-
9. Bukabu	822.853.000,00	822.853.000,00	-
10. Campor Barat	1.119.495.000,00	1.119.495.000,00	-
11. Keles	933.135.000,00	933.135.000,00	-
12. Campor Timur	1.009.880.000,00	1.009.880.000,00	-
13. Belluk Ares	852.687.000,00	852.687.000,00	-
14. Belluk Kenek	1.211.456.000,00	1.211.456.000,00	-
15. Belluk Raja	923.164.000,00	923.164.000,00	-
13. Kecamatan Pasongsongan	12.917.113.000,00	12.917.113.000,00	-
1. Montorna	1.543.991.000,00	1.543.991.000,00	-
2. Prancak	1.916.602.000,00	1.916.602.000,00	-
3. Campaka	1.373.342.000,00	1.373.342.000,00	-
4. Rajun	1.298.617.000,00	1.298.617.000,00	-
5. Lebbeng Timur	1.116.861.000,00	1.116.861.000,00	-
6. Lebbeng Barat	1.179.573.000,00	1.179.573.000,00	-
7. Soddara	1.353.201.000,00	1.353.201.000,00	-
8. Pasongsongan	1.264.345.000,00	1.264.345.000,00	-
9. Padangdangan	901.641.000,00	901.641.000,00	-
10. Panaongan	968.940.000,00	968.940.000,00	-
14. Kecamatan Dasuk	13.294.105.000,00	13.294.105.000,00	-
1. Slopeng	813.828.000,00	813.828.000,00	-
2. Semaan	842.121.000,00	842.121.000,00	-
3. Batubelah Barat	950.574.000,00	950.574.000,00	-
4. Batubelah Timur	858.984.000,00	858.984.000,00	-
5. Kecer	953.979.000,00	953.979.000,00	-
6. Bates	868.685.000,00	868.685.000,00	-
7. Bringin	1.007.895.000,00	1.007.895.000,00	-
8. Jelbudan	973.951.000,00	973.951.000,00	-
9. Kerta Barat	773.318.000,00	773.318.000,00	-
10. Kerta Timur	833.683.000,00	833.683.000,00	-
11. Nyapar	909.632.000,00	909.632.000,00	-
12. Dasuk Barat	852.808.000,00	852.808.000,00	-
13. Dasuk Timur	760.416.000,00	760.416.000,00	-
14. Dasuk Laok	937.357.000,00	937.357.000,00	-
15. Mantajun	956.874.000,00	956.874.000,00	-
15. Kecamatan Rubaru	12.122.248.000,00	12.122.248.000,00	-
1. Mandala	1.405.112.000,00	1.405.112.000,00	-
2. Pakondang	1.179.693.000,00	1.179.693.000,00	-
3. Matanair	1.143.999.000,00	1.143.999.000,00	-
4. Tambaksari	998.552.000,00	998.552.000,00	-
5. Banasareh	946.777.000,00	946.777.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
6. Bunbarat	956.593.000,00	956.593.000,00	-
7. Karangnangka	1.179.390.000,00	1.179.390.000,00	-
8. Basoka	1.317.643.000,00	1.317.643.000,00	-
9. Duko	897.638.000,00	897.638.000,00	-
10. Rubaru	1.091.102.000,00	1.091.102.000,00	-
11. Kalebbengan	1.005.749.000,00	1.005.749.000,00	-
16. Kecamatan Batang-Batang	16.770.541.000,00	16.770.541.000,00	-
1. Kolpo	1.350.564.000,00	1.350.564.000,00	-
2. Tamidung	1.199.122.000,00	1.199.122.000,00	-
3. Batang Batang Laok	1.018.389.000,00	1.018.389.000,00	-
4. Batang Batang Daya	1.282.089.000,00	1.282.089.000,00	-
5. Totosan	908.895.000,00	908.895.000,00	-
6. Banuaju Barat	924.674.000,00	924.674.000,00	-
7. Banuaju Timur	864.621.000,00	864.621.000,00	-
8. Janangger	1.252.938.000,00	1.252.938.000,00	-
9. Nyabakan Timur	1.203.703.000,00	1.203.703.000,00	-
10. Nyabakan Barat	1.249.284.000,00	1.249.284.000,00	-
11. Jangkong	911.198.000,00	911.198.000,00	-
12. Legung Barat	906.872.000,00	906.872.000,00	-
13. Legung Timur	1.005.134.000,00	1.005.134.000,00	-
14. Dapenda	1.042.909.000,00	1.042.909.000,00	-
15. Bilangan	828.589.000,00	828.589.000,00	-
16. Lombang	821.560.000,00	821.560.000,00	-
17. Kecamatan Batuputih	14.816.865.000,00	14.816.865.000,00	-
1. Aengmerah	1.154.415.000,00	1.154.415.000,00	-
2. Tangedan	874.962.000,00	874.962.000,00	-
3. Juruan Laok	1.067.078.000,00	1.067.078.000,00	-
4. Juruan Daya	1.338.595.000,00	1.338.595.000,00	-
5. Badur	932.224.000,00	932.224.000,00	-
6. Gedang Gedang	1.062.302.000,00	1.062.302.000,00	-
7. Batuputih Kenek	916.523.000,00	916.523.000,00	-
8. Batuputih Laok	944.118.000,00	944.118.000,00	-
9. Batuputih Daya	1.026.069.000,00	1.026.069.000,00	-
10. Bantelan	997.363.000,00	997.363.000,00	-
11. Larangan Barma	1.192.424.000,00	1.192.424.000,00	-
12. Larangan Kerta	878.412.000,00	878.412.000,00	-
13. Bulla'an	1.455.536.000,00	1.455.536.000,00	-
14. Sergang	976.844.000,00	976.844.000,00	-
18. Kecamatan Dungkek	12.676.468.000,00	12.676.468.000,00	-
1. Candi	856.653.000,00	856.653.000,00	-
2. Jadung	890.430.000,00	890.430.000,00	-
3. Romben Barat	880.802.000,00	880.802.000,00	-
4. Romben Rana	773.239.000,00	773.239.000,00	-
5. Romben Guna	913.909.000,00	913.909.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
6. Tamansare	865.975.000,00	865.975.000,00	-
7. Bicabi	836.365.000,00	836.365.000,00	-
8. Dungkek	850.079.000,00	850.079.000,00	-
9. Bunpenang	847.358.000,00	847.358.000,00	-
10. Bungin Bungin	743.215.000,00	743.215.000,00	-
11. Lapa Taman	927.949.000,00	927.949.000,00	-
12. Lapa Laok	884.106.000,00	884.106.000,00	-
13. Lapa Daya	738.404.000,00	738.404.000,00	-
14. Bancamara	838.343.000,00	838.343.000,00	-
15. Banra'as	829.641.000,00	829.641.000,00	-
19. Kecamatan Gapura	14.589.080.000,00	14.589.080.000,00	-
1. Grujugan	873.764.000,00	873.764.000,00	-
2. Longos	1.075.105.000,00	1.075.105.000,00	-
3. Andulang	896.237.000,00	896.237.000,00	-
4. Gapura Timur	837.596.000,00	837.596.000,00	-
5. Mandala	692.734.000,00	692.734.000,00	-
6. Gersik Putih	860.622.000,00	860.622.000,00	-
7. Gapura Tengah	856.165.000,00	856.165.000,00	-
8. Gapura Barat	853.738.000,00	853.738.000,00	-
9. Panagan	802.359.000,00	802.359.000,00	-
10. Paloklo'an	905.352.000,00	905.352.000,00	-
11. Banjar Timur	795.217.000,00	795.217.000,00	-
12. Banjar Barat	906.814.000,00	906.814.000,00	-
13. Batudinding	845.282.000,00	845.282.000,00	-
14. Baban	799.733.000,00	799.733.000,00	-
15. Karangbuddi	910.090.000,00	910.090.000,00	-
16. Braji	818.494.000,00	818.494.000,00	-
17. Poja	859.778.000,00	859.778.000,00	-
20. Kecamatan Gayam	11.237.373.000,00	11.237.373.000,00	-
1. Pancor	1.338.643.000,00	1.338.643.000,00	-
2. Prambanan	1.230.649.000,00	1.230.649.000,00	-
3. Gendang Timur	1.028.244.000,00	1.028.244.000,00	-
4. Karang Tengah	918.145.000,00	918.145.000,00	-
5. Jambuir	1.260.916.000,00	1.260.916.000,00	-
6. Gayam	1.030.341.000,00	1.030.341.000,00	-
7. Kalowang	1.050.272.000,00	1.050.272.000,00	-
8. Nyamplong	1.170.939.000,00	1.170.939.000,00	-
9. Gendang Barat	1.179.763.000,00	1.179.763.000,00	-
10. Tarebung	1.029.461.000,00	1.029.461.000,00	-
21. Kecamatan Nonggunong	7.432.183.000,00	7.432.183.000,00	-
1. Nonggunong	902.026.000,00	902.026.000,00	-
2. Sumber	1.055.329.000,00	1.055.329.000,00	-
3. Tanahmerah	803.425.000,00	803.425.000,00	-
4. Sokaramme Timur	957.921.000,00	957.921.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
5. Sokarame Paseser	1.018.986.000,00	1.018.986.000,00	-
6. Talaga	877.844.000,00	877.844.000,00	-
7. Rosong	863.810.000,00	863.810.000,00	-
8. Sonok	952.842.000,00	952.842.000,00	-
22. Kecamatan Ra'as	10.552.296.000,00	10.552.296.000,00	-
1. Ketupat	1.139.291.000,00	1.139.291.000,00	-
2. Jungkat	1.155.753.000,00	1.155.753.000,00	-
3. Kropoh	1.124.347.000,00	1.124.347.000,00	-
4. Karangnangka	1.294.036.000,00	1.294.036.000,00	-
5. Alasmalang	1.004.145.000,00	1.004.145.000,00	-
6. Poteran	1.205.412.000,00	1.205.412.000,00	-
7. Brakas	1.049.392.000,00	1.049.392.000,00	-
8. Tonduk	1.660.019.000,00	1.660.019.000,00	-
9. Gua Gua	919.901.000,00	919.901.000,00	-
23 Kecamatan Masalembu	4.499.593.000,00	4.499.593.000,00	-
1. Sukajeruk	1.209.657.000,00	1.209.657.000,00	-
2. Masalima	1.367.388.000,00	1.367.388.000,00	-
3. Masakambing	951.171.000,00	951.171.000,00	-
4. Kramian	971.377.000,00	971.377.000,00	-
24. Kecamatan Arjasa	19.980.012.000,00	19.980.012.000,00	-
1. Pajanangger	1.418.692.000,00	1.418.692.000,00	-
2. Sawah Sumur	1.136.465.000,00	1.136.465.000,00	-
3. Paseraman	1.166.663.000,00	1.166.663.000,00	-
4. Gelaman	1.410.570.000,00	1.410.570.000,00	-
5. Buddi	1.487.498.000,00	1.487.498.000,00	-
6. Kolo Kolo	1.450.020.000,00	1.450.020.000,00	-
7. Angkatan	1.035.591.000,00	1.035.591.000,00	-
8. Kalisangka	906.712.000,00	906.712.000,00	-
9. Bilis Bilis	969.927.000,00	969.927.000,00	-
10. Laok Jangjang	878.449.000,00	878.449.000,00	-
11. Sumbernangka	803.193.000,00	803.193.000,00	-
12. Duko	1.057.376.000,00	1.057.376.000,00	-
13. Kalikatak	923.155.000,00	923.155.000,00	-
14. Arjasa	879.809.000,00	879.809.000,00	-
15. Kalinganyar	894.215.000,00	894.215.000,00	-
16. Angon Angon	939.097.000,00	939.097.000,00	-
17. Sambakati	920.280.000,00	920.280.000,00	-
18. Pandeman	878.809.000,00	878.809.000,00	-
19. Pabian	823.491.000,00	823.491.000,00	-
25. Kecamatan Sapeken	14.777.652.000,00	14.777.652.000,00	-
1. Sepanjang	1.950.237.000,00	1.950.237.000,00	-
2. Tanjung Kiaok	1.205.325.000,00	1.205.325.000,00	-
3. Sakala	1.075.183.000,00	1.075.183.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
4. Pagerungan Besar	1.217.434.000,00	1.217.434.000,00	-
5. Pagerungan Kecil	1.217.255.000,00	1.217.255.000,00	-
6. Saseel	1.201.693.000,00	1.201.693.000,00	-
7. Sapeken	1.566.417.000,00	1.566.417.000,00	-
8. Sabuntan	1.276.691.000,00	1.276.691.000,00	-
9. Paleat	1.504.671.000,00	1.504.671.000,00	-
10. Sadulang	1.334.395.000,00	1.334.395.000,00	-
11. Saur Saebus	1.228.351.000,00	1.228.351.000,00	-
26 Kecamatan Batuan	5.530.165.000,00	5.530.165.000,00	-
1. Patean	702.911.000,00	702.911.000,00	-
2. Babbalan	819.603.000,00	819.603.000,00	-
3. Gedungan	748.934.000,00	748.934.000,00	-
4. Gunggung	842.152.000,00	842.152.000,00	-
5. Batuan	921.353.000,00	921.353.000,00	-
6. Torbang	785.191.000,00	785.191.000,00	-
7. Gelugur	710.021.000,00	710.021.000,00	-
27. Kecamatan Kangayan	10.215.982.000,00	10.215.982.000,00	-
1. Saobi	1.110.461.000,00	1.110.461.000,00	-
2. Kangayan	1.566.002.000,00	1.566.002.000,00	-
3. Torjek	1.502.395.000,00	1.502.395.000,00	-
4. Cangkramaan	933.594.000,00	933.594.000,00	-
5. Tembayangan	873.981.000,00	873.981.000,00	-
6. Batuputih	991.793.000,00	991.793.000,00	-
7. Daandung	1.131.995.000,00	1.131.995.000,00	-
8. Timur Jangiang	1.020.364.000,00	1.020.364.000,00	-
9. Jukong Jukong	1.085.397.000,00	1.085.397.000,00	-

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep diperuntukkan untuk 330 Pemerintah Desa yang tersebar di 27 Kecamatan wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke (Rekening Kas Desa). Alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 129.367.808.249,00 dan terealisasi sebesar Rp. 129.367.808.249,00 dengan output kegiatan

berupa Terbayarnya Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tercapaiannya Pembangunan di Desa, Tersalurnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- b. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/456/KEP/435.013/ 2021 Perubahan atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/556/KEP/435.013/2020 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Alokasi anggaran serta realisasi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
27 Kecamatan / 330 Pemerintah Desa	129.367.808.249,00	129.367.808.249,00	-
1. Kecamatan Kota	4.477.800.000,00	4.477.800.000,00	-
1. Kolor	421.200.000	421.200.000	-
2. Pabian	396.600.000	396.600.000	-
3. Marengan Daya	367.800.000	367.800.000	-
4. Kaongan	353.400.000	353.400.000	-
5. Paberasan	396.600.000	396.600.000	-
6. Parsanga	372.000.000	372.000.000	-
7. Bangkal	343.200.000	343.200.000	-
8. Kebunan	343.200.000	343.200.000	-
9. Pamolokan	396.600.000	396.600.000	-
10. Pangarangan	372.000.000	372.000.000	-
11. Pandian	372.000.000	372.000.000	-
12. Kebonagung	343.200.000	343.200.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
2. Kecamatan Kalianget	2.669.400.000,00	2.669.400.000,00	-
1. Pinggirpapas	372.000.000	372.000.000	-
2. Karanganyar	367.800.000	367.800.000	-
3. Marengan Laok	396.600.000	396.600.000	-
4. Kertasada	382.200.000	382.200.000	-
5. Kalimo'ok	372.000.000	372.000.000	-
6. Kalianget Barat	382.200.000	382.200.000	-
7. Kalianget Timur	396.600.000	396.600.000	-
3. Kecamatan Manding	4.168.800.000,00	4.168.800.000,00	-
1. Kasengan	343.200.000	343.200.000	-
2. Lalangon	328.800.000	328.800.000	-
3. Tenunan	367.800.000	367.800.000	-
4. Lanjuk	367.800.000	367.800.000	-
5. Gadding	470.400.000	470.400.000	-
6. Giring	431.400.000	431.400.000	-
7. Gunung Kembar	367.800.000	367.800.000	-
8. Jabaan	402.600.000	402.600.000	-
9. Manding Laok	367.800.000	367.800.000	-
10. Manding Timur	392.400.000	392.400.000	-
11. Manding Daya	328.800.000	328.800.000	-
4. Kecamatan Talango	3.824.400.000,00	3.824.400.000,00	-
1. Talango	445.800.000	445.800.000	-
2. Padike	470.400.000	470.400.000	-
3. Cabbiya	417.000.000	417.000.000	-
4. Essang	456.000.000	456.000.000	-
5. Kombang	431.400.000	431.400.000	-
6. Poteran	466.200.000	466.200.000	-
7. Palasa	495.000.000	495.000.000	-
8. Gapurana	642.600.000	642.600.000	-
5. Kecamatan Bluto	6.792.000.000,00	6.792.000.000,00	-
1. Guluk Manjung	304.200.000	304.200.000	-
2. Kapedi	445.800.000	445.800.000	-
3. Pakandangan Barat	406.800.000	406.800.000	-
4. Pakandangan Tengah	328.800.000	328.800.000	-
5. Pakandangan Sangra	343.200.000	343.200.000	-
6. Aeng Dake	382.200.000	382.200.000	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1		2	3	4
7.	Aeng Baja Kenek	357.600.000	357.600.000	-
8.	Bluto	343.200.000	343.200.000	-
9.	Lobuk	396.600.000	396.600.000	-
10.	Bumbungan	343.200.000	343.200.000	-
11.	Masaran	304.200.000	304.200.000	-
12.	Palongan	304.200.000	304.200.000	-
13.	Aeng Baja Raja	304.200.000	304.200.000	-
14.	Karang Campaka	304.200.000	304.200.000	-
15.	Sera Barat	353.400.000	353.400.000	-
16.	Sera Tengah	304.200.000	304.200.000	-
17.	Sera Timur	328.800.000	328.800.000	-
18.	Gingging	328.800.000	328.800.000	-
19.	Errabu	304.200.000	304.200.000	-
20.	Gilang	304.200.000	304.200.000	-
6.	Kecamatan Saronggi	5.128.800.000,00	5.128.800.000,00	-
1.	Pagarbatu	396.600.000	396.600.000	-
2.	Tanjung	382.200.000	382.200.000	-
3.	Kebundadap Timur	367.800.000	367.800.000	-
4.	Langsar	480.600.000	480.600.000	-
5.	Kebundadap Barat	304.200.000	304.200.000	-
6.	Saroka	367.800.000	367.800.000	-
7.	Tanamerah	406.800.000	406.800.000	-
8.	Nambakor	328.800.000	328.800.000	-
9.	Saronggi	367.800.000	367.800.000	-
10.	Muangan	304.200.000	304.200.000	-
11.	Juluk	343.200.000	343.200.000	-
12.	Aeng Tongtong	328.800.000	328.800.000	-
13.	Talang	445.800.000	445.800.000	-
14.	Kambangan Timur	304.200.000	304.200.000	-
7.	Kecamatan Lenteng	7.417.800.000,00	7.417.800.000,00	-
1.	Moncek Barat	304.200.000	304.200.000	-
2.	Moncek Tengah	328.800.000	328.800.000	-
3.	Moncek Timur	343.200.000	343.200.000	-
4.	Banarassep Timur	445.800.000	445.800.000	-
5.	Tarogan	304.200.000	304.200.000	-
6.	Kambangan Barat	304.200.000	304.200.000	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1		2	3	4
7.	Poreh	382.200.000	382.200.000	-
8.	Lenteng Timur	445.800.000	445.800.000	-
9.	Lembung Timur	396.600.000	396.600.000	-
10.	Lenteng Barat	544.200.000	544.200.000	-
11.	Banarassep Barat	304.200.000	304.200.000	-
12.	Billapora Rebba	421.200.000	421.200.000	-
13.	Lembung Barat	318.600.000	318.600.000	-
14.	Ellak Laok	431.400.000	431.400.000	-
15.	Ellak Daya	406.800.000	406.800.000	-
16.	Daramista	367.800.000	367.800.000	-
17.	Jambu	328.800.000	328.800.000	-
18.	Cangkrenng	343.200.000	343.200.000	-
19.	Meddelan	367.800.000	367.800.000	-
20.	Sendir	328.800.000	328.800.000	-
8.	Kecamatan Giligenting	3.254.400.000,00	3.254.400.000,00	-
1.	Galis	445.800.000	445.800.000	-
2.	Gedugan	470.400.000	470.400.000	-
3.	Bringsang	367.800.000	367.800.000	-
4.	Aeng Anyar	431.400.000	431.400.000	-
5.	Lombang	445.800.000	445.800.000	-
6.	Jate	367.800.000	367.800.000	-
7.	Banbaru	343.200.000	343.200.000	-
8.	Banmaleng	382.200.000	382.200.000	-
9.	Kecamatan Guluk- Guluk	5.041.200.000,00	5.041.200.000,00	-
1.	Bakeong	495.000.000	495.000.000	-
2.	Payudan Dundang	367.800.000	367.800.000	-
3.	Pordapor	367.800.000	367.800.000	-
4.	Guluk-Guluk	642.600.000	642.600.000	-
5.	Ketawang Laok	392.400.000	392.400.000	-
6.	Pananggungan	304.200.000	304.200.000	-
7.	Bragung	470.400.000	470.400.000	-
8.	Tambuko	343.200.000	343.200.000	-
9.	Payudan Nangger	353.400.000	353.400.000	-
10.	Payudan Daleman	367.800.000	367.800.000	-
11.	Payudan Karang Sokon	367.800.000	367.800.000	-
12.	Batuampar	568.800.000	568.800.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
10. Kecamatan Ganding	5.596.200.000,00	5.596.200.000,00	-
1. Bataal Barat	353.400.000	353.400.000	-
2. Bataal Timur	378.000.000	378.000.000	-
3. Rombiya Barat	378.000.000	378.000.000	-
4. Rombiya Timur	466.200.000	466.200.000	-
5. Talaga	417.000.000	417.000.000	-
6. Billapora Barat	353.400.000	353.400.000	-
7. Billapora Timur	378.000.000	378.000.000	-
8. Ganding	470.400.000	470.400.000	-
9. Gadu Timur	470.400.000	470.400.000	-
10. Gadu Barat	470.400.000	470.400.000	-
11. Ketawang Larangan	367.800.000	367.800.000	-
12. Ketawang Parebaan	304.200.000	304.200.000	-
13. Ketawang Daleman	367.800.000	367.800.000	-
14. Ketawang Karay	421.200.000	421.200.000	-
11. Kecamatan Pragaan	5.730.000.000,00	5.730.000.000,00	-
1. Kaduara Timur	367.800.000	367.800.000	-
2. Sendang	328.800.000	328.800.000	-
3. Rombasan	304.200.000	304.200.000	-
4. Sentol Laok	304.200.000	304.200.000	-
5. Larangan Perreng	445.800.000	445.800.000	-
6. Sentol Daya	382.200.000	382.200.000	-
7. Pakamban Daya	456.000.000	456.000.000	-
8. Pakamban Laok	367.800.000	367.800.000	-
9. Jaddung	421.200.000	421.200.000	-
10. Pragaan Laok	445.800.000	445.800.000	-
11. Pragaan Daya	445.800.000	445.800.000	-
12. Prenduan	445.800.000	445.800.000	-
13. Aengpanas	396.600.000	396.600.000	-
14. Karduluk	618.000.000	618.000.000	-
12. Kecamatan Ambunten	5.359.200.000,00	5.359.200.000,00	-
1. Ambunten Barat	382.200.000	382.200.000	-
2. Ambunten Tengah	495.000.000	495.000.000	-
3. Ambunten Timur	372.000.000	372.000.000	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1		2	3	4
4.	Tambaagung Barat	328.800.000	328.800.000	-
5.	Tambaagung Tengah	357.600.000	357.600.000	-
6.	Tambaagung Ares	343.200.000	343.200.000	-
7.	Sogian	343.200.000	343.200.000	-
8.	Tambaagung Timur	367.800.000	367.800.000	-
9.	Bukabu	328.800.000	328.800.000	-
10.	Campor Barat	343.200.000	343.200.000	-
11.	Keles	353.400.000	353.400.000	-
12.	Campor Timur	304.200.000	304.200.000	-
13.	Belluk Ares	328.800.000	328.800.000	-
14.	Belluk Kenek	328.800.000	328.800.000	-
15.	Belluk Raja	382.200.000	382.200.000	-
13.	Kecamatan Pasongsongan	4.582.800.000,00	4.582.800.000,00	-
1.	Montorna	495.000.000	495.000.000	-
2.	Prancak	495.000.000	495.000.000	-
3.	Campaka	445.800.000	445.800.000	-
4.	Rajun	382.200.000	382.200.000	-
5.	Lebbeng Timur	480.600.000	480.600.000	-
6.	Lebbeng Barat	456.000.000	456.000.000	-
7.	Soddara	495.000.000	495.000.000	-
8.	Pasongsongan	445.800.000	445.800.000	-
9.	Padangdangan	431.400.000	431.400.000	-
10.	Panaongan	456.000.000	456.000.000	-
14.	Kecamatan Dasuk	5.332.200.000,00	5.332.200.000,00	-
1.	Slopeng	353.400.000	353.400.000	-
2.	Semaan	353.400.000	353.400.000	-
3.	Batubelah Barat	353.400.000	353.400.000	-
4.	Batubelah Timur	328.800.000	328.800.000	-
5.	Kecer	367.800.000	367.800.000	-
6.	Bates	328.800.000	328.800.000	-
7.	Bringin	382.200.000	382.200.000	-
8.	Jelbudan	382.200.000	382.200.000	-
9.	Kerta Barat	353.400.000	353.400.000	-
10.	Kerta Timur	353.400.000	353.400.000	-
11.	Nyapar	343.200.000	343.200.000	-
12.	Dasuk Barat	328.800.000	328.800.000	-
13.	Dasuk Timur	328.800.000	328.800.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
14. Dasuk Laok	343.200.000	343.200.000	-
15. Mantajun	431.400.000	431.400.000	-
15. Kecamatan Rubaru	4.046.400.000,00	4.046.400.000,00	-
1. Mandala	396.600.000	396.600.000	-
2. Pakondang	372.000.000	372.000.000	-
3. Matanair	372.000.000	372.000.000	-
4. Tambaksari	367.800.000	367.800.000	-
5. Banasareh	343.200.000	343.200.000	-
6. Bunbarat	343.200.000	343.200.000	-
7. Karangnangka	357.600.000	357.600.000	-
8. Basoka	396.600.000	396.600.000	-
9. Duko	357.600.000	357.600.000	-
10. Rubaru	382.200.000	382.200.000	-
11. Kalebbengan	357.600.000	357.600.000	-
16. Kecamatan Batang-Batang	6.894.000.000,00	6.894.000.000,00	-
1. Kolpo	445.800.000	445.800.000	-
2. Tamidung	456.000.000	456.000.000	-
3. Batang Batang Laok	456.000.000	456.000.000	-
4. Batang Batang Daya	618.000.000	618.000.000	-
5. Totosan	367.800.000	367.800.000	-
6. Banuaju Barat	406.800.000	406.800.000	-
7. Banuaju Timur	392.400.000	392.400.000	-
8. Janangger	417.000.000	417.000.000	-
9. Nyabakan Timur	445.800.000	445.800.000	-
10. Nyabakan Barat	445.800.000	445.800.000	-
11. Jangkong	353.400.000	353.400.000	-
12. Legung Barat	392.400.000	392.400.000	-
13. Legung Timur	495.000.000	495.000.000	-
14. Dapenda	519.600.000	519.600.000	-
15. Bilangan	328.800.000	328.800.000	-
16. Lombang	353.400.000	353.400.000	-
17. Kecamatan Batuputih	5.805.600.000,00	5.805.600.000,00	-
1. Aengmerah	470.400.000	470.400.000	-
2. Tangedan	353.400.000	353.400.000	-
3. Juruan Laok	495.000.000	495.000.000	-
4. Juruan Daya	431.400.000	431.400.000	-
5. Badur	378.000.000	378.000.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
6. Gedang Gedang	406.800.000	406.800.000	-
7. Batuputih Kenek	392.400.000	392.400.000	-
8. Batuputih Laok	495.000.000	495.000.000	-
9. Batuputih Daya	445.800.000	445.800.000	-
10. Bantelan	367.800.000	367.800.000	-
11. Larangan Barma	406.800.000	406.800.000	-
12. Larangan Kerta	378.000.000	378.000.000	-
13. Bulla'an	406.800.000	406.800.000	-
14. Sergang	378.000.000	378.000.000	-
18. Kecamatan Dungkek	5.664.600.000,00	5.664.600.000,00	-
1. Candi	417.000.000	417.000.000	-
2. Jadung	406.800.000	406.800.000	-
3. Romben Barat	378.000.000	378.000.000	-
4. Romben Rana	328.800.000	328.800.000	-
5. Romben Guna	406.800.000	406.800.000	-
6. Tamansare	328.800.000	328.800.000	-
7. Bicabi	392.400.000	392.400.000	-
8. Dungkek	406.800.000	406.800.000	-
9. Bunpenang	328.800.000	328.800.000	-
10. Bungin Bungin	304.200.000	304.200.000	-
11. Lapa Taman	367.800.000	367.800.000	-
12. Lapa Laok	367.800.000	367.800.000	-
13. Lapa Daya	328.800.000	328.800.000	-
14. Bancamara	470.400.000	470.400.000	-
15. Banra'as	431.400.000	431.400.000	-
19. Kecamatan Gapura	5.924.400.000,00	5.924.400.000,00	-
1. Grujugan	382.200.000	382.200.000	-
2. Longos	445.800.000	445.800.000	-
3. Andulang	406.800.000	406.800.000	-
4. Gapura Timur	367.800.000	367.800.000	-
5. Mandala	304.200.000	304.200.000	-
6. Gersik Putih	328.800.000	328.800.000	-
7. Gapura Tengah	328.800.000	328.800.000	-
8. Gapura Barat	406.800.000	406.800.000	-
9. Panagan	304.200.000	304.200.000	-
10. Paloklo'an	343.200.000	343.200.000	-
11. Banjar Timur	304.200.000	304.200.000	-
12. Banjar Barat	343.200.000	343.200.000	-
13. Batudinding	328.800.000	328.800.000	-
14. Baban	328.800.000	328.800.000	-
15. Karangbuddi	343.200.000	343.200.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
16. Braji	328.800.000	328.800.000	-
17. Poja	328.800.000	328.800.000	-
20. Kecamatan Gayam	4.164.000.000,00	4.164.000.000,00	-
1. Pancor	505.200.000	505.200.000	-
2. Prambanan	544.200.000	544.200.000	-
3. Gendang Timur	392.400.000	392.400.000	-
4. Karang Tengah	328.800.000	328.800.000	-
5. Jambuir	328.800.000	328.800.000	-
6. Gayam	357.600.000	357.600.000	-
7. Kalowang	544.200.000	544.200.000	-
8. Nyamplong	328.800.000	328.800.000	-
9. Gendang Barat	441.600.000	441.600.000	-
10. Tarebung	392.400.000	392.400.000	-
21. Kecamatan Nonggunong	2.825.408.249,00	2.825.408.249,00	-
1. Nonggunong	328.800.000	328.800.000	-
2. Sumber	304.200.000	304.200.000	-
3. Tanahmerah	304.200.000	304.200.000	-
4. Sokaramme Timur	353.400.000	353.400.000	-
5. Sokaramme Paseser	406.800.000	406.800.000	-
6. Talaga	318.600.000	318.600.000	-
7. Rosong	304.208.249	304.208.249	-
8. Sonok	505.200.000	505.200.000	-
22. Kecamatan Ra'as	3.503.400.000,00	3.503.400.000,00	-
1. Ketupat	382.200.000	382.200.000	-
2. Jungkat	318.600.000	318.600.000	-
3. Kropoh	396.600.000	396.600.000	-
4. Karangnangka	396.600.000	396.600.000	-
5. Alasmalang	343.200.000	343.200.000	-
6. Poteran	392.400.000	392.400.000	-
7. Brakas	495.000.000	495.000.000	-
8. Tonduk	396.600.000	396.600.000	-
9. Gua Gua	382.200.000	382.200.000	-
23. Kecamatan Masalembu	1.377.000.000,00	1.377.000.000,00	-
1. Sukajeruk	357.600.000	357.600.000	-
2. Masalima	357.600.000	357.600.000	-
3. Masakambing	304.200.000	304.200.000	-
4. Kramian	357.600.000	357.600.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
24. Kecamatan Arjasa	9.186.600.000,00	9.186.600.000,00	-
1. Pajanangger	593.400.000	593.400.000	-
2. Sawah Sumur	441.600.000	441.600.000	-
3. Paseraman	529.800.000	529.800.000	-
4. Gelaman	505.200.000	505.200.000	-
5. Buddi	392.400.000	392.400.000	-
6. Kolo Kolo	593.400.000	593.400.000	-
7. Angkatan	519.600.000	519.600.000	-
8. Kalisangka	490.800.000	490.800.000	-
9. Bilis Bilis	529.800.000	529.800.000	-
10. Laok Jangjang	431.400.000	431.400.000	-
11. Sumbernangka	328.800.000	328.800.000	-
12. Duko	519.600.000	519.600.000	-
13. Kalikatak	544.200.000	544.200.000	-
14. Arjasa	519.600.000	519.600.000	-
15. Kalinganyar	466.200.000	466.200.000	-
16. Angon Angon	505.200.000	505.200.000	-
17. Sambakati	505.200.000	505.200.000	-
18. Pandeman	367.800.000	367.800.000	-
19. Pabian	402.600.000	402.600.000	-
25. Kecamatan Sapeken	4.636.800.000,00	4.636.800.000,00	--
1. Sepanjang	445.800.000	445.800.000	-
2. Tanjung Kiaok	382.200.000	382.200.000	-
3. Sakala	392.400.000	392.400.000	-
4. Pagerungan Besar	421.200.000	421.200.000	-
5. Pagerungan Kecil	396.600.000	396.600.000	-
6. Saseel	367.800.000	367.800.000	-
7. Sapeken	568.800.000	568.800.000	-
8. Sabuntan	382.200.000	382.200.000	-
9. Paleat	392.400.000	392.400.000	-
10. Sadulang	431.400.000	431.400.000	-
11. Saur Saebus	456.000.000	456.000.000	-
26 Kecamatan Batuan	2.394.000.000,00	2.394.000.000,00	-
1. Patean	328.800.000	328.800.000	-
2. Babbalan	328.800.000	328.800.000	-
3. Gedungan	304.200.000	304.200.000	-
4. Gunggung	328.800.000	328.800.000	-
5. Batuan	396.600.000	396.600.000	-
6. Torbang	378.000.000	378.000.000	-
7. Gelugur	328.800.000	328.800.000	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
27. Kecamatan Kangayan	3.570.600.000,00	3.570.600.000,00	-
1. Saobi	505.200.000	505.200.000	-
2. Kangayan	495.000.000	495.000.000	-
3. Torjek	456.000.000	456.000.000	-
4. Cangkramaan	328.800.000	328.800.000	-
5. Tembayangan	304.200.000	304.200.000	-
6. Batuputih	328.800.000	328.800.000	-
7. Daandung	382.200.000	382.200.000	-
8. Timur Jangjang	417.000.000	417.000.000	-
9. Jukong Jukong	353.400.000	353.400.000	-

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang berikan kepada pemerintahan tingkat bawahnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD sebagai pelaksana program kegiatan.

1. Permasalahan dan upaya penyelesaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Permasalahan :

- Cuaca masih menjadi kendala utama yang setiap tahun mengalami perubahan yang tidak menentu sehingga kurang mendukung kegiatan produksi garam;
- Belum meratanya teknologi untuk produksi pada waktu musim kemarau basah;
- Kualitas garam yang dihasilkan petambak masih sangat beragam;
- Kesulitan modal bagi petambak garam maupun koperasi dalam penyerapan garam;
- Adanya dampak Covid-19 yang juga dapat menghambat kegiatan produksi garam.

Upaya Penyelesaian :

- Dilakukannya Pelatihan Teknis Teknologi Tepat Guna berupa yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi di saat musim kemarau basah;
- Perlu adanya lahan integrasi garam agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam;
- Perlunya standarisasi harga garam dalam tata niaga garam pada saat pandemi maupun tidak;
- Dibentuknya Koperasi-koparasi Garam di masing-masing kecamatan yang terdapat lahan produksi garam rakyat sehingga koperasi ini dapat berperan sebagai penyangga produksi garam rakyat di masing-masing kecamatan;
- Perlu adanya kerjasama antara petambak, koperasi dan pemerintah setempat demi memajukan swasembada garam di Kabupaten Sumenep Khususnya dan Nasional pada umumnya.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Permasalahan :

- Adanya pemotongan anggaran karena refocusing sehingga kegiatan di re-schedule kembali;
- Harga satuan yang tidak sama dengan harga satuan di daerah.

Upaya Penyelesaian

- Menyesuaikan dengan anggaran yang ada dan fisik tetap sesuai target;
- SPJ menyesuaikan dengan harga satuan di daerah.

3. Permasalahan dan upaya penyelesaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan :

- Adanya Pandemi Covid 19 mengharuskan adanya perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa khususnya

dalam penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sehingga hal ini menyulitkan Pemerintah Desa dalam melakukan perubahan Peraturan Desa;

- Keterlambatan Desa dalam membuat laporan Realisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Upaya Penyelesaian :

- Melakukan koordinasi dengan Camat dan Kepala Desa serta melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa;
- Melaksanakan Sosialisasi kepada Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mendukung program prioritas penggunaan Dana Desa;
- Melakukan Fasilitasi Penyelesaian Laporan Akhir Tahun terhadap penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

BABU

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep ini merupakan hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Pada tahun 2021 sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan juga dengan pengakuan dan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Sumenep. Hal ini dapat diraih atas kerjasama dan partisipasi semua pihak, yaitu jajaran Pemerintah Daerah baik di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Sumenep yang telah mendukung dan tetap menjaga keamanan serta kerukunan sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, dan lancar.

Dari keberhasilan yang dicapai, tentu masih banyak hal yang perlu diperbaiki terhadap kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Daerah membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Karena tantangan dan permasalahan yang terjadi selama tahun 2021, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus diperbaiki dan diselesaikan, sehingga di masa mendatang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dapat lebih berkualitas yang sekaligus sebagai upaya

untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumenep Sejahtera dan berkeadilan.

Sekali lagi Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pelaksana pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Aparat Keamanan, termasuk jajaran Pemerintahan Desa dan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2021 ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.